

# Membangun Pendidikan Efektif

Nur Khoiri

**SEAP**

---

# MEMBANGUN PENDIDIKAN EFEKTIF

---



Dr. H. Nur Khoiri M.Ag.

# MEMBANGUN PENDIDIKAN EFEKTIF

---

Membangun Pendidikan Efektif  
Karya Dr. H. Nur Khoiri M.Ag.

---

Penyunting: Aqil Luthfan  
Penata Aksara: Beni Darmawan  
Perancang Sampul: SeAP Studio

ISBN 978-602-53280-6-0

Cetakan Pertama, April 2019

x + 232 hlm.; 21 cm.

---

Diterbitkan oleh Southeast Asian Publishing  
Puri Delta Asri 3 Blok W No. 2 Semarang  
Telepon +62-8968-449-7722  
Surel: [contact@seapublication.com](mailto:contact@seapublication.com)  
Website: [seapublication.com](http://seapublication.com)

---

©2019

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau keseluruhan  
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kami haturkan kepada Allah swt yang telah memberikan rahmad, taufiq serta hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan lancar tanpa alangan suatu apapun. Sholawat dan salam tidak lupa kami sampaikan kepada Nabi Agung kita Muhammad saw yang pastinya kita nantikan syafaatnya *fi yaumil qiyamah*.

Buku ini disusun dari hasil kajian tentang persoalan pendidikan di Kabupaten Jepara. Meskipun telah beberapa tahun berlalu, namun temuan-temuan yang telah berhasil diungkap dari kajian tersebut akan terus relevan untuk menjawab persoalan-persoalan dibidang pendidikan yang terjadi di masa kini.

Setidaknya buku ini menjadi salah satu pemikiran perbandingan (*second opinion*) bagi pemerintah Kabupaten Jepara, khususnya dalam mengambil kebijakan disektor pendidikan.

Pendidikan efektif merupakan kebutuhan mendasar untuk memperbaiki kinerja disektor pendidikan. Sehingga pada akhirnya tujuan mulia pendidikan dapat direalisasikan. Oleh karena itu model kebijakan pendidikan efektif ini mutlak dibutuhkan. Jadi buku ini kiranya layak untuk menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan pendidikan, tidak hanya di Jepara namun dapat digunakan di daerah lain.

Akhirnya tidak lupa kami sampaikan beribu terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam

penulisan buku ini. Kiranya masih banyak kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan baik redaksi maupun isi, kami berharap dapat dievaluasi sebagai perbaikan dalam penulisan selanjutnya.

Semarang, April 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul — i

Kata Pengantar — v

Daftar Isi — vii

### BAB I PENDAHULUAN — 1

1. Latar Belakang — 1
2. Orientasi — 12
3. Output Kajian — 13
4. Ruang Lingkup — 13
5. Tahapan Kajian — 14
6. Kerangka Analisis — 15

### BAB II KAJIAN TEORI — 19

1. Model Pendidikan Efektif — 19
  - a. Pengertian Model — 19
  - b. Jenis-Jenis Model — 19
2. Kebijakan — 21
3. Pembangunan Pendidikan — 23
4. Pendidikan Efektif — 26
  - a. Pengertian Pendidikan Efektif — 26
  - b. Ciri-ciri Pendidikan Efektif — 28
  - c. Fungsi Pendidikan Efektif — 38
  - d. Pengembangan Pendidikan Efektif — 39
5. Modal Sosial (*Social Capital*) dalam Pendidikan — 54
  - a. Pengertian modal social dalam pendidikan — 41

- b. Peran Modal Sosial dalam Pendidikan — 45

### BAB III METODE KAJIAN — 49

1. Jenis dan Pendekatan Kajian — 49
2. Teknik Pengumpulan Data — 52
3. Teknik Keabsahan Data — 53
4. Teknik Analisis Data — 58

### BAB IV PENDIDIKAN DI JEPARA — 67

1. Gambaran Umum Wilayah Jepara — 67
2. Gambaran Umum Pendidikan — 87
  - a. Pendidikan Anak Usia ini — 87
  - b. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtaiyah — 103
  - c. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah — 144
  - d. Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi — 183

### BAB V STRATEGI PENINGKATAN PENDIDIKAN — 189

1. Kinerja sektor Pendidikan di Jepara — 189
2. Analisis Kinerja dan Keterkaitan antar Sektoral di Bidang Pendidikan — 190
3. Isu Strategis Pengembangan Pendidikan Efektif di Jepara — 193
4. Arah Pengembangan Pendidikan — 194
5. Analisis Kebutuhan Pendidikan — 196
6. Penyelarasan Program dan Kegiatan — 200

BAB VI PENUTUP — 209

1. Kesimpulan — 209
2. Saran — 212

Daftar Pustaka — 219

Biodata Penulis — 222



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Undang-Undang No. 20, Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Pemerataan akses pendidikan ke seluruh lapisan masyarakat dan ke seluruh pelosok negeri akan mempertinggi APS dan mengurangi angka buta aksara sehingga IPM Indonesia akan semakin baik. Perencanaan, proses, dan evaluasi kerja yang sesuai dan

## *Membangun Pendidikan Efektif*

berkesinambungan akan mewujudkan transformasi rakyat Indonesia menuju masyarakat yang berbasis pengetahuan. Kesepakatan dan komitmen terhadap tata nilai, terbentuknya sistem dan prosedur kerja, tersusun dan tertatanya produk hukum dan struktur organisasi, meningkatnya akuntabilitas publik, dan sasaran-sasaran lainnya yang relevan akan sangat diperlukan guna mendukung tema strategis pada periode ini.

Tema strategis pada periode tahun 2015-2020 ditekankan pada pembangunan penguatan pelayanan. Setelah rasio kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan nasional menjadi optimal, fokus selanjutnya adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikan agar relevan dan berdaya saing. Sasaran dan program-program kerja yang terkait harus mampu menjawab tuntutan mutu dari kapasitas pendidikan yang semakin besar dan desentralisasi fiskal serta otonomi daerah yang semakin dewasa.

Strategi penguatan pelayanan ini merupakan peralihan fokus atau penekanan dari pembangunan aspek kuantitas kepada aspek kualitas. Didampingi akses pendidikan yang semakin mudah dan akuntabilitas publik yang semakin transparan, tema mutu layanan pendidikan ini akan menciptakan para penggerak pembangunan menuju visi negara dan bangsa Indonesia yang aman, adil, dan sejahtera. Sasaran-sasaran pendukungnya antara lain implementasi dan operasi yang optimal terhadap tata nilai, Sisdur, dan koordinasi kerja yang telah terstruktur. Pada periode ini pula, Departemen Pendidikan Nasional diharapkan menjadi atau teladan di antara institusi pemerintah lainnya.

Salah satu elemen pada deklarasi visi pendidikan nasional tahun 2025 adalah kompetitif pada tingkatan global. Oleh karena itu, pada periode pembangunan tahun 2015-2020 difokuskan pada kualitas pendidikan yang memiliki daya saing regional pada tingkat ASEAN terlebih dahulu. Standar mutu yang

## Pendahuluan

berkesinambungan pada periode ini diharapkan relevan dengan pasar regional ASEAN. Standar tersebut harus berdasarkan pada yang obyektif dan realistis.

Program kerja yang berdasarkan pemahaman terhadap perkembangan kebutuhan pasar regional menjadi faktor yang sangat penting dalam mencapai daya saing yang diinginkan.

Kegagalan dalam menciptakan mutu pendidikan yang tinggi sesuai dengan kebutuhan atau yang tidak memiliki daya saing hanya akan mencetak angka pengangguran baru.

Program manajemen pendidikan melalui standarisasi, penjaminan mutu, kemudian akreditasi satuan atau program pendidikan yang telah mulai dilakukan sebelumnya akan lebih difokuskan dalam periode ini. Semua itu dilakukan tanpa mengesampingkan program-program sebelumnya yang berhubungan dengan kemudahan akses pendidikan dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaannya.

Sasaran-sasaran pembangunan yang melandasi kebijakan strategis pada periode ini meliputi terbentuk dan beroperasinya sistem layanan dengan standar tingkat ASEAN, citra Depdiknas yang telah lintas negara ASEAN, kerja sama antara negara-negara ASEAN terutama dalam bidang pendidikan yang semakin mantap, dan hal-hal lain yang relevan. Harapannya manusia Indonesia pada akhir periode ini sudah bisa menjadi titik pusat gravitasi sosial ASEAN sebagai sebuah entitas sosiokultural.

Menjelang perwujudan visi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) yang ditargetkan terwujud pada tahun 2025 ini, maka dalam periode pembangunan pendidikan nasional tahun 2020-2025 dicanangkan pencapaian nilai kompetitif secara internasional.

Setelah pada RPJM lima tahunan sebelumnya, pencapaian tingkatan mutu pendidikan nasional Indonesia telah relevan dan

## *Membangun Pendidikan Efektif*

memiliki daya saing di tingkat regional ASEAN, maka pada periode ini tingkatan yang ingin dicapai telah berkelas dunia.

Semakin mengglobalnya industri dan jasa, termasuk jasa pendidikan maka sudah seharusnya Depdiknas dapat menyelenggarakan program pendidikan skala nasional dengan mutu internasional, sehingga pendidikan nasional bangsa Indonesia minimal menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik dapat terus terjaga keasriannya di negeri sendiri. GATS adalah contoh komitmen bangsa-bangsa di dunia dalam menyelenggarakan globalisasi perdagangan jasa dan industri termasuk pula jasa pendidikan.

Dengan menuju terciptanya standar mutu pendidikan berkelas internasional, Depdiknas harus mempunyai sistem layanan standar internasional, citra yang kuat dan mewakili visi pembangunan bangsa Indonesia, dan kerjasama yang erat dengan bangsa-bangsa lain terutama di bidang pendidikan. Sasaran-sasaran tersebut dan lainnya yang dijabarkan dari kebijakan strategis pada periode ini akan membawa kepada perwujudan visi Depdiknas di tahun 2025.

Tonggak-tonggak keberhasilan dalam rentang waktu lima tahunan merupakan bagian dari rencana jangka panjang pembangunan pendidikan tahun 2005 sampai dengan 2025. Tonggak-tonggak keberhasilan mengejewantahkan kebijakan strategis proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang berkesinambungan sesuai dengan kondisi yang ada untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan.

Semua tantangan dari segi akses, mutu, dan akuntabilitas pun dapat terjawab oleh program-program kerja yang relevan dengan kebijakan pada tiap periode. Dengan demikian, visi insan Indonesia cerdas dan kompetitif berdasarkan sistem pendidikan yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global dapat terwujud pada tahun 2025.

## Pendahuluan

Pendidikan mempunyai peranan sangat strategis dalam pembangunan nasional untuk mencapai bangsa yang maju, mandiri dan beradab. Oleh karena itu, Pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan pendidikan merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020 sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja Pemerintah. Menyadari akan pentingnya pendidikan bagi seluruh anak bangsa, Pemerintah terus berupaya memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini penting seperti telah ditegaskan dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pendidikan bahkan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam memasuki era persaingan global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang sangat ketat.

Karena melihat pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan bangsa, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus-menerus meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi segenap anak bangsa melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan, antara lain perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan peningkatan manajemen pelayanan pendidikan.

Kesungguhan pembangunan pendidikan sampai dengan pertengahan tahun 2017 telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Perkembangan ini, antara lain; ditunjukkan dengan penurunan Angka Putus Sekolah (APtS) dari 0,1% pada tahun 2012 menjadi 0,04% di tahun 2016 untuk tingkat

### *Membangun Pendidikan Efektif*

SD/MI, kemudian untuk tingkat SMP/Mts/Sederajat Angka Putus Sekolah menurun dari tahun 2012 sebesar 1% menjadi 0,10%, sedangkan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 94,03 persen, serta meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. APM SD/MI/ sederajat Selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2014 – 2016) telah terjadi penurunan capaian APM dari 97,76% menjadi 89,63%. Hal ini berarti bahwa terdapat 89,63% penduduk yang berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI, sedangkan Tingkat capaian APK SD Kabupaten Jepara pada tahun 2016 sebesar 110,30%, menunjukkan bahwa terdapat 10,30% penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD. Kemudian APK SMP/MTs/ sederajat menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan tren menurun. Pada tahun 2012 APK SMP/ MTS sebesar 79,45%, meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar 95,44% dan menurun menjadi sebesar 84,52% ditahun 2016, sedangkan Pada tahun 2012 APM SMP/MTs sederajat sebesar 69,83% dan meningkat menjadi 79,26% pada tahun 2016. Meskipun demikian, dengan APM SMP/MTs yang sebesar 88,73% masih perlu diupayakan peningkatan pemerataan pendidikan, karena kondisi itu menunjukkan bahwa sekitar 10,74% anak usia sekolah (13-15 tahun) belum mengenyam pendidikan SMP/MTs sederajat.. Sementara itu, APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai sebesar 85,84%, meningkat cukup tinggi jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 sebesar 74,51%, sedangkan APM SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2016 mencapai sebesar 57,86%. Sebagaimana dalam tabel berikut:

## Pendahuluan

Jenjang Pendidikan Educational level	APM Net Enrollment Rate			APK Gross Enrollment Rate		
	Laki-Laki/Male	Perempuan/Female	Total	Laki-Laki/Male	Perempuan/Female	Total
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
SD/MI / Elementary School	94,44	98,27	96,37	111,35	108,58	116,34
SMP/MTs / Junior High School	78,75	73,71	79,36	83,53	83,47	88,24
SMA/SMK/MA / Senior High School	56,97	58,85	57,86	63,47	68,52	65,94
Diploma/Universitas / Diploma/Bachelor	8,48	7,00	8,81	13,18	9,25	9,66

Sumber: Jawa-Java Berencana/Kabupaten, Maret 2016  
 Modifikasi: Laporan Data Ekonomi, Survei, Maret 2016

Salah satu alat ukur kualitas pendidikan penduduk adalah seberapa lama seseorang mengenyam pendidikan. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jepara mencapai 7,32 tahun pada tahun 2016 dari tahun 2012 sebesar 6,96 tahun. Kondisi RLS Kabupaten Jepara selama kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 tidak berbeda dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga mengalami kenaikan tiap tahun.

Sementara itu jumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Jepara dapat dilihat melalui tabel berikut:

*Tabel 1*  
*Jumlah Lembaga Pendidikan di Kabupaten Jepara Tahun 2017*

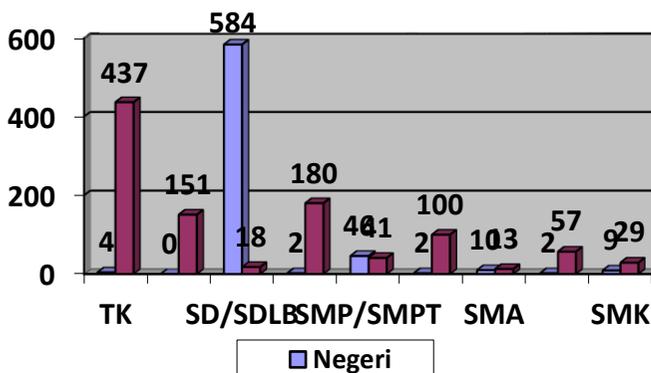
No.	Lembaga	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	4	437	441
2	Raudlatul Athfal	0	151	151
3	Sekolah Dasar	583	18	601
4	SDLB	1	0	1
5	Madrasah Ibtidaiyah	2	180	182
6	SMP	40	41	81
7	SMP Terbuka	6	0	6
8	MTs	2	100	102

## Membangun Pendidikan Efektif

9	SMA	10	13	23
10	MA	2	57	59
11	SMK	9	29	38
Jumlah Total		653	1.026	1.691

*Grafik 1*

*Jumlah Lembaga Pendidikan di Kabupaten Jepara Tahun 2017*



Berdasarkan data diatas maka dapat dijelaskan bahwa jumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Jepara sebanyak 1.663 lembaga (653 berstatus negeri dan 998 berstatus swasta), dengan rincian sebagai berikut: jenjang pendidikan TK sebanyak 441 (negeri 4 dan swasta 437), RA sebanyak 151 lembaga berstatus swasta semua, SD sebanyak 601 lembaga (negeri 583 dan swasta 18), SDLB 1 lembaga berstatus negeri, MI sebanyak 182 lembaga (negeri 2 lembaga dan swasta 180 lembaga), SMP sebanyak 87 lembaga (negeri 40 lembaga dan swasta 41 lembaga), SMP Terbuka sebanyak 6 lembaga berstatus negeri, MTs sebanyak 102 lembaga (negeri 2 lembaga dan swasta 100 lembaga), SMA sebanyak 23 lembaga (negeri 10 lembaga dan swasta 13 lembaga), MA sebanyak 59 lembaga (negeri 2 lembaga dan swasta 57 lembaga), dan SMK sebanyak 38 lembaga (negeri 9 lembaga dan swasta 29 lembaga).

## Pendahuluan

Berbagai upaya peningkatan dan pengembangan terus dilakukan seperti pelatihan, penyegaran, studi lanjut bagi tenaga pendidik dan kependidikan dan sebagainya. Tetapi ironisnya output dari usaha itu masih belum berbanding lurus dengan harapan. Hasil yang dicapai belum seimbang dengan uang yang telah dikeluarkannya. Semangat belajar siswa bukan meningkat tetapi justru menurun. Perpustakaan yang seharusnya menjadi jantung sekolah ternyata sepi dari pengunjung . waktu berkunjung ke perpustakaan sendiri hamper tidak ada karena penuh dengan pelajaran di kelas.

Kondisi pendidikan yang masih memprihatinkan itu tentu memiliki konsekuensi yang panjang bila dihubungkan dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena keduanya tidak bisa dipisahkan (*insparable*). Kualitas pendidikan akan menentukan tingkat pengangguran, kuantitas dan kualitas kreasi dan inovasi di dalam berbagai bidang kehidupan kriminalitas, moral dan sebagainya.

Setelah pengelola pendidikan mendapatkan kritik mendapatkan kritik dari berbagai pihak tentang rendahnya mutu pendidikan ini, maka berbagai kebijakan telah dilakukan. Ada tiga kategori kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. *Pertama*, perbaikan sarana prasarana, baik yang berupa fisik maupun non fisik. *Kedua*, perbaikan financial baik yang berupa kenaikan gaji guru maupun bantuan keuangan langsung ke sekolah, seperti BOS, block grant, bantuan khusus murid dan sebagainya. *Ketiga*, perbaikan SDM, baik bagi guru, masyarakat maupun kepala sekolah. Tidak sedikit guru yang mendapatkan kesempatan penataran, pelatihan, workshop, seminar dan sebagainya.

Data di lapangan menunjukkan belum adanya peningkatan yang berarti di dunia pendidikan. Meskipun gaji guru terus di-

## *Membangun Pendidikan Efektif*

naikkan, bantuan kepada sekolah semakin diperbanyak, penataran banyak dilakukan, management diperbaiki tetapi hal tersebut tidak berbanding lurus dengan peningkatan mutu pendidikan di tanah air. hal tersebut telah menunjukkan bahwa financial capital maupun human capital ternyata tidak mampu secara otomatis memiliki hubungan dengan mutu pendidikan secara umum. Pendidikan tidak cukup hanya didekati dengan satu variable, tetapi multivariable.

Kajian ini akan melihat lembaga pendidikan bukan dari pengembangan SDM atau dari sisi financial, tetapi pengembangan social capital atau sering disebut modal social. Hal ini dibangun beberapa asumsi. *Pertama*, kemajuan kependidikan bukan hanya ditentukan oleh modal keuangan dan ketersediaan SDM yang bagus, tetapi juga sangat ditentukan oleh social capital yang dimiliki oleh sekolah tersebut.

*Kedua*, didalam masyarakat madrasah itu berserakan social capital. Madrasah itu berdiri dan bertahan sampai sekarang itu bukan karena besarnya sumbangan dana yang mengalir ke madrasah tetapi karena dimadrasah itu banyak modal social. Sehingga meskipun madrasah itu gurunya digaji dengan sangat kecil, kepala sekolah banyak yang harus tombok, tetapi madrasah itu tetap berdiri kokoh dan menghasilkan lulusan yang berguna bagi masyarakat, mampu mandiri dan tidak membebani masyarakat.

Ada beberapa hal yang mendasari pentingnya kajian lembaga pendidikan dari aspek pengelolaan social capital (modal social) ini. *Pertama*, human capital dan financial capital ternyata tidak cukup untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak sedikit uang yang dikeluarkan oleh Negara di pasca orde baru untuk meningkatkan pendidikan tetapi hasilnya belum menggembirakan. Uang tidak selamanya membuat damai di sekolah, tetapi banyak yang dibuat berantakan karena hadirnya uang.

## Pendahuluan

*Kedua*, kemampuan Negara untuk membantu melalui finansial dan human capital itu semakin terbatas. Alokasi anggaran 20% masih sulit terealisasi karena banyak hal diluar dugaan membutuhkan bantuan keuangan. Bantuan keuangan Negara kepada institusi pendidikan semakin akan dikurangi, dan selanjutnya diserahkan kepada masyarakat untuk membantunya. Demikian juga kemampuan Negara untuk membantu meningkatkan kualitas SDM juga semakin terbatas karena kemampuan keuangan yang terbatas pula. Untuk menggandeng pihak swasta terlibat didalam pengelolaan madrasah juga tidak mudah. Sebab pihak swasta biasanya lebih menekankan pertimbangan untung dan rugi.

*Ketiga*, pada saat sekarang ini potensi social capital yang beresakan di madrasah sebagian besar belum dikelola dengan baik, bahkan saat ini masih cenderung diabaikan, bahkan dihancurkan secara sistematis. Pengelola madrasah lebih mengutamakan finansial dan human capital daripada social capital. Modal social akhirnya banyak yang menghilang di madrasah. Maka yang terjadi justru kecurigaan, konflik antar geng, lemahnya spirit di dalam mengajar dan sebagainya.

Oleh karena itu, untuk mengembangkan institusi pendidikan, khususnya madrasah yang sampai sekarang ini masih mendapat kepercayaan masyarakat perlu dicari terobosan baru agar sekolah/madrasah itu tetap terus maju dan tidak mengalami penurunan kualitas ditengah terbatasnya sarana prasarana dan minimnya keuangan serta rendahnya mutu SDM. Solusi alternatif untuk meningkatkan kualitas sekolah/madrasah yang berbasis pada potensi yang dimiliki oleh madrasah sendiri perlu terus digali. Pengelola madrasah perlu kembali ke '*potential nature of madrasah*' dan mengembangkannya, bukan menghancurkannya.

## **2. Orientasi**

Maksud dari penyusunan kajian model kebijakan pendidikan efektif di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Menciptakan guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi pada semua jenjang pendidikan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan perkembangan pendidikan masyarakat.
3. Membangun sarana infrastruktur pendidikan untuk dapat menampung anak usia sekolah.
4. Menciptakan para pengelola pendidikan agar memiliki kemandirian dalam mengelola pendidikan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan perkembangan masyarakat.

Tujuan dari penyusunan kajian model kebijakan pendidikan efektif di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Terwujudnya guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi pada semua jenjang pendidikan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan perkembangan pendidikan masyarakat.
3. Mewujudkan pembangunan sarana infrastruktur pendidikan untuk dapat menampung anak usia sekolah.
4. Terlahirnya para pengelola pendidikan agar memiliki kemandirian dalam mengelola pendidikan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan perkembangan masyarakat.

### 3. Output Kajian

Output yang diharapkan dari kajian ini adalah:

1. Terciptanya sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Terciptanya guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi pada semua jenjang pendidikan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan perkembangan pendidikan masyarakat.
3. Terwujudnya sarana infrastuktur pendidikan untuk dapat menampung anak usia sekolah.
4. Terciptanya para pengelola pendidikan agar memiliki kemandirian dalam mengelola pendidikan yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan perkembangan masyarakat.

### 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kajian grand design model kebijakan pendidikan efektif di Kabupaten Jepara adalah:

- a. Analisa tentang kondisi historis dan proyeksi indikator-indikator pengembangan pendidikan di Kabupaten Jepara.
- b. Analisis mengenai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pengembangan pendidikan di Kabupaten Jepara.
- c. Analisis faktor internal dan eksternal terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pengembangan pendidikan di Kabupaten Jepara.
- d. Analisis skenario dampak kebijakan (program/kegiatan) pemerintah daerah kabupaten Jepara terhadap pengembangan pendidikan di Kabupaten Jepara.
- e. Analisis bentuk-bentuk sinergi pemerintah daerah Kabupaten Jepara dengan seluruh stakeholder pendidikan Kabupaten Jepara.

- f. Analisis kerangka desain pengembangan pendidikan di Kabupaten Jepara yang meliputi: tujuan, prasyarat dan strategi pengembangan.
- g. Analisis kondisi internal pendidikan Kabupaten Jepara dan relevansinya dengan kondisi pendidikan provinsi Jawa Tengah dan kondisi pendidikan Indonesia.

## **5. Tahapan Kajian**

Tahapan kajian meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. persiapan: melakukan persiapan komprehensif kajian, koordinasi teknis, kelengkapan administratif, menetapkan indikator, menetapkan alat analisis, menyusun kerangka analisis, dan pembagian tugas tim analisis.
- b. Pengumpulan data: meliputi pengumpulan informasi data primer, maupun skunder dari BPS, dinas-dinas/SKPD terkait, Bank Indonesia, Perbankan, dan Bappeda Kabupaten Jepara.
- c. Pengolahan data: meliputi evaluasi kesesuaian data, tabulasi data, pengolahan data dan verifikasi data akhir.
- d. Analisis data: analisa data pendidikan Kabupaten Jepara yang diderivasi ke dalam kerangka masing-masing poin tujuan kajian. Titik penekanan analisis data diarahkan pada perencanaan pengembangan pendidikan Kabupaten Jepara sebagai kawasan pendidikan yang berdaya saing dan stabil dalam jangka panjang.
- e. Presentasi draft hasil: penyampaian hasil sementara, mempresentasikan hasil, mengevaluasi dan menyempurnakan hasil.
- f. Penyampaian laporan Akhir: menyampaikan hasil kajian pengembangan pendidikan Kabupaten Jepara.

## 6. Kerangka Analisis

Analisis kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses pengkajian yang meliputi lima komponen informasi kebijakan (*policy-informational components*) yang ditransformasikan dari satu ke lainnya dengan menggunakan lima prosedur analisis kebijakan (*policy-analytic procedures*) seperti digambarkan dalam kerangka kerja yang disajikan dalam gambar dibawah.

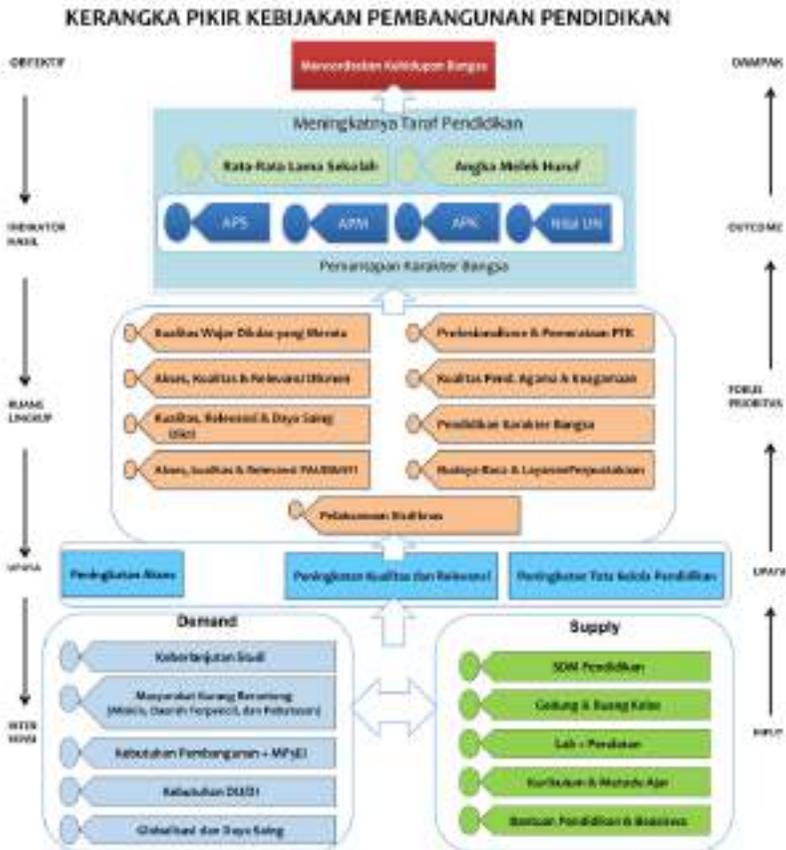
Penggunaan prosedur analisis kebijakan (seperti perumusan masalah, peramalan, pemantauan, evaluasi, rekomendasi) memungkinkan analis mentransformasikan satu tipe ke tipe informasi lainnya. Informasi dan prosedur bersifat saling tergantung; mereka terkait dalam proses dinamis transformasi informasi kebijakan (*policy informational transformations*). Oleh karena itu komponen-komponen informasi kebijakan (seperti masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, kinerja kebijakan) ditransformasikan dari satu ke yang lainnya dengan menggunakan prosedur analisis kebijakan. Seluruh proses diatur melalui perumusan masalah yang diletakkan pada pusat kerangka kerja.

Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi variasi di dalam logika yang digunakan analis adalah sebagai berikut:

1. Laggam kognitif (*cognitive styles*). Laggam kognitif–disposisi personal yang relatif stabil terhadap cara-cara berpikir yang berbeda–mempengaruhi praktek analisis kebijakan.
2. Peranan analitis (*Analytic roles*). Para analis kebijakan memainkan peranan sebagai “pengusaha”, “politisi”, dan “teknisi”.
3. Sistem insentif kelembagaan (*Institutional incentive systems*). Orientasi yang berbeda terhadap analisis –“kritik nilai humanistik” dan “saintifik” –telah ditemukan di dalam lembaga penelitian kebijakan lintas sektoral. Mekanisme bagi control kualitas kelembagaan juga berbeda, mempengaruhi validitas

## Membangun Pendidikan Efektif

atau rasionalitas kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi.



Sumber: Dr. Ir. Subandi Sardjoko, M.Sc., Makalah Perencanaan Pembangunan Pendidikan Nasional, Disampaikan pada Acara Stadium General di Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada 31 Maret 2012.

4. Hambatan waktu institusional (*Institutional time constraints*). Para analis bekerja dibawah hambatan waktu yang ketat, ber-

## Pendahuluan

langsung melalui proses analisis yang lebih cepat dibandingkan dengan para analis yang bekerja untuk lembaga universitas yang hanya mempunyai sedikit hambatan waktu.

Sosialisasi profesional (*professional socialization*). Disiplin yang berbeda-beda mensosialisasikan para anggotanya ke dalam orientasi “dasar” yang lebih tradisional terhadap analisis kebijakan, sementara yang lain mensosialisasikan para anggotanya ke dalam orientasi yang lebih “terapan” yang meliputi nasehat atau rekomendasi.

## *Membangun Pendidikan Efektif*

# BAB II

## KAJIAN TEORI

### 1. Model Pendidikan Efektif

#### a. Pengertian Model

Model adalah pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan (Departemen P dan K, 1984:75). Definisi lain dari model adalah abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam gambaran yang lebih sederhana serta mempunyai tingkat prosentase yang bersifat menyeluruh, atau model adalah abstraksi dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada beberapa sifat dari kehidupan sebenarnya (Simamarta, 1983: ix – xii).

#### b. Jenis-Jenis Model

Jenis-jenis model dapat dibagi dalam lima kelas yang berbeda:

1. Kelas I, pembagian menurut fungsi :
  - a. Model deskriptif : hanya menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa rekomendasi dan peramalan. Contoh : peta organisasi
  - b. Model prediktif : model ini menunjukkan apa yang akan terjadi, bila sesuatu terjadi.

## *Membangun Pendidikan Efektif*

- c. Model normatif : model yang menyediakan jawaban terbaik terhadap satu persoalan. Model ini memberi rekomendasi tindakan-tindakan yang perlu diambil.  
Contoh : model budget advertensi, model economics, model marketing.
2. Kelas II, pembagian menurut struktur.
  - a. Model Ikonik : adalah model yang menirukan sistem aslinya, tetapi dalam suatu skala tertentu.  
Contoh : model pesawat.
  - b. Model Analog : adalah suatu model yang menirukan sistem aslinya dengan hanya mengambil beberapa karakteristik utama dan menggambarkannya dengan benda atau sistem lain secara analog.  
Contoh : aliran lalu lintas di jalan dianalogkan dengan aliran air dalam sistem pipa.
  - c. Model Simbolis : adalah suatu model yang menggambarkan sistem yang ditinjau dengan simbol-simbol biasanya dengan simbol-simbol matematik. Dalam hal ini sistem diwakili oleh variabel-variabel dari karakteristik sistem yang ditinjau.
3. Kelas III, pembagian menurut referensi waktu.
  - a. Statis : model statis tidak memasukkan faktor waktu dalam perumusannya.
  - b. Dinamis : mempunyai unsur waktu dalam perumusannya.
4. Kelas IV, pembagian menurut referensi kepastian.
  - a. Deterministik : dalam model ini pada setiap kumpulan nilai input, hanya ada satu output yang unik, yang merupakan solusi dari model dalam keadaan pasti.
  - b. Probabilistik : model probabilistik menyangkut distribusi probabilistik dari input atau proses dan menghasilkan

## Kajian Teori

suatu deretan harga bagi paling tidak satu variabel output yang disertai dengan kemungkinan-kemungkinan dari harga-harga tersebut.

- c. Game : teori permainan yang mengembangkan solusi-solusi optimum dalam menghadapi situasi yang tidak pasti.
5. Kelas V, pembagian menurut tingkat generalitas.
    - a. Umum
    - b. Khusus

## 2. Kebijakan

### a. Pengertian Kebijakan

Pengertian Kebijakan Menurut (Noeng Muhadjir, 1993: 15) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dipilih kebijakan setidaknya harus memenuhi empat butir yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan: *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi) dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Pengertian Kebijakan Menurut Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh (Syafaruddin, 2008: 75) kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "*Polis*" yang artinya kota (*city*). Dapat ditambahkan, kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa pengertian kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

**b. Pengertian Kebijakan Pendidikan Menurut Ahli**

Istilah kebijakan dalam dunia pendidikan sering disebut dengan istilah perencanaan pendidikan (*educational planning*), rencana induk tentang pendidikan (*master plan of education*), pengaturan pendidikan (*educational regulation*), kebijakan tentang pendidikan (*policy of education*) namun istilah-istilah tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukkan oleh istilah tersebut (Arif Rohman, 2009: 107-108).

Pengertian Kebijakan Pendidikan menurut (Riant Nugroho, 2008: 37) sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan di pahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan Negara Bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan Negara Bangsa secara keseluruhan.

Pengertian Kebijakan Pendidikan menurut Arif Rohman (2009: 108) kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus

regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.

Berdasarkan pada beberapa pendapat mengenai kebijakan pendidikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang di ambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan.

### **3. Pembangunan Pendidikan**

#### **a. Pengertian Pembangunan**

Terkait dengan pengertian pembangunan, mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)". Sedangkan Ginanjar Kartasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana".

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek

perubahan, di mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefenisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Atau dengan kata lain, pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

### **b. Pengertian Pembangunan Pendidikan**

Sesuai dengan penjelasan yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, dapat ditarik pengertian secara umum bahwa pembangunan adalah suatu proses untuk berubah menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya melalui upaya yang direncanakan. Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar tercipta peserta didik yang secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembangunan pendidikan adalah suatu proses usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang baik sehingga

mampu merubah dan mengembangkan kemampuan peserta didik kearah yang lebih baik.

#### **4. Pendidikan Efektif**

##### **a. Pengertian Pendidikan Efektif**

Efektifitas adalah ukuran yang menyatakan sejauhmana sasaran/tujuan (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Dalam bentuk persamaan, efektifitas adalah sama dengan hasil nyata dibagi hasil yang diharapkan. Sekolah efektif menunjukkan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Abin (1999:11) menegaskan bahwa efektifitas sekolah pada dasarnya menunjukkan tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai berupa achievement atau observal outputs dengan hasil yang diharapkan berupa objectives, target, intended output sebagaimana telah ditetapkan.

Pendidikan efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, pendidik (dosen, guru, instruktur, dan trainer) dituntut untuk dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna (prof. H. Qomari Anwar, MA).

Sekolah efektif dalam bahasa Inggris berasal dari dua kata, yaitu *effective dan school*. Makna efektif merujuk pada kemampuan menghasilkan sesuatu atau mampu mencapai tujuan. Efektivitas merupakan ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai.

Sekolah efektif memiliki pengertian yang berbeda dengan efektivitas sekolah. ACT Council of P&C Associations (2007) mendefinisikan sekolah efektif sebagai "*those that successfully pro-*

## Kajian Teori

*gress the learning and development of all of thei students*". Definisi diatas dapat dimaknai bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mampu meningkatkan belajar peserta didiknya dan mengembangkan semua siswa yang ada di sekolah tersebut secara sukses.

Sammons, Hilmans and Mortimore (1995: 3) mendefinisikan sekolah efektif sebagai:

"one in which pupils progress further than might be expected from consideration of its intake. In other word an effective schools adds extra value to its students outcome in comparison with other schools serving similar intakes. By contrast an ineffective school is one in which students make less progress than expected given their characteristic at intake".

Definisi dari Sammons, Hilman dan Mortimore ini dapat dipahami bahwa sekolah efektif merupakan satu hal dimana kemajuan para siswa lebih baik dari kondisi yang biasa diharapkan. Atau sekolah efektif itu sekolah yang memberikan nilai lebih pada peserta didiknya dibandingkan sekolah lain yang memiliki karakteristik yang sama.

Sedangkan Lawrenze W. Lezotte (1985) mendefinisikan sekolah efektif yaitu sekolah yang mampu memiliki dampak pembelajaran untuk mencapai semua misi, menunjukkan adanya kesamaan dalam mutu/kualitas.

Sekolah efektif adalah sekolah yang menjalankan fungsinya sebagai tempat belajar yang paling baik dengan menyediakan layanan pembelajaran yang bermutu bagi siswa siswinya. (Joni Ukat, 2008 : 1). Pengertian umum sekolah efektif juga berkaitan dengan perumusan apa yang harus dikerjakan dengan apa yang telah dicapai. Sehingga suatu sekolah akan disebut efektif jika terdapat hubungan yang kuat antara apa yang telah dirumuskan un-

tuk dikerjakan dengan hasil-hasil yang dicapai oleh sekolah, sebaliknya sekolah dikatakan tidak efektif bila hubungan tersebut rendah (Getzel, 1969).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sekolah efektif merupakan sekolah yang mampu memberikan layanan KBM yang bermutu yang didukung oleh proses penyelenggaraan yang bermutu dan mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. Makna ini menunjukkan bahwa sekolah tidak dikategorikan sebagai efektif manakala peserta didiknya memiliki hasil yang bermutu dikarenakan kontribusi dari bimbingan belajar bukan dari proses yang dialami anak di sekolah.

### **b. Ciri-Ciri Pendidikan Efektif**

Ciri utama sekolah efektif, (Davis & Thomas, 1989: 12)

- (a) kepemimpinan (*instruksional*) yang kuat;
- (b) harapan yang tinggi terhadap prestasi siswa;
- (c) adanya lingkungan belajar yang tertib dan nyaman;
- (d) menekankan kepada keterampilan dasar;
- (e) pemantauan secara kontinyu terhadap kemajuan siswa; dan
- (f) terfokuskan tujuan sekolah secara jelas;

Sekolah efektif memiliki indikator yang beragam tetapi mengarah pada kualitas hasil pembelajaran. Suharsaputra, Uhar (2010 : 65) memandang sekolah efektif dari tiga perspektif, yaitu sekolah efektif dalam perspektif mutu pendidikan, sekolah efektif dalam perspektif manajemen, dan sekolah efektif dalam perspektif teori organisme.

#### **a. Sekolah Efektif dalam Perspektif Mutu Pendidikan**

Penyelenggaraan layanan belajar bagi peserta didik biasanya dikaji dalam konteks mutu pendidikan yang erat hubungannya dengan kajian kualitas manajemen dan sekolah efektif. Sekolah dianggap bermutu apa bila peserta didiknya, sebagian besar atau

seluruhnya, memperoleh nilai /angka yang tinggi, sehingga berpeluang untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Persepsi tersebut tidak keliru apabila nilai atau angka tersebut diakui sebagai representasi dari totalitas hasil belajar, yang dapat dipercaya menggambarkan derajat perubahan tingkah laku atau penguasaan kemampuan yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

### ***b. Sekolah Efektif dalam Perspektif Manajemen***

Manajemen sekolah merupakan proses pemanfaatan seluruh sumberdaya sekolah yang dilakukan melalui tindakan yang rasional dan sistematis (mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan tindakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien, (Suharsaputra, Uhar, 2010: 66). Dilihat dari prespektif manajemen, (Suharsaputra, Uhar, 2010: 66) mengemukakan dimensi sekolah efektif yang meliputi :

- 1) Layanan belajar bagi siswa.
- 2) Pengelolaan dan layanan siswa.
- 3) Sarana dan prasarana sekolah.
- 4) Program dan pembiayaan.
- 5) Partisipasi masyarakat.
- 6) Budaya sekolah.

Djam'an Satori (2000) mengemukakan sekolah efektif dalam perspektif manajemen, merupakan proses pemanfaatan seluruh sumber daya sekolah yang dilakukan melalui tindakan yang rasional dan sistematis (mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan tindakan, dan pengendalian) untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Selanjutnya jika dilihat dalam perspektif ini, dimensi dan indikator sekolah efektif dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Layanan belajar bagi siswa

## Membangun Pendidikan Efektif

Dimensi ini mencakup seluruh kegiatan yang ditujukan untuk menciptakan mutu pengalaman belajar.

### 2) Mutu mengajar guru

Aspek ini merupakan refleksi dari kinerja profesional guru yang ditunjukkan dalam penguasaan bahan ajar, metode dan teknik mengajar untuk mengembangkan interaksi dan suasana belajar mengajar yang menyenangkan, pemanfaatan fasilitas dan sumber belajar, melaksanakan evaluasi hasil belajar. Indikator mutu mengajar dapat pula dilihat dalam dokumen perencanaan mengajar, catatan khusus siswa bermasalah, program pengayaan, analisis tes hasil belajar, dan sistem informasi kemajuan/prestasi belajar siswa.

### 3) Kelancaran layanan belajar mengajar

Sesuai dengan jadwal, layanan belajar mengajar merupakan "*core bussiness*" sekolah. Bagaimana kelancaran layanan tersebut, sesuai dengan jadwal yang telah disusun merupakan indikator penting kinerja manajemen sekolah efektif. Adanya gejala "kelas bebas" karena guru tidak masuk kelas atau para siswa tidak belajar disebabkan oleh interupsi rapat sekolah atau kegiatan lainnya, merupakan keadaan yang tidak boleh dianggap wajar.

### 4) Umpan balik yang diterima siswa

Siswa sepatutnya memperoleh umpan balik yang menyangkut mutu pekerjaannya, seperti hasil ulangan, ujian atau tugas-tugas yang telah dilakukannya.

### 5) Layanan keseharian guru terhadap siswa

Untuk kepentingan pengajaran atau hal lainnya, murid memerlukan menemui gurunya untuk berkonsultasi. Kesediaan guru untuk melayani konsultasi siswa sangat penting untuk mengatasi kesulitan belajar.

### 6) Kenyamanan ruang kelas

## Kajian Teori

Ruang kelas yang baik memenuhi kriteria ventilasi, tata cahaya, kebersihan, kerapihan, dan keindahan akan membuat para penghuninya merasa nyaman dan aman berada di dalamnya.

### 7) Ketersediaan fasilitas belajar

Sekolah memiliki kewajiban menyediakan setiap fasilitas yang mendukung implementasi kurikulum, seperti laboratorium, perpustakaan fasilitas olah raga dan kesenian, dan fasilitas lainnya untuk pengembangan aspek-aspek kepribadian.

### 8) Kesempatan siswa menggunakan berbagai fasilitas sekolah

Sesungguhnya sekolah diartikan untuk melayani para siswa yang belajar dan oleh karenanya para siswa hendak diperlukan sebagai pihak yang harus menikmati penggunaan setiap fasilitas yang tersedia di sekolah, seperti fasilitas olah raga, kesenian dalam segala bentuknya, ruang serba guna, kafteria, mushola, laboratorium, perpustakaan, komputer, internet dan lain sebagainya.

### 9) Pengelolaan dan layanan siswa

Seperti telah diungkapkan terdahulu, siswa adalah kaste-mer primer layanan pendidikan. Sebagai kastemer, para siswa sepatutnya memperoleh kepuasan. Kepuasan tersebut menyangkut;(1) mutu layanan yang berkaitan dengan kegiatan belajarnya, (2) mutu layanan dalam menjalani tugas-tugas perkembangan pribadinya, dan (3) pemenuhan kebutuhan kemanusiaannya (dari kebutuhan dasar, rasa aman, penghargaan, pengakuan dan aktualisasi diri).

### 10) Sarana dan prasarana sekolah

Sarana dan prasarana atau disebut sebagai fasilitas sekolah mencakup, gedung, lahan dan peralatan pelajaran. Aspek penting dari gedung tersebut adalah kualitas fisik dan kenyamanan ruang kelas di mana "*core bussiness*" pendidikan di sekolah diselenggarakan. Aspek lain dari gedung adalah

kualitas fisik dan kenyamanan ruang manajemen (ruang kerja kepala sekolah dan layanan administratif), ruang kerja guru, ruang kebersamaan (*common room*), dan fasilitas gedung lainnya seperti kafetaria, toilet, dan ruang pentas. Lahan sekolah yang baik ditata sedemikian rupa sehingga menciptakan kenyamanan bagi penghuninya.

11) Program dan pembiayaan

Sekolah efektif memiliki perencanaan strategik dan tahunan yang dipatuhi dan diketahui oleh masyarakat sekolah. Kepemilikan perencanaan strategik sekolah membantu mengarahkan dinamika orientasi sekolah yang dibimbing visi, misi, kejelasan prioritas program, sasaran dan indikator keberhasilannya. Perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari perencanaan strategik yang berisi program-program berisi program-program operasional sekolah. Program-program tersebut, didukung oleh pembiayaan yang memadai dengan sumber-sumber anggaran yang andal dan permanen. Kebijakan dan keputusan yang menyangkut pengembangan sekolah tersebut dilakukan dengan memperhatikan partisipatif staf dan anggota masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah).

12) Partisipasi masyarakat

Di samping memberdayakan secara optimal staf yang dimilikinya, sekolah yang efektif akan menaruh perhatian yang sungguh-sungguh pula terhadap pemberdayaan masyarakat sekolah. Hal itu akan diwujudkan dengan cara menyediakan wadah yang memungkinkan mereka, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan, ikut terlibat dalam memikirkan, membahas, membuat keputusan, dan mengontrol pelaksanaan sekolah. Wadah seperti itu, dalam penyelenggaraan sekolah-sekolah di Australia dikenal sebagai "*school council*", yang di Indonesia diusulkan komite sekolah, orang tua murid, anggota

## Kajian Teori

masyarakat setempat (seperti tokoh agama, pengusaha, petani sukses, cendekiawan, politikus, dan sejenisnya), dan representatif staf dari Depdiknas setempat.

### 13) Budaya sekolah

Budaya sekolah merupakan tatanan nilai, kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan yang direfleksikan dalam tingkah laku keseharian, baik perorangan maupun kelompok. Budaya sekolah dapat diartikan sebagai respon psikologis penghuni sekolah terhadap peristiwa kehidupan keseharian yang terjadi di sekolah. Budaya sekolah akan berpengaruh terhadap pencapaian misi sekolah apabila melahirkan respon psikologis yang positif dan menyenangkan bagi sebagian besar atau seluruh penghuni sekolah. Budaya sekolah dalam pengertian ini sering diartikan sama dengan iklim sekolah, yaitu suasana kehidupan keseharian yang berlangsung di sekolah yang memberi pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap respon psikologis para penghuninya.

### c. *Sekolah Efektif dalam Perspektif Teori Organisme*

Garmston and Wellman, (dalam Suharsaputra, Uhar, 2010:66) menyatakan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mewujudkan apa yang disebut sebagai *self-renewing schools* atau *adaptive schools*, yaitu suatu kondisi dimana kelembagaan sekolah sebagai suatu entitas mampu menangani permasalahan yang dihadapinya, sementara menunjukkan kapabilitasnya dalam berinovasi. Agar sekolah bisa adaptif menurut Tola dan Furqon (dalam Suharsaputra, Uhar, 2010:67).

Kriteria sekolah efektif, (Sergiovanni (1987)

- 1) Skor tes UAN meningkat
- 2) Kehadiran (guru, siswa, staf) meningkat
- 3) Meningkatnya jumlah PR
- 4) Meningkatnya waktu untuk penyampaian mata pelajaran

## Membangun Pendidikan Efektif

- 5) Adanya partisipasi masyarakat dan orang tua
- 6) Partisipasi siswa dalam ekstra kurikuler
- 7) Penghargaan bagi siswa dan guru
- 8) Kualitas dukungan layanan bagi siswa dengan kebutuhan khusus



### d. Kepala Sekolah Efektif

- 1) Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut.
- 2) Memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf.
- 3) Tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan balik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran.
- 4) Mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisasi kekacauan.
- 5) Mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif.
- 6) Memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif dan memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional.

*e. Indikator Kinerja Kepala Sekolah Efektif di Era Global*

- 1) Mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, yang mencakup aktifitas-aktifitas:
  - a. Menciptakan situasi kelas yang kondusif.
  - b. Menumbuhkan siswa (sikap) aktif, kreatif, kritis, dan memahami materi ajar.
  - c. Menumbuhkan rasa percaya diri dan saling menghargai sesama.
  - d. Memotivasi kemampuan siswa untuk menggunakan media pembelajaran.
  - e. Siswa memiliki sumber belajar.
- 2) Menerapkan system evaluasi yang efektif dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan, dengan menyiapkan dan melaksanakan:
  - a. Adanya jadwal evaluasi terprogram.
  - b. Alat evaluasi yang standard.
  - c. Analisa hasil evaluasi/belajar.
  - d. Pelaksanaan program perbaikan, pengayaan, dan penghargaan yang berkelanjutan.
  - e. Penerapan tutor sebaya/Team Teaching.
  - f. Penulisan kisi-kisi, soal yang professional.
- 3) Melakukan refleksi diri ke arah pembentukan karakter kepemimpinan sekolah yang kuat, yang ditunjukkan dengan:
  - a. Dapat memberi keteladanan.
  - b. Komitmen terhadap tugas.
  - c. Kebersamaan/kekompakan dalam melaksanakan tugas.
  - d. Implementasi Imtaq/amaliah
- 4) Melaksanakan pengembangan staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, melalui:
  - a. Pemberian penghargaan dan sanksi yang tepat.
  - b. Pemberian tugas yang adil dan merata sesuai dengan kemampuan.

## *Membangun Pendidikan Efektif*

- c. Memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas.
- 5) Menumbuhkan sikap responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan, dengan:
  - a. Senantiasa mengikuti perkembangan IPTEK dalam PBM (Sarana dan Metode).
  - b. Membiasakan warga sekolah berkomunikasi dalam bahasa Inggris (Bahasa Asing).
  - c. Membudayakan sikap selalu ingin maju.
  - d. Memperluas kerja sama dengan pihak luar dalam rangka otonomi sekolah.
  - e. Mengadopsi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu di segala bidang
- 6) Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tertib (*Safe and Orderly*), dengan:
  - a. Memantapkan tata tertib yang tegas dan konsekuen.
  - b. Kerjasama yang baik antara sekolah, masyarakat sekitar dan aparat keamanan.
  - c. Menjadikan sekolah yang bebas dari rokok dan Narkoba.
  - d. Menciptakan rasa kekeluargaan yang tinggi di antara warga sekolah (5 S = Salam, Sapa, Sopan, Senyum, Silaturahmi).
  - e. Menciptakan nuansa sekolah yang aman, tenteram dan damai (Taman, Penghijauan, Musik, yang halus).
- 7) Menumbuhkan budaya mutu di lingkungan sekolah, dengan cara:
  - a. Memberikan reward kepada guru, siswa yang berprestasi.
  - b. Memberdayakan MGMP tingkat sekolah/Hari MGMP/Sabtu.
  - c. Mewajibkan warga sekolah untuk memberdayakan perpustakaan/sumber belajar lainnya.

## Kajian Teori

- d. Peningkatan kualitas kehidupan beragama.
  - e. Memiliki target mutu yang tinggi dan slogan /motto.
  - f. Menanamkan rasa memiliki pada warga sekolah.
- 8) Menumbuhkan harapan prestasi tinggi, dengan:
- a. Mengadakan lomba cepat dalam kegiatan class meeting.
  - b. Membuat jadwal rutin Olah Raga prestasi.
  - c. Mendorong siswa untuk mengikuti perlombaan-perlombaan.
  - d. Memiliki komitmen dan motivasi yang kuat.
  - e. Guru harus memiliki komitmen dan harapan tinggi terhadap siswa.
  - f. Semua harus memiliki motivasi diri untuk berprestasi.
- 9) Menumbuhkan kemauan untuk berubah, dengan:
- a. Mengikutsertakan guru untuk menambah wawasan.
  - b. Pemberian motivasi kerja yang tepat.
  - c. Memberikan kesempatan untuk pengembangan/ peningkatan jenjang karir.
  - d. Melakukan pembinaan.
- 9) Melaksanakan Keterbukaan/Transparan Manajemen Sekolah, dengan cara:
- a. Membuat Program kerja, yang melibatkan semua warga sekolah.
  - b. Sosialisasi Program kerja.
  - c. Melaksanakan Program.
  - d. Mengadakan Pembinaan secara continue.
  - e. Membuat Laporan hasil pelaksanaan secara periodik.
  - f. Mengadakan rapat Evaluasi secara periodik.
- 10) Menetapkan secara jelas mewujudkan Visi dan Misi, dengan:
- a. Memberdayakan seluruh komponen sekolah dalam menyusun Visi sekolah.
  - b. Melibatkan semua komponen sekolah dalam menjabarkan Visi ke dalam indikator yang jelas.

## *Membangun Pendidikan Efektif*

- c. Menyusun Misi Realistis yang terdiri dari jangka pendek, menengah dan Panjang untuk mencapai Visi, dengan melibatkan semua komponen sekolah.
- 11) Melaksanakan pengelolaan tenaga kependidikan secara efektif, dengan:
- a. Memberdayakan disiplin guru dan karyawan.
  - b. Membudayakan pelayanan prima.
  - c. Meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan melalui pelatihan-pelatihan atau lainnya.
  - d. Meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan.
  - e. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan kompetitif yang sehat dengan memberikan penghargaan dan sanksi.
- 12) Melaksanakan pengelolaan sumber belajar secara efektif, dengan:
- a. Menginventarisir semua sumber-sumber belajar, di dalam dan di luar sekolah.
  - b. Menentukan sumber belajar yang efektif sesuai kemampuan sekolah.
  - c. Pengadaan sumber-sumber belajar sesuai kemampuan.
  - d. Sosialisasi pemanfaatan semua sumber belajar.
  - e. Merencanakan pemanfaatan sumber belajar.
- 13) Melaksanakan pengelolaan kegiatan kesiswaan/ Ekstrakurikuler secara efektif, dengan:
- a. Menginventarisir sarana prasarana ekstrakurikuler.
  - b. Menginventarisir minat dan bakat siswa.
  - c. Mencari peluang kerjasama dengan pihak lain.
  - d. Mencari peluang pengadaan dana dari donator.
  - e. Menentukan jenis-jenis ekstrakurikuler.

### **3. Fungsi Sekolah Efektif**

## Kajian Teori

Cheng (1994) berpendapat bahwa sekolah efektif menunjukkan pada kemampuan sekolah dalam menjalankan fungsinya secara maksimal, baik fungsi ekonomis, fungsi sosial kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya maupun fungsi pendidikan. Pengertian fungsi-fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Fungsi ekonomis, adalah sekolah memberikan bekal kepada siswa agar dapat melakukan aktivitas ekonomi sehingga dapat hidup sejahtera.
- b. Fungsi sosial kemanusiaan, adalah sekolah sebagai media bagi siswa untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat.
- c. Fungsi politis adalah sekolah sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.
- d. Fungsi budaya adalah sekolah sebagai media untuk melakukan transmisi dan transformasi budaya.
- e. Fungsi pendidikan adalah sekolah sebagai wahana untuk proses pendewasaan dan pembentukan kepribadian siswa.

### 4. Pengembangan Sekolah Efektif

Sekolah efektif merupakan sekolah yang memiliki sejumlah karakteristik sebagai sekolah efektif. Keberhasilan sekolah mewujudkan berbagai karakteristik sekolah efektif, bergantung pada kemampuan sumber daya manusia di sekolah dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Kemampuan sumber daya manusia di sekolah dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing itu dapat dikembangkan dengan membangun budaya sekolah efektif. Membangun budaya sekolah dengan pusat perhatian pada budaya keunggulan (*culture of excellence*) menekankan pada perubahan pikiran, kata-kata, sikap, perbuatan dan hati setiap

## *Membangun Pendidikan Efektif*

warga sekolah. Budaya sekolah adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau falsafah yang menuntun kebijakan sekolah terhadap semua unsur dan komponen sekolah termasuk stakeholders pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan di sekolah serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh personil sekolah.

Budaya sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan dan norma-norma yang diterima secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami, yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama diantara seluruh unsur dan personil sekolah baik itu kepala sekolah, guru, staf, siswa dan jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan sekolah. Membangun budaya sekolah efektif sangatlah diperlukan dalam konteks pengembangan sekolah efektif.

Berikut ini merupakan beberapa karakteristik Sekolah yang efektif:

- a. Kepemimpinan Sekolah yang profesional (*Professional Leadership*)
- b. Visi dan tujuan bersama (*Shared Vision and Goals*)
- c. Lingkungan belajar (*a Learning Environment*)
- d. Konsentrasi pada belajar mengajar (*Concentration on Learning and Teaching*)
- e. Harapan yang tinggi (*High Expectation*)
- f. Penguatan/pengayaan yang positif (*Positive Reinforcement*)
- g. Pemantauan Kemajuan (*Monitoring Progress*)
- h. Hak dan tanggungjawab peserta didik (*Pupil Rights and Responsibility*)
- i. pengajaran yang penuh makna (*Purposeful Teaching*)
- j. Organisasi pembelajar (*a Learning Organization*)
- k. Kemitraan sekolah - keluarga (*Home-School Partnership*).

## Kajian Teori

Berdasarkan karakteristik sekolah efektif diatas, maka upaya pengembangan budaya sekolah yang efektif seyogyanya mengacu kepada beberapa prinsip berikut ini:

- a. Berfokus pada Visi, Misi dan Tujuan Sekolah.
- b. Penciptaan Komunikasi Formal dan Informal.
- c. Inovatif dan Bersedia Mengambil Resiko.
- d. Memiliki Strategi yang Jelas.
- e. Berorientasi Kinerja.
- f. Sistem Evaluasi yang Jelas.
- g. Memiliki Komitmen yang Kuat.
- h. Keputusan Berdasarkan Konsensus.
- i. Sistem Imbalan yang Jelas.
- j. Evaluasi diri.

### 5. Modal Sosial (*Social Capital*) dalam Pendidikan

#### a. Pengertian Modal Sosial dalam Pendidikan

Pemahaman istilah "*Modal Sosial*" atau *Social Capital* sementara ini memang belum meluas, karena mungkin belum dianggap menjadi suatu teori yang spesifik dan penting bagi kajian-kajian sosial. Atau mungkin juga karena istilah "*Modal Sosial*" memang dianggap sudah termasuk dalam konsep pemahaman teori-teori sosiologi yang sudah biasa dikenal.

Ada tiga ahli yang paling banyak dikutip orang dalam mengkonstruksikan definisi tentang capital social untuk diterapkan dalam penelitian lapangan atau dalam menyusun makalah. Ketiga ahli itu adalah James Coleman (1988), Robert Putnam (1993), dan Francis Fukuyama (1995). Selain itu perlu dikemukakan di sini definisi Bank Dunia yang menjadi rumusan para ahli (akademisi dan pemimpin NGO) yang tergabung dalam kelompok *Advisory Council to the Vice Presidency for Environmentally Sustainable Development*. Salah satu anggotanya adalah Clifford Geertz, seorang ahli antropologi tentang Indonesia di masa silam.

Dua yang terakhir adalah definisi Jonathan H. Turner, seorang ahli sosiologi dan penulis sendiri. (Lawang, 2005 : 209).

Dimulai dari kata modal sosial itu sendiri, menurut Robert M. Solow (1999:6) menyatakan bahwa :

Modal sosial adalah usaha untuk mendapatkan suatu keyakinan dari analogi yang buruk. Umumnya “modal” diinterpretasikan sebagai persediaan barang, atau faktor-faktor alam dari sebuah produksi yang diharapkan dapat menghasilkan pada suatu saat tertentu. Pada dasarnya orang akan membicarakan mengenai “modal” akan mempunyai pemikiran tentang persediaan yang nyata, padat, bahkan benda-benda seperti bangunan, mesin dan lain-lain.

Modal yang dimaksudkan tadi adalah modal fisik (*physical capital*) yang memiliki bentuk/wujud dari seprangkat alat yang tentunya dapat diambil/dimanfaatkan sebagai suatu sumber yang menghasilkan sesuatu.

Modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu darinya. Modal sosial dapat dilembagakan dalam bentuk kelompok sosial paling kecil atau paling mendasar dan juga kelompok-kelompok masyarakat paling besar seperti halnya negara (bangsa) (Fukuyama, 1995). Modal sosial diyakini sebagai sesuatu yang merujuk pada dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas serta kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal sosial bukanlah sekedar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang (*underpinning*) kehidupan sosial, melainkan dengan spektrum yang lebih luas. Yaitu sebagai perekat (*social glue*) yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama (Bank Dunia, 1999).

## Kajian Teori

Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan ruh modal sosial antara lain: sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya. Unsur lain yang memegang peranan penting adalah kemauan masyarakat untuk secara terus menerus proaktif baik dalam mempertahankan nilai, membentuk jaringan kerjasama maupun dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru. Inilah jati diri modal sosial yang sebenarnya.

Tantangan bagi dunia pendidikan umumnya dan pendidikan luar sekolah khususnya adalah bagaimana hasil pendidikan tidak sekedar menekankan pada penguatan modal manusia (pengetahuan dan keterampilan) tapi juga mengarahkan pada optimalisasi potensi masyarakat yang tertuang dalam modal sosial. Sehingga secara bersama-sama manusia memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan memanfaatkan institusi sosial yang ada untuk mencapai tujuan bersama.

Praktik-praktik kependidikan dewasa ini mengalami banyak perubahan dan pengembangan, tidak terkecuali pendidikan luar sekolah. Salah satu isu yang relevan dengan pengembangan pendidikan luar sekolah adalah konsep modal sosial (*social capital*). Modal sosial menjadi isu relevan mengingat jurusan pendidikan luar sekolah memiliki peluang besar untuk menerapkan dan mengembangkan konsep ini sesuai dengan budaya yang berkembang di Indonesia.

Modal sosial menjadi sangat penting dan relevan dengan pendidikan luar sekolah karena sangat memungkinkan bagi praktisi pendidikan luar sekolah untuk berperan didalamnya. Secara konseptual social capital membuka peluang bagi warga negara untuk menyelesaikan masalah bersama dengan lebih mudah. Masyarakat seringkali menjadi lebih baik jika bekerjasama dengan orang lain.

## *Membangun Pendidikan Efektif*

Modal sosial memberikan kelancaran bagi masyarakat untuk berkembang dengan baik, dimana setiap orang saling mempercayai dan dapat dipercaya dalam setiap interaksi keseharian baik itu interaksi bisnis, interaksi kemasyarakatan atau interaksi lainnya. Modal sosial meningkatkan kesadaran bahwa nasib seseorang saling berhubungan, seseorang tidak dapat menguji pandangannya sendiri tanpa melalui dialog dengan orang lain, baik dalam forum formal maupun informal. Tanpa kesempatan berinteraksi dengan orang lain, maka seseorang lebih cenderung memperoleh pengaruh atau dorongan yang lebih buruk dari dirinya.

Konsep modal sosial adalah suatu ikatan sosial antar manusia di dalam sebuah masyarakat yang sangat penting untuk membentuk kohesivitas sosial dalam mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain modal sosial adalah suatu kekuatan untuk mencapai tujuan hidup bersama yang tidak mungkin dicapai secara personal.

Dalam definisi lain, modal sosial merupakan bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi dengan tindakan-tindakan yang terkoordinasi, atau suatu kemampuan masyarakat untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama dalam berbagai komunitas.

Manusia merupakan makhluk sosial yang pasti memerlukan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sedari lahir hingga mati. Manusia mampu untuk hidup mandiri, namun bukan berarti hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia juga dituntut untuk hidup harmonis dengan masyarakat sekita dan beradaptasi dengan lingkungannya.

Contoh dari modal sosial yang melekat dalam masyarakat misalnya kebersamaan, solidaritas, toleransi, semangat bekerjasama, kemampuan berempati, dan lain sebagainya. Tidak

adanya modal sosial itu dikhawatirkan akan mengancam kehidupan bersama yang seharusnya berjalan dengan harmonis, seperti banyaknya konflik akhir-akhir ini. Masalah-masalah kolektif juga akan sulit untuk diselesaikan tanpa adanya modal sosial ini.

### **b. Peran Modal Sosial dalam Pendidikan**

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, masalah anarkisme yang dilakukan oleh pelajar dan juga mahasiswa kini telah menjadi masalah kolektif. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya tawuran antar pelajar tersebut antara lain faktor internal, atau faktor psikologis. Faktor psikologis tersebut antara lain karena terjadinya masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa, ataupun adanya perasaan ingin diakui, dan lain-lain. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa pengaruh buruk dari lingkungan atau teman, dan juga adanya kebencian yang diwariskan secara turun temurun oleh senior pada juniornya.

Namun, masalah tersebut tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab individu-individu yang terlibat dalam tawuran tersebut, tapi juga menjadi tanggung jawab orang tua, para pengajar, polisi, juga pemerintah. Lalu bagaimana modal sosial ini dapat mengatasi masalah ini, utamanya dalam hal ini adalah modal sosial pendidikan.

Modal sosial pendidikan muncul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam komunitas pendidikan, misalnya antara guru dan murid. Adanya interaksi, yaitu berupa komunikasi dan kerja sama pada dasarnya dipengaruhi oleh keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial yang didapat dari sekolah antara lain (Setyawan, 2012):

- 1) Hubungan sosial, yaitu komunikasi antar individu dalam hidup berdampingan sehingga terciptalah kepedulian antar sesama manusia.

### *Membangun Pendidikan Efektif*

- 2) Toleransi, yaitu kemampuan untuk menghargai orang lain, baik pendapat, atau dalam hal perbuatan.
- 3) Mau mendengar, yaitu kemampuan untuk mau mendengarkan pendapat orang lain sangat penting untuk diterima murid sehingga ia tidak hanya mementingkan pemikirannya sendiri tapi juga mau menerima pemikiran orang lain. Kemauan untuk mendengar ini erat kaitannya dengan budaya demokrasi. Di sekolah misalnya kemampuan untuk mau mendengar ini bisa didapat dari diskusi-diskusi kelas, di mana murid-murid yang terlibat saling mengemukakan pendapatnya.
- 4) Kearifan dan pengetahuan lokal, yaitu pengetahuan yang berkembang di masyarakat sebagai pendukung nilai-nilai dan norma yang telah ada.
- 5) Kepemilikan bersama dan kesetiaan, yaitu perasaan ikut memiliki dan menjadi bagian dari kelompok.
- 6) Tanggung jawab sosial, yaitu adanya rasa empati terhadap lingkungan. Adanya tanggung jawab sosial ini diharapkan siswa bisa berpikir rasional tentang apa saja konsekuensi dari perbuatannya terhadap diri sendiri, masyarakat, juga lingkungannya.

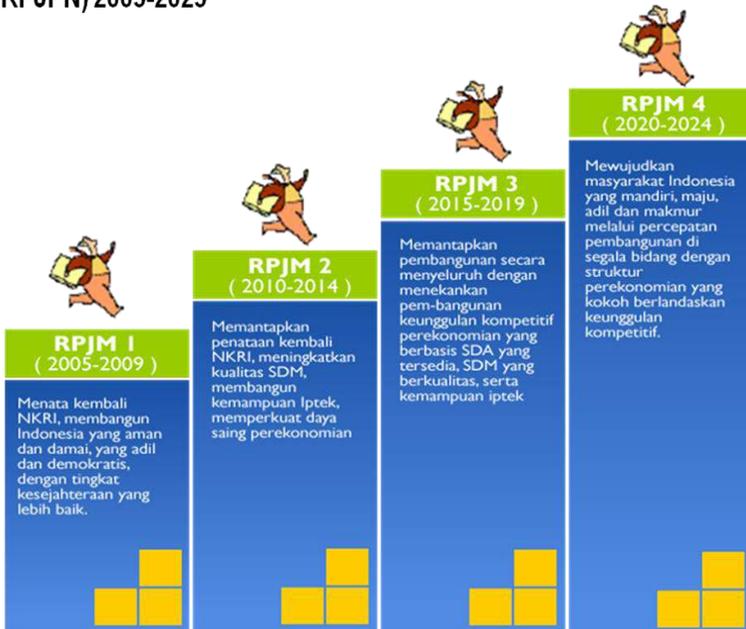
Dalam hubungannya dengan good goverance yaitu berupa peran pemerintah dalam mengatasi anarkisme pelajar. Peran tersebut antara lain dengan cara memberi sanksi kepada sekolah-sekolah yang terlibat tawuran, yaitu dengan cara menurunkan status sekolah, misalnya sekolah dengan status RSBI diturunkan menjadi sekolah biasa. Selain itu sanksi juga dapat diberikan untuk manajemen sekolah seperti Kepala Sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua.

Begitu juga dengan sanksi untuk para pelaku tawuran. Walaupun mereka masih di bawah umur mereka tetap layak mendapatkan sanksi karena tindakan mereka merupakan suatu

## Kajian Teori

bentuk kriminalitas. Kepolisian juga seharusnya berupaya untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti itu juga secepatnya dapat menghentikan perkelahian yang terjadi, karena selama ini terdapat kesan bahwa adanya pembiaran dari pihak kepolisian. Selain itu bisa juga dilakukan razia-razia senjata tajam secara berkala untuk mencegah terjadinya tawuran tersebut.

### Tahapan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025



## *Membangun Pendidikan Efektif*

# BAB III

## METODE KAJIAN

### 1. Jenis dan Pendekatan Kajian

Kajian ini menggunakan jenis *library research* dengan pendekatan kualitatif yang memahami berbagai gejala sebagai suatu hal yang saling terkait dalam hubungan fungsional dan merupakan satu kesatuan. Di samping itu, *pendekatan fenomenologis* digunakan untuk mempertegas arti peristiwa (fakta empiris) dan kaitannya dalam konteks situasi tertentu.

Untuk memperoleh data yang akurat, maka kajian ini menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis (Sukardi, 2009:33).

Menurut Masyhuri dan Zaenudin M mengatakan studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan diperpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan (Masyhuri dan Zainudin M, 2009: 50).

Dalam bukunya Hasan Iqbal disebutkan bahwa studi kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan

menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu (Hasan Iqbal, 2004: 5).

Menurut M. Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (M. Nasir, 2003: 111).

Setidaknya ada empat ciri utama studi kepustakaan yang perlu diperhatikan oleh calon peneliti dan keempat ciri itu akan mempengaruhi sifat dan cara kerja penelitian (Mestika Zed, 2008: 4-5), yaitu:

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan bukan angka dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eye witness*) berupa kejadian, orang atau benda lainnya. teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Kritik teks merupakan metode yang biasa dikembangkan dalam studi fisiologi, dll. Jadi perpustakaan adalah laborat peneliti kepustakaan dan karena itu teknik membaca teks (buku, artikel, dan dokumen) menjadi bagian yang fundamental dalam penelitian kepustakaan.
2. Data pustaka bersifat siap pakai (*ready mode*): peneliti tidak kemana-mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Ibarat orang belajar naik sepeda, orang tidak perlu membaca artikel atau buku tentang bagaimana teori naik sepeda, begitu pula halnya dengan riset pustaka. Untuk melakukan riset pustaka, orang tidak perlu menguasai ilmu perpustakaan. Satu-satunya untuk belajar menggunakannya perpustakaan dengan tepat ialah langsung menggunakannya. Meskipun

## Metode Kajian

demikian, calon peneliti yang ingin memanfaatkan jasa perpustakaan, tentu masih perlu mengenal seluk beluk studi perpustakaan untuk kepentingan penelitian atau pembuatan makalah.

3. Data perpustakaan umumnya sumber sekunder, artinya bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama dilapangan.
4. Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan info statis: tetap artinya kapanpun ia datang dan pergi data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data "mati" yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman tape, atau film).

Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian studi kepustakaan (Mestika Zed, 2008: 16-23), yaitu:

1. Mendaftar semua variabel yang perlu diteliti.
2. Mencari setiap variabel pada "*subject encyclopedia*".
3. Memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang tersedia.
4. Memeriksa indeks yang memuat variabel-variabel dan topik masalah yang diteliti.
5. Selanjutnya yang menjadi lebih khusus adalah mencari artikel-artikel, buku-buku, dan biografi yang sangat membantu untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang diteliti.
6. Setelah informasi yang relevan ditemukan, peneliti kemudian '*mereview*' dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urutan kepentingan dan relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.

7. Bahan-bahan informasi yang diperoleh kemudian dibaca, dicatat, diatur, dan ditulis kembali. Untuk keperluan ini biasanya peneliti dapat menggunakan dua macam kartu, yaitu kartu bibliografi (*bibliografi card*) dan kartu catatan (*content card*). Agar dapat dibedakan, kedua kartu tersebut dapat berbeda warnanya. Kartu bibliografi dibuat untuk mencatat keterangan tentang judul buku, majalah, surat kabar, dan jurnal. Catatan pada kartu bibliografi berisikan nama pengarang, judul buku, penerbit, dan tahun terbitnya. Sedangkan pada kartu catatan atau content card, peneliti dapat menulis kutipan (*quotation*) dari tulisan tertentu, saduran, ringkasan, tanggapan atau komentar peneliti terhadap apa yang telah dibaca.

Dalam langkah terakhir, peneliti menyusun dan menuliskan kembali informasi-informasi tersebut dalam bentuk essay. Tulisan ini nantinya akan dimasukkan dilaporan penelitian.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dokumenter yaitu laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa itu, serta ditulis dengan sengaja untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan menjadi peristiwa tersebut. Dokumentasi ini dilakukan untuk membantu kevalidan data yang diperoleh dengan *interview* tersebut (Winarno Surahmad, 1986: 125).

Studi dokumen adalah tehnik mencari data dari sumber data dokumen berupa catatan transkrip, buku, prasasti, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain. Perbedaan dokumen dengan studi dokumen adalah bahwa dokumen merupakan bahan yang dicari, karena didalamnya terdapat bahan-bahan yang sangat diperlukan oleh peneliti. Sedangkan studi dokumen adalah tehnik atau cara-cara yang dapat dilakukan oleh peneliti

## Metode Kajian

dalam mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan penting dengan tema penelitiannya. Dokumen itu umumnya benda-benda mati, sehingga peneliti dalam berlaku dan bersikap, tidak banyak menemui berbagai kesulitan bahkan sewaktu-waktu perbuatan itu dapat ditinjau ulang.

Dokumen sebagaimana tersebut di atas mencakup dokumen dan *record* Guba dan Lincoln (1981; 232-235) membedakan kedua hal tersebut. *Record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Sedangkan dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik lebih lanjut Guba dan Lincoln menyatakan bahwa dokumen dari *record* dapat digunakan sebagai sumber data penelitian, karena berbagai alasan, yaitu: (1) dokumen atau *record* merupakan sumber stabil, (2) berguna sebagai bukti untuk pengujian, (3) keduanya sesuai dengan penelitian kualitatif, karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks lahir dan berada dalam konteks, (4) *record* relatif lebih murah dan tidak sukar diperoleh, sedangkan dokumen harus dicari dan ditemukan, (5) keduanya tidak relatif sehingga sukar ditemukan dengan teknik kajian ini, (6) hasil kajian ini akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap suatu yang diselidiki.

Berkenaan dengan dokumen dan record ini yang perlu dicari dan dikaji adalah: Model Pendidikan Efektif menuju Masyarakat Jepara yang Berbudaya Unggul, Cerdas, Kreatif dan Inovatif, dan lain-lain.

### 3. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data adalah pengecekan tentang terpenuhi atau tidaknya standar kriteria validitas dan reliabilitas suatu data. Menurut Lincoln dan Guba (1985), bahwa untuk

memperoleh data yang *valid* dapat ditempuh teknik pengecekan data melalui: (1) observasi yang dilakukan secara terus-menerus (*persistent observation*), (2) triangulasi (*triangulation*) sumber data, metode dan peneliti lain; (3) pengecekan anggota (*member check*), diskusi teman sejawat (*peer reviewing*); dan (4) pengecekan mengenai kecukupan referensi (*referencia adequacy check*).

Menurut Moleong (2007: 173), keabsahan suatu data apabila telah terpenuhi empat kriteria: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Secara rinci, masing-masing kriteria itu adalah sebagai berikut:

b. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Penerapan konsep kriteria derajat kepercayaan dimaksudkan sebagai pengganti konsep validitas internal dari penelitian non kualitatif. Kriteria ini berfungsi: a) melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dipercaya. b) Mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti.

Menurut S. Nasution (2008: 114), ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan derajat kepercayaan hasil penelitian itu. a) Memperpanjang masa observasi, maksudnya adalah untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan antara lain peneliti dapat mempelajari kebenaran dan dapat mempelajari ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. b) Pengamatan yang terus menerus, dengan maksud agar peneliti dapat melakukan pengamatan secara cermat dan mendalam terhadap subyek yang diamati, selanjutnya akan didapatkan bahan penelitian yang otentik dari pelaku utamanya. c) Triangulasi, adalah pengecekan keabsahan data dengan membandingkan satu data dengan data lain yang diperoleh dari sumber lain (informan) pada berbagai fase penelitian

## Metode Kajian

lapangan dengan waktu dan tempat berbeda dan sering juga menggunakan metode yang berbeda.

### a. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan penelitian tersebut peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang lama dan terjadi di Kabupaten Jepara. Keteralihan hasil kajian biasanya berkenaan dengan hasil pertanyaan sampai sejauh manakah hasil penelitian ini dapat digunakan dalam situasi-situasi lain. Dalam penelitian ini peneliti berusaha memberikan deskripsi yang rinci tentang bagaimana penelitian ini, melaksanakan dan mendapatkan kesimpulan tertentu. Dengan demikian penelitian ini akan mendapatkan sesuatu yang sekiranya ada, dilaksanakan di obyek kajian lain dan hal ini merupakan salah satu manfaat praktis dari kajian ini.

### c. Ketergantungan (*dependability*)

Ketergantungan menurut istilah konvensional disebut reliabilitas. Sedangkan reliabilitas ini merupakan syarat validitas dalam suatu kajian. Ketergantungan dilakukan untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan dan konseptualisasi rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian. Untuk itu diperlukan *dependent auditor* atau para ahli dibidang pokok persoalan kajian ini. Pemeriksaan dependabilitas ini dilakukan oleh para pemangku pendidikan di Kabupaten Jepara. Peran para Stakeholder/pemangku pendidikan sebagai *dependent auditor* sangat penting dalam penelitian ini. Dengan melakukan review atas proses penelitian yang dimaksudkan, temuan penelitian dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan hasilnya secara ilmiah melalui keabsahan akademik selama proses penelitian di lapangan.

Alat utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, oleh karena itu untuk menjamin ketergantungan dengan kepastian penelitian yaitu dengan cara memeriksa dan melacak suatu data sehingga diperoleh kebenaran yang faktual.

d. Kepastian/dapat dikonfirmasi (*confirmability*)

Kepastian diperlukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh obyektif atau tidak. Hal ini tergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan temuan seseorang. Jika telah disepakati oleh beberapa atau banyak orang dapat dikatakan obyektif, namun penekanannya tetap pada bertanya. Untuk menentukan kepastian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkonfirmasi data dengan para informan.

Kepastian mengenai tingkat obyektifitas hasil penelitian sangat tergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pendapat atau temuan kajian.

Dalam kajian ini pengujian kredibilitas data kajian dilakukan dengan cara:

(a) Perpanjangan pengamatan

Maksudnya adalah memperpanjang kajian sampai tiga kali, karena pada periode I dan II, data yang diperoleh dirasa belum memadai dan belum kredibel. Belum memadai karena belum semua rumusan masalah dan fokus terjawab melalui data, belum kredibel karena sumber data masih ragu-ragu dalam memberikan data, sehingga data yang diperoleh pada tahap I dan II ternyata masih belum konsisten, masih berubah-ubah. Dengan perpanjangan pengamatan sampai dua kali, maka data yang diperoleh dirasa telah jenuh.

(b) Meningkatkan ketekunan

Maksudnya adalah melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara ini, maka kepastian

## Metode Kajian

data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

Pengujian kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan ini dilakukan dengan cara meneliti membaca seluruh catatan hasil penelitian secara cermat, sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini, maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.

### (c) Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik, sumber data dan waktu. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda, dalam hal ini sumber datanya adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber. Triangulasi waktu artinya pengumpulan data dilakukan pada berbagai kesempatan.

Dengan triangulasi dalam pengumpulan data tersebut, maka dapat diketahui apakah nara sumber memberi data yang sama atau tidak. Kalau nara sumber memberi data yang berbeda, maka berarti datanya belum kredibel.

### (d) Diskusi teman sejawat

Diskusi teman sejawat dilakukan dengan mendiskusikan hasil kajian yang masih bersifat sementara pada teman-teman dan

kolega Dewan Riset Daerah Kabupaten Jepara. Melalui diskusi ini banyak pertanyaan dan saran. Pertanyaan yang berkenaan dengan data yang belum bisa terjawab, maka peneliti kembali ke lapangan untuk mencarinya. Dengan demikian data menjadi semakin lengkap.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti dan dilaporkan secara sistematis (Bogdan and Biklen, 1982).

Data tersebut terdiri dari deskripsi-deskripsi yang rinci mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi, dan perilaku. Dengan kata lain, data merupakan deskripsi dari pernyataan-pernyataan seseorang tentang perspektif, pengalaman, atau sesuatu hal, sikap, keyakinan, dan pikirannya serta petikan-petikan isi dokumen yang berkaitan dengan suatu program (Patton, 1980).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dan Spradley.

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Tiga alur kegiatan tersebut dapat terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data (menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisir

## Metode Kajian

data), penyajian data (menemukan pola-pola hubungan yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan) dan penarikan kesimpulan/verifikasi (membuat pola makna tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi).

Mengingat penelitian ini menggunakan rancangan studi multi kasus, maka dalam menganalisis data dilakukandua tahap, yaitu: (1) analisis data kasus individu (*individual case*), dan (2) analisis data lintas kasus (*cross case analisys*), (Yin, 1987).

### (a) Analisis Data Kasus Individu

Analisis data lintas kasus dilakukan pada masing-masing obyek yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maupun Kementerian Agama di Kabupaten Jepara. Dalam menganalisis peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang berupa kata-kata, sehingga diperoleh makna (*meaning*). Karena itu analisis dilakukan bersama-sama. dengan proses pengumpulan data, serta setelah data terkumpul.

Menurut Miles dan Hubermen (1992) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data. penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Secara skematis data dilihat pada gambar berikut ini;



Keterangan : Komponen-komponen Analisis Data : Model Alir Diadopsi dari Miler & Huberman, 1984: 18

(1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diversikan. Reduksi data diartikan juga sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sudah mengantisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak sewaktu memutuskan kerangka konseptual, wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan penentuan metode pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung sudah terjadi tahapan reduksi, selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo). Proses ini berlanjut sampai pasca pengumpulan data di lapangan, bahkan pada akhir pembuatan laporan sehingga tersusun lengkap.

Langkah selanjutnya mengembangkan sistem pengkodean. Semua data yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (*transkrip*) dibuat ringkasan konak berdasarkan fokus penelitian. Setiap topik liputan dibuat kode yang menggambarkan topik tersebut. Kode-kode tersebut dipakai untuk mengorganisasi satuan-satuan data, yaitu potongan-potongan kalimat yang diambil dari transkrip sesuai dengan urutan paragraf menggunakan komputer.

(2) Penyajian Data

Sebagaimana ditegaskan oleh Miles dan Huberman (1984) bahwa penyajian data, dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan

## Metode Kajian

suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dan bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun efektif.

Data yang diperoleh dari penelitian berwujud kata-kata, kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif pada masa lalu adalah bentuk teks naratif. Namun oleh Miles dan Huberman (1992) cara penyajian data dalam bentuk teks naratif dikritik sangat tidak praktis, karena itu Miles dan Huberman menyarankan agar data disajikan dalam matrik, grafik, jaringan dan bagan. Merancang deretan kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan ke dalam kotak-kotak matriks merupakan kegiatan analisis.

### (3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan analisis pada tahap ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Analisis yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat menemukan pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Sejak pengumpulan data peneliti berusaha mencari makna atau arti dari simbol-simbol, mencatat keteraturan pola, penjelasan-penjelasan, dan alur sebab akibat yang terjadi. Dari kegiatan ini dibuat simpulan-simpulan yang sifatnya masih terbuka, umum, kemudian menuju ke yang spesifik/rinci. Kesimpulan final diharapkan data diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

### (b) Analisis Data Lintas Kasus

Analisis lintas kasus dimaksudkan sebagai proses membandingkan temuan-temuan yang diperoleh dari masing-masing kasus, sekaligus sebagai proses memadukan antar kasus. Pada awalnya temuan yang diperoleh dari berbagai sumber, disusun kategori dan tema, dianalisis secara induktif konseptual, dan

dibuat penjelasan naratif yang tersusun menjadi proposisi tertentu yang selanjutnya dikembangkan menjadi teori substantif.

Proposisi-proposisi dan teori substantif I selanjutnya dianalisis dengan cara membandingkan dengan proposisi-proposisi dan teori substantif II untuk menemukan perbedaan karakteristik dari masing-masing kasus sebagai konsepsi teoritik berdasarkan perbedaan. Pada tahap akhir dilakukan analisis secara simultan untuk merekonstruksi dan menyusun konsepsi tentang persamaan kasus I dan II secara sistematis. Selanjutnya dilakukan analisis lintas kasus antara kasus I dan kasus II dengan teknik yang sama. Analisis akhir ini dimaksudkan untuk menyusun konsep yang sistematis berdasarkan hasil analisis data dan interpretasi teoritik yang bersifat naratif berupa proposisi-proposisi lintas kasus yang selanjutnya dijadikan bahan untuk mengembangkan temuan teori substantif.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis lintas kasus ini meliputi; (1) menggunakan pendekatan induktif konseptualistik yang dilakukan dengan membandingkan dan memadukan temuan konseptual dari masing-masing kasus individu, (2) hasilnya dijadikan dasar untuk menyusun pernyataan konseptual atau proposisi-proposisi lintas kasus, (3) mengevaluasi kesesuaian proposisi dengan fakta yang menjadi acuan, (4) merekonstruksi ulang proposisi-proposisi sesuai dengan fakta dari masing-masing kasus individu, dan (5) mengulangi proses ini sesuai keperluan, sampai batas kejenuhan.

(c) Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, salah satu karakteristiknya adalah desainnya disusun secara sirkuler (Nasution, 1988), Oleh karena itu dalam penelitian ini dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu: (1) studi persiapan/orientasi, (2) studi eksplorasi umum, dan (3) studi eksplorasi terfokus. Atau menurut Moleong (2000)

## Metode Kajian

ada tiga tahap dalam penelitian ini, yaitu: (1) tahap pra lapangan, (2) tahap kegiatan lapangan, dan (3) penelitian sesungguhnya.

### (1) Tahap pra lapangan.

Tahap pra lapangan atau studi persiapan atau studi orientasi dilaksanakan dengan menyusun praproposal dan proposal penelitian tentatif dan menggalang sumber pendukung yang diperlukan. Penentuan objek dan fokus penelitian ini berdasarkan atas: (1) isu-isu umum yaitu pendidikan efektif; (2) mengkaji literatur-literatur yang relevan; (3) orientasi ke beberapa lembaga yang berkualitas dan menetapkan objek penelitian, dan (4) diskusi dengan teman sejawat dan para ahli dibidang pendidikan efektif dan budaya.

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu dilakukan *grand tour observation*. Tujuannya adalah untuk penjajagan lokasi penelitian. Untuk dapat masuk ke lokasi kajian ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh calon peneliti. Satu diantaranya adalah silaturrohmi atau memanfaatkan fasilitas umum yang ada dilingkungan lembaga yang hendak diteliti. Fasilitas yang dimaksud antara lain adalah perpustakaan, laboratorium, bahan-bahan di CD, buku-buku pedoman akademik, lingkungan madrasah dan sebagainya. Ketika seorang calon peneliti memanfaatkan fasilitas tersebut, akan terjadi interaksi dengan pegawai atau pimpinan di bagian tersebut. Pada saat itu dapat dilakukan komunikasi yang baik antara calon peneliti dengan pimpinan bagian tersebut. Melalui komunikasi itu seorang peneliti dapat menyampaikan maksud dan tujuannya.

Apabila fokus penelitian sudah didapatkan, kira-kira data pendukungpun tersedia, seorang peneliti kualitatif melanjutkan pengurusan administrasi kajian.

### (2) Tahap pengembangan desain

## *Membangun Pendidikan Efektif*

Berdasarkan kegiatan *grand tour observation*, studi pendahuluan di latar penelitian, saran-saran, serta masukan yang diperoleh dari rekan seprofesi atau masukan dari kegiatan seminar atau lainnya, kajian dapat dikembangkan sebagaimana layaknya sebuah proposal penelitian. Suatu hal yang menjadi pertimbangan adalah bahwa proposal kualitatif dapat saja disusun secara berulang. Maksudnya seorang peneliti harus bolak-balik ke tempat / lembaga yang akan diteliti sampai proposalnya layak untuk diteliti berdasarkan konteks penelitian yang akan dilakukan.

Pada tahap ini yang dilaksanakan adalah; (1) konsultasi, wawancara dan perizinan pada instansi yang berwenang; (2) peninjauan umum pada beberapa objek yang ditunjukkan untuk melakukan observasi dan wawancara secara global, guna menentukan pemilihan objek lebih lanjut; (3) studi literatur dan menentukan kembali fokus penelitian; (4) diskusi dengan teman sejawat untuk memperoleh masukan, dan (5) konsultasi secara kontinu dengan kolega untuk memperoleh legitimasi guna melanjutkan kajian.

### (3) Tahap penelitian sesungguhnya

Tahap ini dilakukan setelah proposal dinilai telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Lama penelitian tidak dapat ditetapkan sejak awal, semua tergantung pada kegesitan, keuletan dan ketekunan seorang peneliti dalam mengumpulkan data. Ada kalanya empat bulan pertama data sudah terkumpul, kadangkala belum. Pada saat pengumpulan data dilakukan, seorang peneliti kualitatif sudah melakukan analisis, atau sekurang-kurangnya membuat ancar-ancar analisis dan koding data.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat dilakukan 24 Jam, dalam arti peneliti tidak hanya melakukan penelitian pada kegiatan-kegiatan belajar saja, tetapi juga di luar jam-jam pembelajaran.

## Metode Kajian

Tahap studi eksplorasi terfokus ini diikuti dengan pengecekan hasil temuan penelitian dan penulisan laporan hasil kajian. Tahap eksplorasi terfokus ini mencakup tahap-tahap: (1) pengumpulan data yang dilakukan secara rinci dan mendalam guna menemukan kerangka konseptual tema-tema lapangan; (2) pengumpulan dan analisis data secara bersama-sama; (3) pengecekan hasil dan temuan kajian oleh beberapa narasumber dibidangnya; dan (4) penulisan laporan hasil kajian untuk dipublikasikan secara umum.

## *Membangun Pendidikan Efektif*

# BAB IV

## PENDIDIKAN DI JEPARA

### 1. Gambaran Umum Wilayah Jepara

#### 1) Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Jepara terletak antara  $5^{\circ}43'20,67''$  sampai  $6^{\circ}47'25,83''$  Lintang Selatan dan  $110^{\circ}9'48,02''$  sampai  $110^{\circ}58'37,40''$  Bujur Timur. Kabupaten Jepara memiliki wilayah seluas  $1.004,13 \text{ km}^2$  yang terdiri dari tanah sawah seluas  $265,82 \text{ km}^2$  atau sebesar 26 persen dan tanah kering seluas  $738,32 \text{ km}^2$  atau sebesar 74 persen. Wilayah tersempit adalah Kecamatan Kalinyamatan (2.371,001 ha) sedangkan wilayah terluas adalah Kecamatan Keling (12.311,588 ha).

Adapun Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Demak
- Sebelah Barat : Laut Jawa

Sebagian besar topografi tanah di Kabupaten Jepara bervariasi mulai dari dataran tinggi di sekitar Gunung Muria dan Clering sampai dataran rendah dan memiliki garis pantai sepanjang  $82,73 \text{ Km}$  yang memanjang dari sebelah selatan ke utara termasuk

Kepulauan Karimunjawa. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Jepara mempunyai sumber daya alam yang cukup melimpah. Kabupaten Jepara memiliki 2 desa yang berada di daerah lembah/daerah aliran sungai, 22 desa berada di lereng punggung bukit, 137 desa di daerah dataran dan 34 desa di daerah pantai. Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Jepara sebanyak 195 desa/kelurahan, terdiri dari : 184 desa dan 11 kelurahan.

## **2) Kondisi Kependudukan**

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara akhir tahun 2016 berdasarkan Buku Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas sebanyak 1.205.800 jiwa. Dari data terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah perempuan di Kabupaten Jepara, yaitu laki-laki sebanyak 601.206 jiwa dan perempuan sebanyak 604.594 jiwa, secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Jepara dari tahun 2012-2016 bisa dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 3.1.  
Kependudukan Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016*

No	Variabel	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk	1.144.916	1.153.213	1.170.797	1.188.289	1.205.800
2	Laki-laki	570.684	575.043	583.800	592.482	601.206
3	Perempuan	574.232	578.170	586.997	595.807	604.594

*Sumber : BPS, buku Statistik Sosial dan Kependudukan Jawa Tengah hasil susenas, 2016*

Persebaran penduduk di Kabupaten Jepara menurut kecamatan tahun 2016 distribusinya tidak merata, di mana sebaran penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tahunan (115.504 jiwa atau 9,58%) dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di

## Pendidikan di Jepara

Kecamatan Karimunjawa (9.379 jiwa atau 0,78%). Berdasarkan data tahun 2016, penduduk terpadat berada di Kecamatan Jepara (3.560 jiwa/km<sup>2</sup>), sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Karimunjawa (130 jiwa/km<sup>2</sup>), secara rinci jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Jepara tahun 2016 menurut kecamatan bisa dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 3.2.*

*Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2016 Menurut Kecamatan Kabupaten Jepara*

No	Kecamatan	Jumlah	Kepadatan Penduduk
1	Kedung	77.813	1.781
2	Pecangaan	85.082	2.337
3	Kalinyamatan	64.722	2.691
4	Welahan	74.843	2.668
5	Mayong	90.402	1.370
6	Nalumsari	74.155	1.283
7	Batealit	86.083	954
8	Tahunan	115.504	2.926
9	Jepara	89.116	3.560
10	Mlonggo	86.529	2.011
11	Pakis Aji	60.903	991
12	Bangsri	102.495	1.183
13	Kembang	70.122	639
14	Keling	62.448	500
15	Donorojo	56.204	510
16	Karimunjawa	9.379	130
	Total	1.205.800	1.183

*Sumber: BPS, buku Kab. Jepara dalam angka 2017*

### *Membangun Pendidikan Efektif*

Penduduk Kabupaten Jepara berdasarkan kelompok umur, sebagian besar termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 818.838 jiwa (67,91%) dan selebihnya berusia di bawah 15 tahun sebanyak 308.023 jiwa (25,55%) dan berusia 65 tahun ke atas sebanyak 78.939 jiwa (6,54%). Dengan demikian angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Jepara sebesar 47,51%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Secara rinci jumlah penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Jepara tahun 2016 bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

*Tabel 3.3.  
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur  
Kabupaten Jepara Tahun 2016*

Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	53.917	51.627	105.544
5-9	53.498	50.517	104.015
10-14	50.395	48.069	98.464
15-19	52.842	51.671	104.513
20-24	54.627	52.204	106.831
25-29	48.043	47.413	95.456
30-34	45.788	46.600	92.388
35-39	44.959	46.450	91.409
40-44	41.417	41.543	82.960
45-49	37.418	39.055	76.473
50-54	33.522	34.106	67.628
55-59	27.725	27.975	55.700
60-64	22.472	23.008	45.480
65-69	14.476	16.534	31.010
70-74	9.729	12.220	21.949

## Pendidikan di Jepara

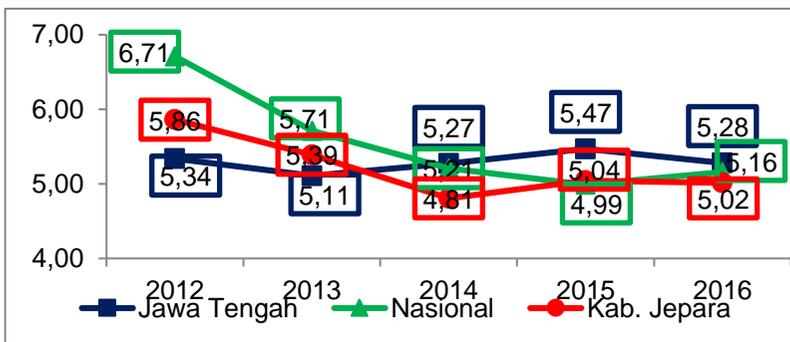
Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
75+	10.378	15.602	25.980
Jumlah	601.206	604.594	1.205.800

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Kabupaten Jepara, 2016

### 3) Kondisi Perekonomian

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2012 hingga 2016 terjadi fluktuasi, yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2014 pernah mengalami penurunan menjadi 5,39% dan 4,81%, kemudian pada tahun 2015 kembali naik menjadi 5,04%, namun pada tahun 2016 turun menjadi 5,02%. Kondisi fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara dari tahun 2012 hingga tahun 2016 juga dialami capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan kembali turun pada tahun 2016, sedangkan Nasional terus mengalami kenaikan pada tahun 2016, secara rinci bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

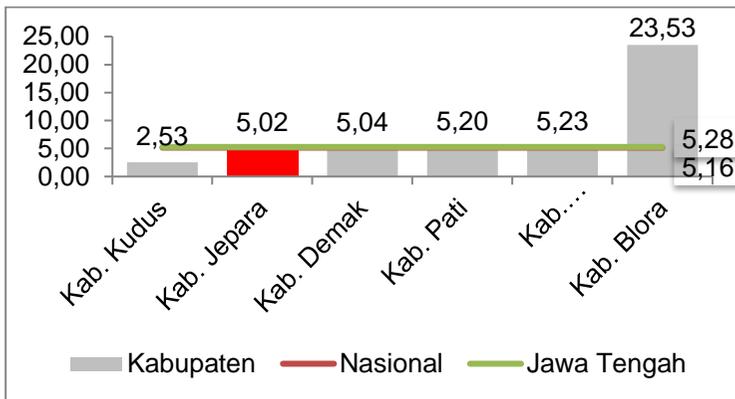


Sumber : BPS Jawa Tengah, 2017

Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016 (%)

## Membangun Pendidikan Efektif

Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara tahun 2016 sebesar 5,02% berada di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,44% dan di atas Nasional sebesar 4,79%. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten sekitar di Jawa Tengah pada tahun 2015, Kabupaten Jepara sebesar 5,02% merupakan terendah kedua setelah Kabupaten Kudus sebesar 4,08%, seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2017

Gambar 3.2 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2016 (%)

Struktur perekonomian Kabupaten Jepara dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha selama kurun waktu lima tahun, didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Secara rinci Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha Kabupaten Jepara tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4.

## Pendidikan di Jepara

### *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jepara Tahun 2016*

No	Lapangan Usaha	Nilai (Juta rupiah)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.535.360	14,79
B	Pertambangan dan Penggalian	458.184	1,92
C	Industri Pengolahan	8.235.434	34,45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21.846	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.598	0,06
F	Konstruksi	1.597.389	6,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.993.310	16,71
H	Transportasi dan Pergudangan	874.384	3,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	977.769	4,09
J	Informasi dan Komunikasi	555.581	2,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	523.665	2,19
L	Real Estat	366.385	1,53
M,N	Jasa Perusahaan	115.569	0,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	593.189	2,48
P	Jasa Pendidikan	1.289.250	5,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	230.436	0,96
R,S, T,U	Jasa lainnya	521.268	2,18
	PDRB	23.903.617	100,00

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Jepara didominasi oleh tiga

### *Membangun Pendidikan Efektif*

sektor utama, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 3.5.*

*Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jepara Tahun 2016 (Juta rupiah)*

No	Lapangan Usaha	Nilai (Juta rupiah)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.479.799	13,73
B	Pertambangan dan Penggalian	313.741	1,74
C	Industri Pengolahan	6.019.958	33,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20.377	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.314	0,07
F	Konstruksi	1.178.919	6,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.226.680	17,86
H	Transportasi dan Pergudangan	784.577	4,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	761.340	4,21
J	Informasi dan Komunikasi	567.217	3,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	390.112	2,16
L	Real Estat	326.625	1,81
M,N	Jasa Perusahaan	91.447	0,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	426.884	2,36
P	Jasa Pendidikan	864.863	4,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	173.501	0,96

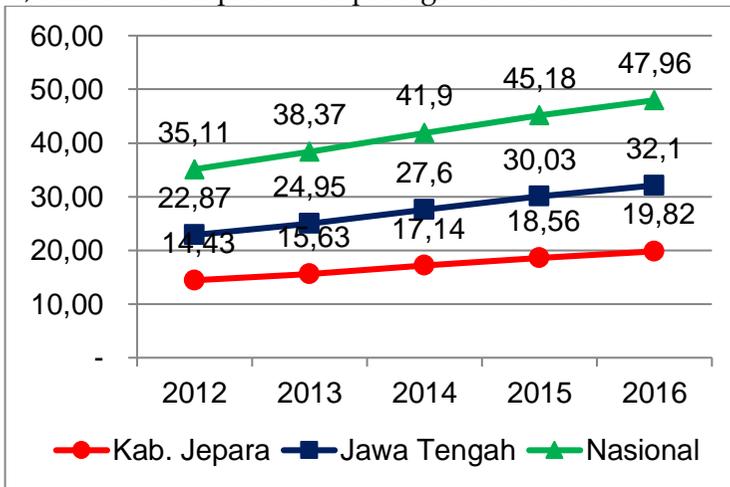
## Pendidikan di Jepara

No	Lapangan Usaha	Nilai (Juta rupiah)	%
R,S, T,U	Jasa lainnya	423.782	2,35
	PDRB	18.063.135	100,00

*Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Kabupaten Jepara, 2017*

### b. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per satu orang penduduk yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Jepara Atas Dasar Harga Berlaku dalam kurun waktu tahun 2012-2016 menunjukkan kinerja yang positif, yaitu terjadi peningkatan PDRB per kapita dari sebesar Rp.14,43 Juta pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp.19,82 Juta pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Jepara. Kondisi ini sejalan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2012-2016, secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



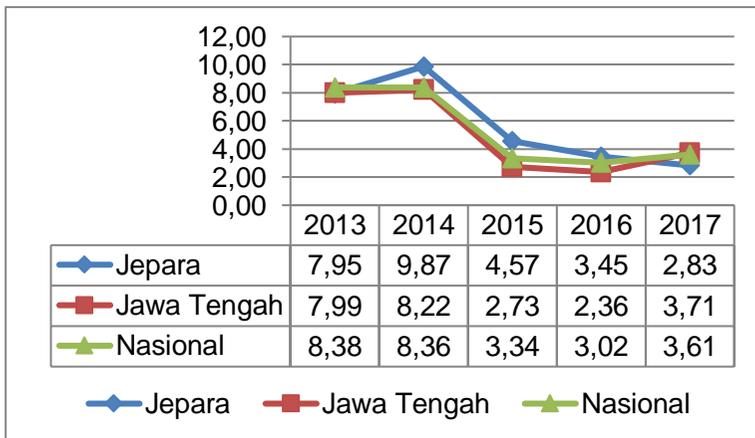
## Membangun Pendidikan Efektif

Sumber : BPS, Buku Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota 2011-2015  
buku 2 Pulau Jawa Bali, 2017

Gambar 3.3 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)

### c. Laju Inflasi

Inflasi Kabupaten Jepara dalam kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017 memiliki kecenderungan menurun, yaitu pada tahun 2013 sebesar 7,95% dan tahun 2017 menurun menjadi sebesar 2,83%. Kenaikan tertinggi inflasi di Kabupaten Jepara terjadi pada tahun 2014 mencapai angka sebesar 9,87%. Kondisi inflasi Kabupaten Jepara dari tahun 2014 hingga tahun 2016 selalu lebih tinggi dibandingkan inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, namun di tahun 2017 inflasi Kabupaten Jepara menunjukkan kondisi terbaik dengan berada di bawah Provinsi maupun Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

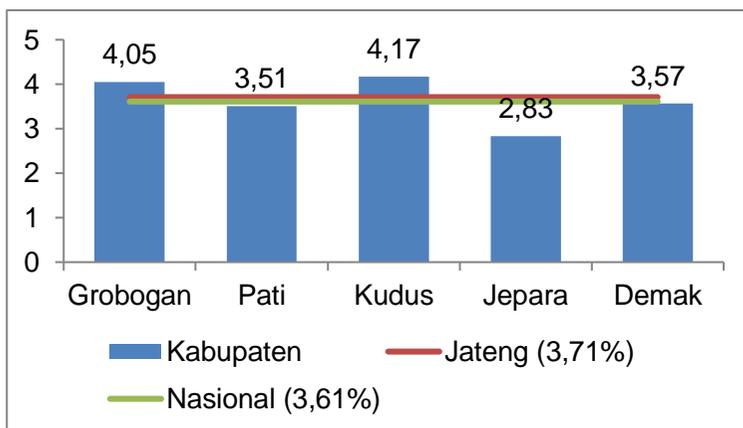


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 3.4 Perkembangan Inflasi Kabupaten Jepara Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 (%).

## Pendidikan di Jepara

Posisi relatif inflasi Kabupaten Jepara tahun 2017 sebesar 2,83% berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,71% dan Nasional sebesar 3,61%. Dibandingkan dengan capaian kabupaten lain disekitarnya, inflasi Kabupaten Jepara tahun 2017 merupakan paling rendah (lebih baik), secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



*Sumber: Tinjauan Regional berdasarkan PDRB Kab/Kota 2011-2016, Buku 2 Pulau Jawa Bali, BPS-2017.*

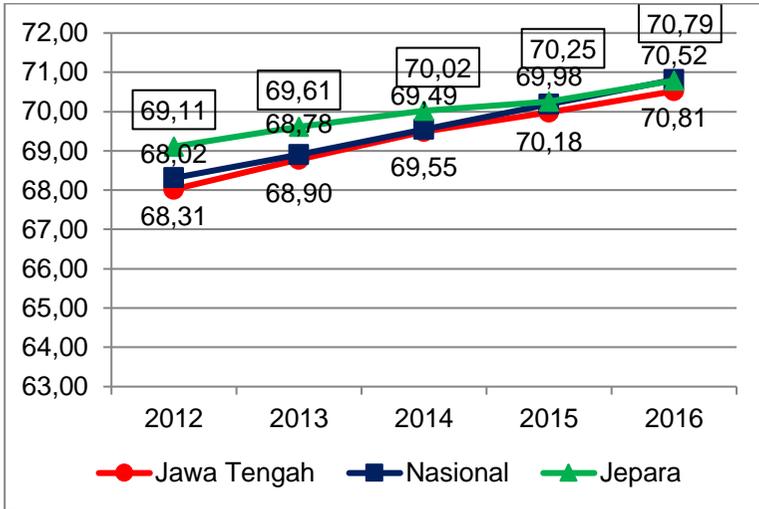
*Gambar 3.5 Posisi Relatif Inflasi Kabupaten Jepara Tahun 2016 (%)*

#### 4. Kondisi Pembangunan Manusia

Kondisi kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Jepara ditunjukkan dengan kondisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jepara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Pada tahun 2012 hingga tahun 2016 IPM Kabupaten Jepara mengalami peningkatan tiap tahunnya sejalan dengan IPM Provinsi Jawa

## Membangun Pendidikan Efektif

Tengah dan Nasional, yaitu IPM Kabupaten Jepara pada tahun 2012 sebesar 68,45 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 70,25. Kondisi IPM Kabupaten Jepara tahun 2016 menunjukkan kategori tinggi karena sudah berada di angka antara 70 hingga 80, secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

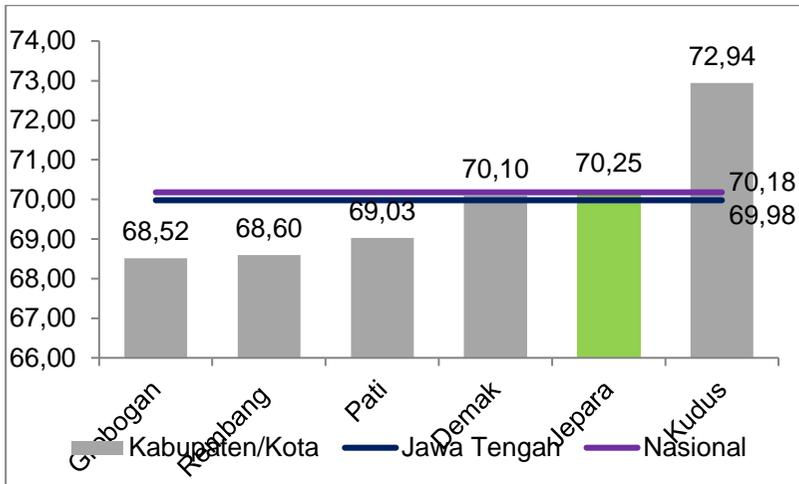


Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017

Gambar 3.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016

IPM Kabupaten Jepara tahun 2016 sebesar 70,52 berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,98 dan Nasional sebesar 70,18 dan peringkat kedua tertinggi dibandingkan kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah setelah Kudus sebesar 72,94, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

## Pendidikan di Jepara



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017

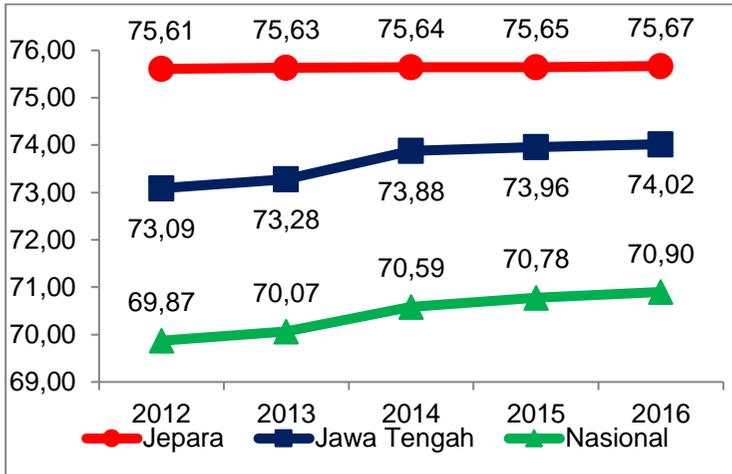
Gambar 3.7 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jepara Tahun 2016

IPM metodologi baru diukur menggunakan indikator pembentuk meliputi Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita. Sementara itu, uraian indikator pembentuk IPM Kabupaten Jepara sebagai berikut :

### a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kondisi Kabupaten Jepara, Angka Harapan Hidup pada tahun 2012 hingga tahun 2016 terus meningkat meskipun tidak signifikan kenaikannya, yaitu pada tahun 2012 sebesar 75,61 tahun dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 75,67 tahun atau hanya ada selisih kenaikan sebesar 0,06. Kondisi Angka Harapan Hidup Kabupaten Jepara selama kurun waktu lima tahun tersebut relevan terhadap capaian Angka

Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional periode tahun yang sama.

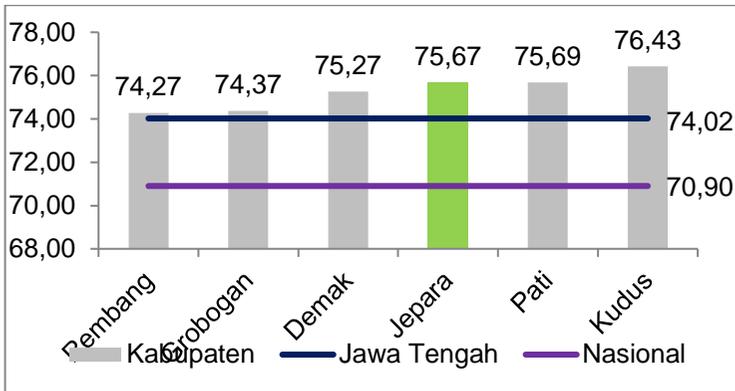


Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017

Gambar 3.8 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016 (Tahun)

Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Jepara tahun 2016 sebesar 75,67 tahun berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,02 tahun dan Nasional 70,90 tahun serta merupakan tertinggi ketiga dibandingkan Kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah, secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

## Pendidikan di Jepara



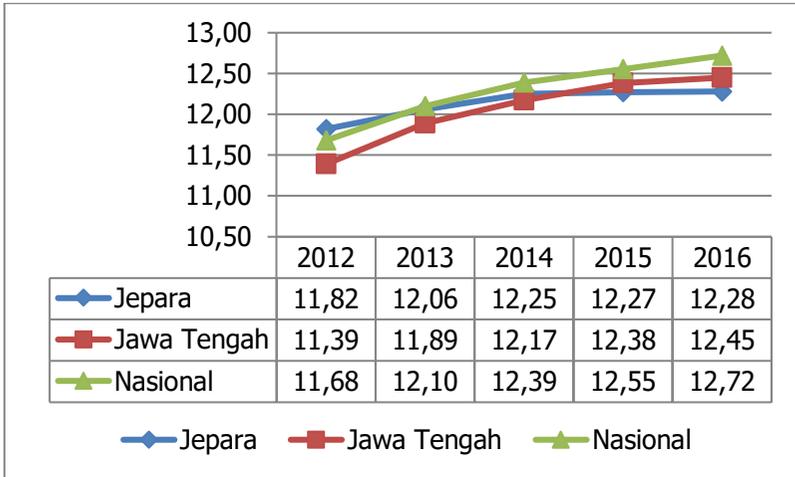
Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017

Gambar 3.9 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Jepara Tahun 2016 (Tahun)

### b. Harapan Lama Sekolah

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Jepara pada tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami kenaikan sama halnya dengan perkembangan HLS Provinsi Jawa Tengah, yaitu HLS Kabupaten Jepara pada tahun 2012 sebesar 11,82 tahun dan pada tahun 2016 menjadi sebesar 12,28 tahun. Sedangkan HLS Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 mencapai sebesar 12,45 tahun dan Nasional pada tahun yang sama mencapai sebesar 12,72 tahun, secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

## Membangun Pendidikan Efektif

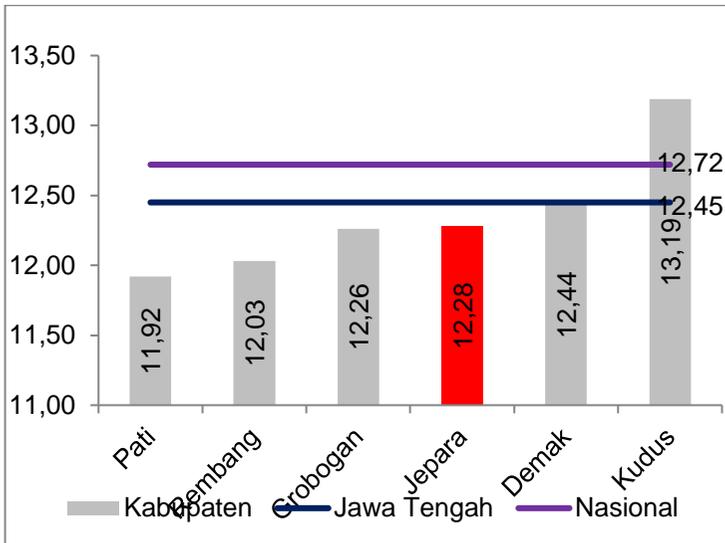


Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017

Gambar 3.10 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016 (Tahun)

Posisi relatif HLS Kabupaten Jepara pada tahun 2016 sebesar 12,28 tahun berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,45 tahun dan Nasional 12,72 tahun, namun masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Grobogan, secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

## Pendidikan di Jepara

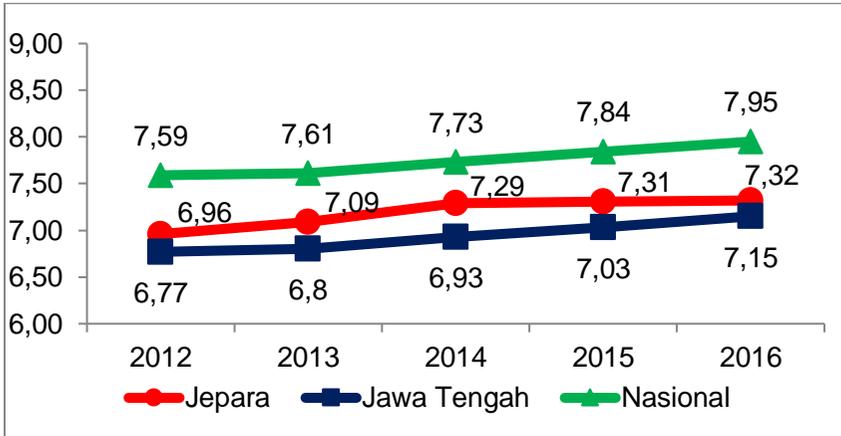


Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017  
Gambar 3.11 Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Jepara Tahun 2016 (Tahun)

### c. Rata-Rata Lama Sekolah

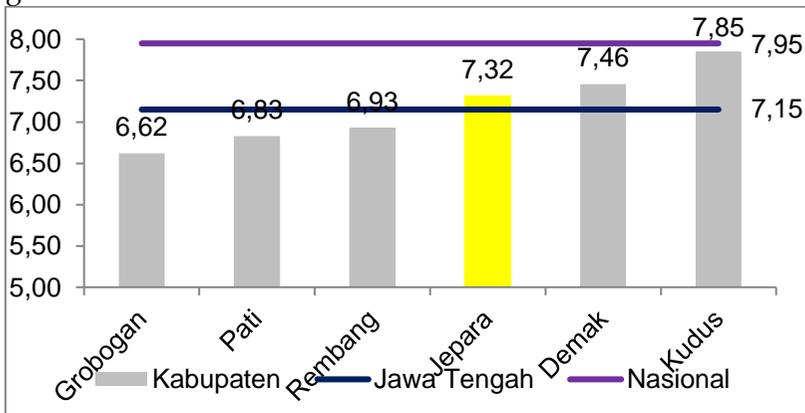
Rata-Rata Lama Sekolah atau disingkat RLS, merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi : a) Partisipasi sekolah, b) Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/ sedang diduduki, c) Ijasah tertinggi yang dimiliki, d) Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/ sedang diduduki. RLS Kabupaten Jepara sudah mencapai 7,32 tahun pada tahun 2016 dari tahun 2012 sebesar 6,96 tahun. Kondisi RLS Kabupaten Jepara selama kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 tidak berbeda dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga mengalami kenaikan tiap tahun, secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

## Membangun Pendidikan Efektif



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017  
 Gambar 3.12 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016 (Tahun)

Sedangkan posisi relatif RLS Kabupaten Jepara pada tahun 2016 sebesar 7,32 tahun berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,15 tahun dan di bawah Nasional sebesar 7,95 tahun serta merupakan tertinggi ketiga setelah Kabupaten Kudus (7,85 tahun) dan Demak (7,46 tahun), secara rinci bisa dilihat pada gambar di bawah ini.



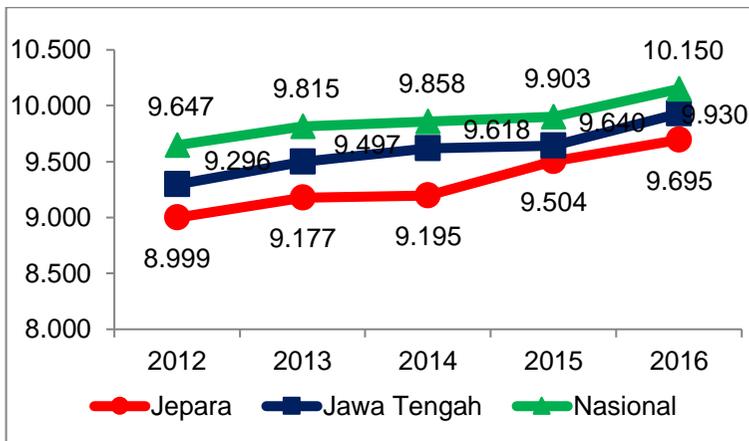
## Pendidikan di Jepara

Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017

Gambar 3.13 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Jepara Tahun 2016 (Tahun)

### d. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukkan bahwa semakin meningkatnya daya beli masyarakat sebagai simbol kesejahteraan masyarakat juga semakin baik. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Jepara pada tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp.8.999 ribu dan pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp.9.695 ribu. Kondisi pengeluaran per kapita Kabupaten Jepara ini relevan terhadap perkembangan rata-rata Pengeluaran Per Kapita Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

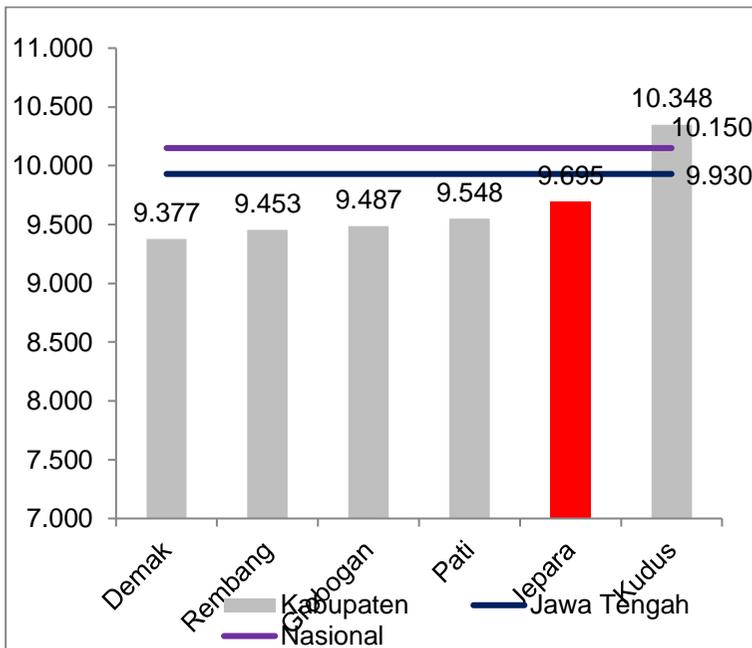


Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017

Gambar 3.14 Perkembangan Perngeluaran Per Kapita Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016 (Ribu Rupiah)

## Membangun Pendidikan Efektif

Capaian pengeluaran per kapita Kabupaten Jepara pada tahun 2016 sebesar Rp.9.695 ribu di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.9.930 ribu dan Nasional sebesar Rp.10.150 ribu. Dibandingkan dengan pengeluaran per kapita kabupaten sekitarnya di Jawa Tengah pada tahun 2016, Kabupaten Jepara tertinggi kedua setelah Kabupaten Kudus sebesar Rp.10.348 ribu, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Tengah 2017

Gambar 3.15 Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Jepara Tahun 2016 (Ribu Rupiah)

## **2. Gambaran Umum Pendidikan**

Kondisi pendidikan Kabupaten Jepara yang digambarkan dalam penyusunan Masterplan Pendidikan meliputi satuan pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan Pendidikan Non Formal. Gambaran kondisi tersebut secara terperinci berdasarkan masing-masing indikator disampaikan melalui uraian berikut di bawah ini.

### **a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

#### **1. Ketersediaan**

Lembaga pendidikan anak usia dini di Kabupaten Jepara menunjukkan perkembangan meningkat dalam lima tahun terakhir. Jumlah lembaga PAUD yang di dalamnya terdapat kelompok belajar, tempat penitipan anak dan satuan PAUD sejenis pada tahun 2016 sebanyak 453 kelompok, keberadaannya meningkat jika dilihat pada tahun 2012 sebanyak 440 kelompok. Tren yang sama ditunjukkan pada kelompok TK, tahun 2016 mencapai sebanyak 464 kelompok, jumlahnya naik sebanyak 16 kelompok dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 sebanyak 448 kelompok. Kecenderungan menurun baik PAUD maupun TK sama-sama terjadi di tahun 2015. Sementara itu jumlah RA selama

## *Membangun Pendidikan Efektif*

lima tahun terakhir tercatat tidak ada perubahan, yaitu mencapai sebanyak 138 kelompok.

Perkembangan jumlah lembaga PAUD maupun TK dengan tren meningkat dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Jepara perlu dibarengi dengan sistem pengelolaan yang baik dari lembaga itu sendiri. Saat ini dalam pengelolaan PAUD dan TK masih banyak yang mempersepsikan sama, padahal PAUD dengan TK memiliki aturan yang berbeda namun masyarakat dalam menyelenggarakan sama. Penerapan usia PAUD pada beberapa lembaga masih mencampuradukan antara usia murid di PAUD dan di TK tidak sesuai dengan kelompok umur. Perlu perhatian juga dalam manajemen PAUD, TK dan RA karena walaupun berijin namun masih banyak yang mencampuradukan sistem pengelolaannya dengan keluarga sehingga sistem pengelolaan masih cenderung belum kompeten.

*Tabel 3.6.*

*Perkembangan Jumlah Lembaga PAUD, TK dan RA  
Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2016*

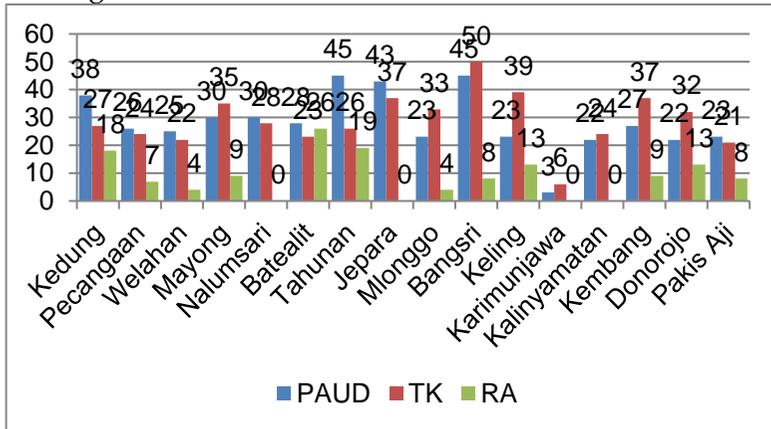
Satuan Pendidikan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
Jumlah PAUD (KB/TP/SPS)	440	444	443	453	453
Jumlah TK	448	448	455	464	464
Jumlah RA	138	138	138	138	138

*Sumber : Profil Pendidikan Kab. Jepara series*

Dilihat berdasarkan persebarannya, jumlah PAUD di Kabupaten Jepara paling banyak berada di Kecamatan Bangsri dan Tahunan masing-masing sebanyak 45 kelompok dan di Kecamatan Jepara sebanyak 43 kelompok. Banyaknya jumlah PAUD di ketiga kecamatan tersebut juga ditunjang dengan banyaknya jumlah penduduk terutama pada usia PAUD dan TK. Sementara itu

## Pendidikan di Jepara

jumlah lembaga RA paling banyak di Kecamatan Batealit. Persebaran jumlah lembaga PAUD, TK maupun RA dapat dilihat melalui grafik berikut.



*Gambar 3.16 Persebaran Jumlah PAUD, TK dan RA Pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Jepara Tahun 2016*

Jumlah murid pada kelompok usia dini dilihat dari perkembangannya memiliki kecenderungan tidak sama antara PAUD, TK dengan RA. Jumlah peserta didik TK memiliki kecenderungan meningkat di tahun 2015/2016 sementara itu jumlah peserta didik pada satuan pendidikan RA memiliki kecenderungan fluktuatif, setiap tahunnya kecenderungan naik turun. Jika dijumlah secara keseluruhan, jumlah anak yang menjadi peserta didik PAUD, TK maupun RA pada tahun ajaran 2016/2017 mencapai sebanyak 49.777 anak, di tahun yang sama terdapat sebanyak 63.368 jumlah anak usia 4-6 tahun. Artinya jika dibandingkan dengan jumlah kelompok umur ada sekitar 21,45% anak usia 4-6 tahun tidak berada di lembaga PAUD, TKA maupun RA, atau kemungkinan berada di lembaga yang berada di luar Kabupaten Jepara karena lebih dekat atau orang tua tidak domisili di Kabupaten Jepara.

*Tabel 3.7.*

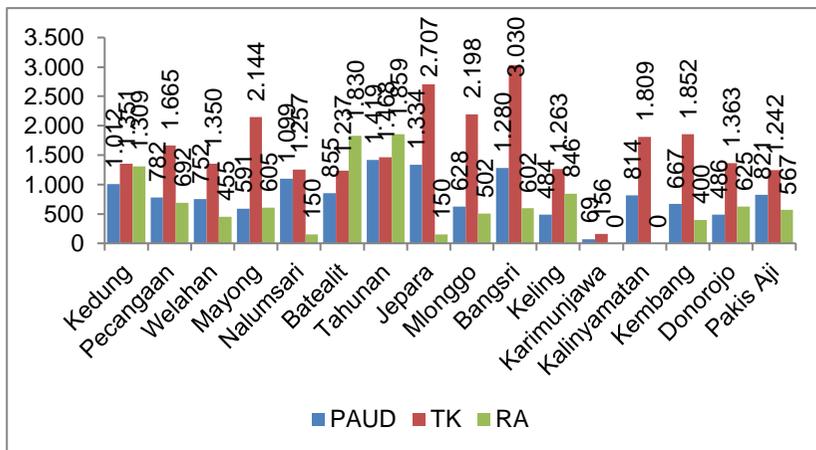
## Membangun Pendidikan Efektif

### Perkembangan Jumlah Murid PAUD, TK dan RA Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2016

Satuan Pendidikan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
Murid PAUD	72.964*	74.420*	0	13.093	13.093
Murid TK	22.828	23.462	23.692	26.092	26.092
Murid RA	7.906	8.279	8.192	10.592	10.592

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Jepara series  
\*akumulasi dengan data TPQ

Jika dilihat persebaran jumlah peserta didik PAUD di masing-masing kecamatan, menunjukkan kondisi yang sama dengan jumlah lembaga PAUD dan TK yaitu dengan konsentrasi tertinggi berada di Kecamatan Jepara dan Bangsri. Sementara itu jumlah murid RA berkonsentrasi paling banyak berada di Kecamatan Tahunan dan Batealit.



Gambar 3.17 Persebaran Jumlah Murid, TK dan RA Pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Jepara Tahun 2016

Melihat persebaran jumlah peserta didik PAUD di Kabupaten Jepara yang masih menjadi perhatian adalah bagaimana

## Pendidikan di Jepara

kesetaraan kualitas layanan antara lembaga satu dan lainnya dalam memberikan pendidikan bagi anak. Penerapan konsep dasar dengan belajar sambil bermain, bermain seraya belajar menjadi konsep yang harus dipahami bersama bagi seluruh penyelenggara. Anak belajar melalui bermain artinya didalam bermain anak bisa belajar, mengembangkan ke-6 aspek seperti NAM, fisik motorik, kognitif, bahasa, SOSEM, dan seni.

Pendidik PAUD, TK dan RA merupakan anggota masyarakat yang memiliki tugas dan kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Pendidik ini dalam keseharian dimasyarakat biasa dikenal dengan guru. Banyaknya jumlah guru harus sebanding dengan jumlah murid yang tersedia dan menjadi tanggungjawabnya dalam melakukan bimbingan terhadap anak. Pada tahun 2016, jumlah guru PAUD, TK dan RA Kabupaten Jepara mencapai sebanyak 5.109, yang terdiri pendidik PAUD sebanyak 1.780 orang, TK sebanyak 2.595 orang dan RA sebanyak 734 orang. Jumlah siswa di tahun yang sama mencapai sebanyak 49.777 orang menunjukkan perbandingan satu pendidik membawahi sebanyak 9-10 anak, atau dengan rincian PAUD 1:7-8, TK 1:10-11, dan RA 1:14-15.

Persoalan yang masih dihadapi berkaitan dengan Pendidik PAUD, TK dan RA adalah masih minimnya tunjangan atau gaji, terutama pada pendidik ataupun guru yang berada di wilayah perdesaan, jauh dari perkotaan. Berdasarkan hasil FGD, menunjukkan gaji yang mereka terima masih minim sekali. Hal ini terjadi akibat kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap nasib guru PAUD,TK maupun RA. Pada tahun-tahun sebelumnya masih ada bantuan dari Pemerintah Provinsi, namun untuk saat ini sudah tidak ada. Selain minimnya gaji yang diterima, juga kecilnya kesempatan untuk mendapatkan peningkatan kapasitas

## Membangun Pendidikan Efektif

sebagai tenaga pendidik. Tahun 2013, tutor PAUD yang mengikuti diklat dasar sebanyak 50 orang, meningkat ditahun 2014 menjadi sebanyak 361 orang, namun ditahun 2018 rencana diklat dasar tutor PAUD menurun untuk 80 orang.

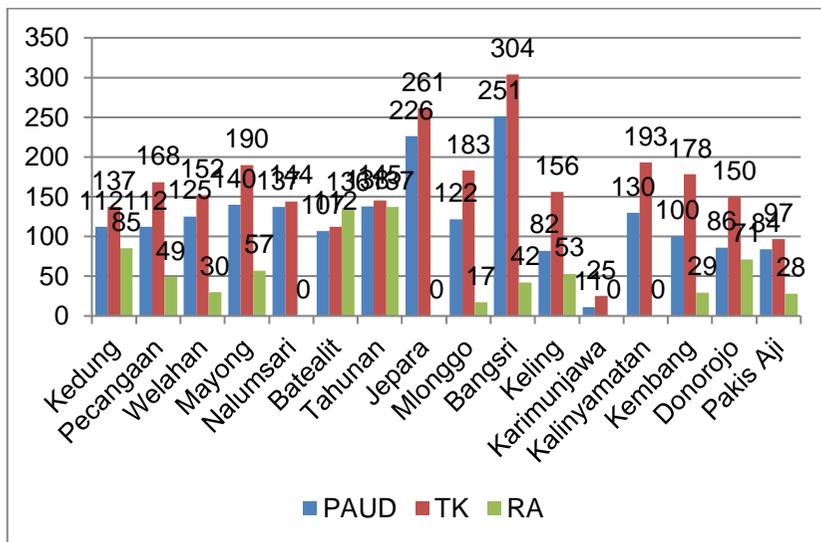
Tabel 3.8.

Perkembangan Jumlah Pendidik/Tutor PAUD, TK dan RA  
Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2016

Satuan Pendidikan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
PAUD	6.688*	6.818*	NA	1.780	1.780
TK	2.038	1.683	1.697	2.595	2.595
RA	705	712	596	734	734

\*akumulasi dengan data TPQ

Sumber : Profil Pendidikan Kab. Jepara series



Gambar 3.18 Persebaran Jumlah Tendik PAUD, TK dan RA Pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Jepara Tahun 2016

## Pendidikan di Jepara

Jika dilihat dari persebarannya, jumlah tenaga pendidik ataupun tutor PAUD dan TK paling banyak berada Kecamatan Bangsri dan Jepara, sementara itu paling rendah (di luar Karimunjawa) untuk PAUD berada di Kecamatan Keling dan TK berada di Kecamatan Pakisaji. Tinggi rendahnya jumlah tenaga pendidik di masing-masing kecamatan masih sebanding dengan jumlah siswa yang ada pada kelompok PAUD dan TK di kecamatan tersebut. Sementara itu tenaga pendidik di RA masih sama konsentrasinya dengan jumlah siswa maupun sekolah yaitu di Kecamatan Batealit dan Tahunan.

### 2. Keterjangkauan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan anak-anak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter. Kinerja program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diukur melalui Indikator Angka Partisipasi Kasar. APK PAUD di Kabupaten Jepara dari kurun waktu 2012 – 2016 mengalami peningkatan yang fluktuatif. Dilihat pada tahun 2012 APK PAUD mencapai 51,45% dan di tahun 2016 menjadi 56,37%. Peningkatan APK PAUD belum mencerminkan capaian yang tinggi karena masih banyak penduduk usia dini yang belum bersekolah di PAUD. Kinerja APK PAUD masih memerlukan perhatian serius, mengingat jika dilihat dari target Kemendikbud, APK PAUD diharapkan pada tahun 2018 sebesar 74,30% dan tahun 2019 sudah mencapai 78,70%. Secara rinci perkembangan APK PAUD terlihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.9.*  
*APK PAUD Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2016*

APK PAUD	2012	2013	2014	2015	2016
APK PAUD	51,45	51,68	58,72	57,85	56,37

## Membangun Pendidikan Efektif

<i>Laki-laki</i>	50,95	50,99	57,49	57,15	56,27
<i>Perempuan</i>	51,95	52,37	59,95	58,55	56,47

### 3. Kualitas

Lembaga PAUD layak adalah lembaga PAUD yang memenuhi kriteria PAUD yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PAUD layak adalah lembaga PAUD yang memiliki tempat bermain atau lapangan bermain, sarana bermain, alat peraga edukatif yang memadai dan menerapkan pendidikan PAUD holistik *comprehensif*. Jumlah PAUD Layak di Kabupaten Jepara menunjukkan 430 pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2012 menunjukkan peningkatan. Hal tersebut terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10.

*Jumlah PAUD Kategori Layak di Kabupaten Jepara  
Tahun 2012 – 2016*

Tahun	Jumlah PAUD	Jumlah PAUD Layak
2016	455	430
2015	453	430
2014	443	419
2013	444	420
2012	440	418

Dilihat berdasarkan kualitas kelayakan mengajar tenaga pendidik TK maupun RA, menunjukkan rata-rata memiliki tingkat kelayakan sebesar 41,24%, masih rendah, berada di bawah 50%. Tingkat kelayakan guru mengajar pada satuan pendidikan RA masih jauh lebih rendah yaitu mencapai sebesar 37,47%, sementara TK sebesar 42,31%. Persentase guru layak mengajar jika dilihat dari persebarannya untuk satuan pendidikan TK menunjukkan tertinggi di Kecamatan Karimunjawa sebesar 78,54%, dan terendah di Kecamatan Jepara sebesar 30,99% dan Kecamatan Bangsri sebesar 31,88%. Pada satuan pendudukan RA, tertinggi

## Pendidikan di Jepara

rata-rata guru layak berada di Kecamatan Kedung sebanyak 54,12% dan terendah berada di Kecamatan Donorojo sebesar 18,31%.

Melihat kondisi di atas menunjukkan wilayah dengan persentase guru layak rendah rata-rata berada di Kecamatan dengan jumlah siswa dan guru dengan kategori banyak. Besarnya jumlah guru di wilayah tersebut tidak sebanding dengan program dan kegiatan peningkatan kapasitas guru di daerah yang lebih banyak mengandalkan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat dengan kuota yang terbatas. Sementara itu Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara belum memiliki program maupun kegiatan yang mendorong pada peningkatan kapasitas guru TK maupun RA di daerah. Ini menjadi perhatian penting karena target Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik ditargetkan pada tahun 2019 mencapai 100%.

*Tabel 3.11.*

*Jumlah dan Persebaran Persentase Guru Layak  
Pada Satuan Pendidikan TK dan RA di Kabupaten Jepara Tahun  
2016/2017*

No.	Kecamatan	Persentase Guru Layak		
		TK	RA	TK+RA
1	Kedung	51,13	54,12	52,29
2	Pecangaan	42,67	38,78	41,71
3	Welahan	57,78	43,33	55,15
4	Mayong	31,77	40,35	33,73
	Nalumsari	41,25	-	41,25
6	Batealit	50,83	28,68	39,06
7	Tahunan	46,58	43,80	45,23
8	Jepara	30,99	-	30,99
9	Mlonggo	40,76	47,06	41,29
10	Bangsri	31,88	30,95	31,76

### Membangun Pendidikan Efektif

No.	Kecamatan	Persentase Guru Layak		
		TK	RA	TK+RA
11	Keling	54,05	39,62	50,25
12	Karimunjawa	78,57	-	78,57
13	Kalinyamatan	35,80	-	35,80
14	Kembang	35,55	34,48	35,42
15	Donorojo	45,75	18,31	37,05
16	Pakis Aji	54,87	35,71	51,06
	Rata-rata	42,31	37,47	41,24

Rasio siswa per guru adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru di sekolah yang bersangkutan. Rata-rata rasio siswa per guru pada satuan pendidikan TK dan RA sudah baik yaitu 1:11. Dilihat dari pemerataan rasio siswa per guru (di luar Karimunjawa), paling rendah berada di Kecamatan Nalumsari, Kembang dan Donorojo yaitu dengan perbandingan 9:1. Sementara itu, yang masih menjadi perhatian berada pada satuan pendidikan RA, yang mana masih terdapat kecamatan dengan rasio siswa per guru masih tinggi berada di Kecamatan Mlonggo yang mencapai 30:1 dan Kecamatan Pakisaji mencapai 20:1.

Secara umum rasio siswa per guru di Kabupaten Jepara masih berada pada kondisi baik jika dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan pemerintah, yaitu untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1. Sehingga dengan kondisi ideal tersebut, setiap guru tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi karena mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya berada di angka maksimal 15:1 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008.

Persebaran rasio siswa per guru pada satuan pendidikan TK dan RA di Kabupaten Jepara selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Pendidikan di Jepara

Tabel 3.12.

*Persebaran Siswa Per Guru Pada Satuan Pendidikan  
TK dan RA di Kabupaten Jepara Tahun 2016/2017*

No.	Kecamatan	Siswa Per Guru		
		TK	RA	TK+RA
1	Kedung	10	15	12
2	Pecangaan	11	14	12
3	Welahan	10	15	11
4	Mayong	11	11	11
5	Nalumsari	8	-	9
6	Batealit	10	13	12
7	Tahunan	10	14	12
8	Jepara	11	-	12
9	Mlonggo	12	30	13
10	Bangsri	11	14	11
11	Keling	9	16	10
12	Karimunjawa	3	-	3
13	Kalinyamatan	10	-	10
14	Kembang	9	14	9
15	Donorojo	9	9	9
16	Pakis Aji	11	20	13
	Rata-rata	10	14	11

Suasana lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif menjadi kebutuhan penting dalam suasana belajar dan mengajar siswa maupun guru. Kondisi ruangan belajar yang ditata dengan baik dan rapi antara lain dengan mempertimbangkan kondisi pencahayaan, sirkulasi udara, pewarnaan cat dinding, ketersediaan sarana dan prasarana belajar dan kebersihan ruang kelas menjadi kebutuhan utama dalam mendukung siswa mencerna dan menerima pelajaran. Selain itu memberikan energi positif bagi guru dalam menyampaikan materi pelajaran di kelas.

### *Membangun Pendidikan Efektif*

Kondisi ruang kelas pada satuan pendidikan TK dan RA di Kabupaten Jepara rata-rata sebesar 81,84% ruang kelas dalam kondisi baik. Sumbangan rata-rata ruang kelas dari satuan pendidikan TK sebesar 84,28% dan RA sebesar 79,41%. Jika dilihat dari persebaran di setiap kecamatan, satuan pendidikan dengan kondisi ruang kelas paling baik berada pada satuan pendidikan RA di Kecamatan Keling dengan kondisi 100%, sementara itu pada satuan pendidikan TK belum ada yang mencapai 100%.

Bidang pendidikan memang menjadi perhatian serius dengan anggaran yang harus dialokasikan mencapai 20% setiap tahunnya. Namun meski anggaran pendidikan telah mendapat alokasi 20%, masih banyak ruang kelas yang kondisinya jika dilihat berdasarkan indikator standar nasional pendidikan masih belum sesuai. Untuk itu jika kita melihat dengan standar tersebut, maka kemungkinan besar di Kabupaten Jepara memiliki kondisi yang serupa masih banyak sarana pendidikan TK dan RA yang masih memerlukan perhatian bersama.

*Tabel 3.13.*

*Persebaran Persentase Ruang Kelas Baik Pada Satuan Pendidikan TK dan RA di Kabupaten Jepara Tahun 2016/2017*

No.	Kecamatan	Persentase Ruang Kelas Baik		
		TK	RA	TK+RA
1	Kedung	33,85	95,12	64,48
2	Pecangaan	90,91	96,30	93,60
3	Welahan	74,42	85,71	80,07
4	Mayong	87,18	82,61	84,89
5	Nalumsari	86,96	-	-
6	Batealit	73,53	82,19	77,86
7	Tahunan	76,92	77,92	77,42
8	Jepara	95,10	-	-
9	Mlonggo	87,67	77,78	82,72

## Pendidikan di Jepara

No.	Kecamatan	Persentase Ruang Kelas Baik		
		TK	RA	TK+RA
10	Bangsri	80,18	82,35	81,27
11	Keling	77,59	100,00	88,79
12	Karimunjawa	25,00	-	-
13	Kalinyamatan	91,46	-	-
14	Kembang	97,60	45,00	71,30
15	Donorojo	90,77	65,63	78,20
16	Pakis Aji	37,84	31,25	34,54
	Rata-rata	84,28	79,41	81,85

#### 4. Kesetaraan

Secara umum partisipasi sekolah pada satuan pendidikan PAUD, TK dan RA di Kabupaten Jepara memiliki kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Rasio partisipasi laki-laki sebesar 50,52% dan perempuan sebesar 49,48%. Data kondisi tersebut sebagai informasi saja karena untuk satuan pendidikan PAUD, TK dan RA masih belum terlalu relevan untuk mengukur kesetaraan berdasarkan jenis kelamin.

*Tabel 3.14.*

*Jumlah Peserta Didik PAUD, TK dan RA Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Jepara Tahun 2016*

No.	Kecamatan	PAUD			TK		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Kedung	495	517	1.012	695	656	1.351
2	Pecangaan	393	389	782	859	806	1.665
3	Welahan	368	384	752	674	676	1.350
4	Mayong	316	275	591	1.106	1.038	2.144
5	Nalumsari	565	534	1.099	661	596	1.257
6	Batealit	406	449	855	630	607	1.237
7	Tahunan	706	713	1.419	747	721	1.468
8	Jepara	688	646	1.334	1.358	1.349	2.707
9	Mlonggo	319	309	628	1.092	1.106	2.198
10	Bangsri	617	663	1.280	1.582	1.448	3.030

## Membangun Pendidikan Efektif

No.	Kecamatan	PAUD			TK		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
11	Keling	242	242	484	639	624	1.263
12	Karimunjawa	41	28	69	77	79	156
13	Kalinyamatan	394	420	814	908	901	1.809
14	Kembang	331	336	667	926	926	1.852
15	Donorojo	231	255	486	697	666	1.363
16	Pakis Aji	349	472	821	639	603	1.242
Jumlah		6.461	6.632	13.093	13.290	12.802	26.092

No.	Kecamatan	RA		
		L	P	Jumlah
1	Kedung	700	609	1.309
2	Pecangaan	363	329	692
3	Welahan	231	224	455
4	Mayong	303	302	605
5	Nalumsari	75	75	150
6	Batealit	911	919	1.830
7	Tahunan	957	902	1.859
8	Jepara	75	75	150
9	Mlonggo	263	239	502
10	Bangsri	292	310	602
11	Keling	438	408	846
12	Karimunjawa	0	0	0
13	Kalinyamatan	0	0	0
14	Kembang	203	197	400
15	Donorojo	306	319	625
16	Pakis Aji	277	290	567
Jumlah		5.394	5.198	10.592

*Sumber : Profil Pendidikan Kab. Jepara, 2016/2017*

### 5. Keterjaminan

Jumlah Persebaran Guru PAUD, TK, RA berdasarkan Status Kepegawaian tahun 2017 menunjukkan sebagian besar pada satuan pendidikan TK dan RA adalah non PNS. Jumlah guru TK yang tergolong status PNS hanya sebesar 3,47% dan untuk satuan RA hanya sebesar 0,14% saja. Sementara itu ketersediaan tenaga

## Pendidikan di Jepara

pendidik PAUD yang ada saat ini sebesar 98,30% statusnya adalah guru. Dengan demikian, keberadaan pendidikan pada satuan PAUD sudah memiliki keterampilan sebagai guru dalam proses pengembangan anak di sekolah. Persebaran jumlah guru berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*Tabel 3.15.*

*Jumlah Tenaga Pendidik PAUD, TK dan RA Berdasarkan Status Kepegawaian Di Kabupaten Jepara Tahun 2016*

No.	Kecamatan	PAUD		TK		RA	
		Guru	Bukan Guru	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS
1	Kedung	112	3	3	130	0	85
2	Pecangaan	112	2	5	145	0	49
3	Welahan	125	4	17	118	0	30
4	Mayong	140	1	9	183	0	57
5	Nalumsari	137	2	5	155	0	0
6	Batealit	107	5	1	119	0	136
7	Tahunan	138	2	3	143	0	137
8	Jepara	226	2	19	223	0	0
9	Mlonggo	122	1	6	178	0	17
10	Bangsri	251	2	12	264	1	41
11	Keling	82	1	4	144	0	53
12	Karimunjawa	11	0	0	56	0	0
13	Kalinyamatan	130	3	4	172	0	0
14	Kembang	100	0	1	210	0	29
15	Donorojo	86	6	0	153	0	71
16	Pakis Aji	84	0	1	112	0	28
Jumlah		1.963	34	90	2.505	1	733

### *Membangun Pendidikan Efektif*

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen, bahwasanya salah satu yang dipersyaratkan oleh seorang guru adalah kualifikasi akademik. Kualifikasi akademik seorang guru dipersyaratkan sarjana atau program diploma empat yang diperoleh melalui pendidikan tinggi. Amanat tersebut juga melekat pada guru yang bertugas mengajar pada satuan pendidikan PAUD, TK dan RA secara kualifikasi pendidikan adalah D-IV atau S-1.

Secara umum, kualifikasi akademik guru yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang minimal D-IV atau S-1 di Kabupaten Jepara sudah memenuhi. Jumlah guru/tutor PAUD yang ada saat ini hanya 11 guru yang berpendidikan D-III. Walaupun secara umum sudah D-IV/S-1, permasalahan di Kabupaten Jepara masih banyaknya guru yang belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas. Kondisi tersebut memungkinkan guru menjadi tidak dapat mengikuti perkembangan model-model pendidikan dan pengajaran terkini sesuai dengan regulasi yang berkembang. Jumlah guru/ tutor PAUD berdasarkan ijazah tertinggi selengkapnyanya dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 3.16.*

*Jumlah Tutor PAUD Menurut Ijazah Tertinggi Pada Masing-masing Kecamatan Di Kabupaten Jepara Tahun 2016*

No	Kecamatan	Tutor PAUD menurut Ijazah Tertinggi										
		<=SM/ MA		Diploma		DIV/S1		S2/S3		Jumlah		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
1	Kedung	0	0	0	1	11	99	1	0	12	100	112
2	Pecangaan	0	0	0	0	5	106	1	0	6	106	112
3	Welahan	0	0	0	0	7	118	0	0	7	118	125
4	Mayong	0	0	0	2	2	136	0	0	2	138	140

## Pendidikan di Jepara

5	Nalumsari	0	0	0	3	3	130	0	1	3	134	137
6	Batealit	0	0	0	0	2	105	0	0	2	105	107
7	Tahunan	0	0	0	0	2	134	0	2	2	136	138
8	Jepara	0	0	0	3	4	218	0	1	4	222	226
9	Mlonggo	0	0	0	0	5	117	0	0	5	117	122
10	Bangsri	0	0	0	0	0	249	1	1	1	250	251
11	Keling	0	0	0	0	3	79	0	0	3	79	82
12	Karimun-jawa	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11	11
13	Kalinyaman	0	0	0	1	2	127	0	0	2	128	130
14	Kembang	0	0	0	0	1	99	0	0	1	99	100
15	Donorojo	0	0	0	0	2	84	0	0	2	84	86
16	Pakis Aji	0	0	0	1	0	83	0	0	0	84	84

Sementara itu dari sisi kelembagaan, jumlah TK yang sudah terakreditasi sebanyak 250 sekolah dengan status paling banyak pada akreditasi B sebesar 160 sekolah dan pada RA yang sudah mengikuti akreditasi sebanyak 88 sekolah dengan tertinggi statusnya pada akreditasi B sebanyak 73 sekolah. Masih banyak TK maupun RA yang belum terakreditasi dengan besaran pada TK sebanyak 203 dan RA sebanyak 50. Selengkapny data akreditasi TK dan RA dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 3.17.*

*Status Akreditasi TK dan RA di Kabupaten Jepara Tahun 2017*

No	Satuan Pendidikan	Status Akreditasi			
		A	B	C	Belum
1	Taman Kanak-Kanak	73	160	17	203
2	Raudhatul Atfal	14	73	1	50

*Sumber : Database Akreditasi Kab. Jepara, 2018*

### **b. Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI)**

#### **1. Ketersediaan**

**a) Jumlah SD / MI, Murid dan Guru SD/MI**

Jumlah SD di Kabupaten Jepara pada tahun 2016 sebanyak 595 unit, yang tersebar di 16 Kecamatan. Selama tahun 2012 – 2016 jumlah SD tahun 2014 sebanyak 599 unit. Persebaran jumlah SD di Kabupaten Jepara dengan jumlah di atas 40 unit terdapat di Kecamatan Welahan, Mayong, Nalumsari, Tahunan, Jepara, Bangsri dan Kembang. Gambaran secara rinci jumlah Sekolah Dasar dapat dilihat pada tabel berikut.

*Tabel 3.18.*  
*Jumlah SD Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2016*  
*Dirinci Menurut Kecamatan*

No.	Kecamatan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
1	Kedung	34	34	34	34	34
2	Pecangaan	40	40	40	39	39
3	Welahan	47	48	48	47	47
4	Mayong	45	46	46	46	46
5	Nalumsari	41	41	41	41	41
6	Batealit	37	37	37	37	37
7	Tahunan	44	44	44	43	43
8	Jepara	42	42	42	42	42
9	Mlonggo	35	35	35	35	35
10	Bangsri	39	39	40	40	40
11	Keling	37	37	37	37	37
12	Karimunjawa	14	14	14	14	14
13	Kalinyamatan	40	40	40	39	39
14	Kembang	42	42	43	43	43
15	Donorojo	31	31	31	31	31
16	Pakis Aji	27	27	27	27	27
Jumlah		595	597	599	595	595

## Pendidikan di Jepara

Pada satuan pendidikan yang sama, selain SD juga ada Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara namun bersifat keagamaan. Tahun 2016 jumlah MI mencapai sebanyak 182 unit, tidak ada kecenderungan bertambah maupun berkurang selama tiga tahun terakhir. Namun jika dilihat pada tahun 2014, ada kenaikan jumlah MI sebanyak 3 unit, yaitu di Kecamatan Nalumsari, Pecangaan dan Kembang. Jumlah MI paling banyak mendominasi di Kecamatan Bangsri dan Keling. Persebaran jumlah MI di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*Tabel 3.19.*

*Jumlah MI Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2016  
Dirinci Menurut Kecamatan*

No.	Kecamatan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
1	Kedung	17	17	17	17	17
2	Pecangaan	5	5	6	6	6
3	Welahan	2	2	2	2	2
4	Mayong	10	10	10	10	10
5	Nalumsari	10	10	11	11	11
6	Batealit	18	18	18	18	18
7	Tahunan	15	15	15	15	15
8	Jepara	3	3	3	3	3
9	Mlonggo	16	16	16	16	16
10	Bangsri	21	21	21	21	21
11	Keling	22	22	22	22	22
12	Karimunjawa	0	0	0	0	0
13	Kalinyamatan	1	1	1	1	1
14	Kembang	10	10	11	11	11
15	Donorojo	17	17	17	17	17
16	Pakis Aji	12	12	12	12	12

### Membangun Pendidikan Efektif

No.	Kecamatan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
	Jumlah	179	179	182	182	182

Melihat kondisi perkembangan jumlah satuan SD dan MI jika digabungkan jumlahnya mencapai 777 sekolah. Kabupaten Jepara dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 195 desa, jika dirata-rata rasionya mencapai 3-4 SD/MI di masing-masing desa. Dengan demikian, dari sisi jumlah terlihat mencukupi, namun dari sisi persebarannya masih perlu dilihat kembali berdasarkan masing-masing jumlah penduduk usia sekolah SD/MI.

Perkembangan jumlah murid SD di Kabupaten Jepara dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuatif. Tahun 2016, jumlah siswa SD di Kabupaten Jepara mencapai sebesar 83.117 siswa, menurun jika dibandingkan dengan tahun ajaran 2015 sebanyak 88.467 siswa. Tiga tahun sebelumnya (2012-2014) jumlah anak SD menunjukkan kondisi yang naik turun. Jumlah siswa SD paling banyak tahun ajaran 2012/2013 yaitu mencapai 92.592 siswa. Gambaran secara rinci jumlah murid SD pada masing-masing kecamatan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20.

*Jumlah Murid SD Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2016 Dirinci Menurut Kecamatan (orang)*

No	Kecamatan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
1	Kedung	4.578	4.560	4.719	4.546	4.292
2	Pecangaan	6.813	6.746	6.757	6.663	6.385
3	Welahan	6.995	6.988	6.913	6.867	6.438
4	Mayong	9.010	8.219	8.044	7.883	7.459
5	Nalumsari	6.135	6.165	5.974	5.927	5.493

## Pendidikan di Jepara

No	Kecamatan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
6	Batealit	5.611	5.501	5.417	5.354	5.048
7	Tahunan	7.972	7.618	8.156	7.559	7.230
8	Jepara	9.482	9.559	9.448	9.516	8.922
9	Mlonggo	5.626	5.417	5.892	5.106	4.703
10	Bangsri	5.858	5.851	5.716	5.620	5.342
11	Keling	3.597	3.481	3.450	3.386	3.237
12	Karimunjawa	1.061	1.058	1.035	1.033	971
13	Kalinyamatan	7.255	7.240	7.178	7.151	6.688
14	Kembang	5.655	5.599	5.487	5.328	4.934
15	Donorojo	3.167	3.005	2.943	2.871	2.629
16	Pakis Aji	3.777	3.675	5.023	3.657	3.346
Jumlah		92.592	90.682	92.152	88.467	83.117

Pada kelompok pendidikan keagamaan setingkat SD, jumlah siswa MI di Kabupaten Jepara pada tahun 2016 mencapai sebanyak 32.276 siswa. Dalam lima tahun terakhir kondisinya sama dengan tren jumlah siswa SD yang mana menunjukkan fluktuatif. Jumlah siswa MI paling banyak selama tahun ajaran 2012/2013-2016/2017 adalah di tahun ajaran 2015/2016 mencapai sebanyak 34.867 siswa.

*Tabel 3.21.*

*Jumlah Murid MI Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2016 Dirinci Menurut Kecamatan (orang)*

No.	Kecamatan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
1	Kedung	3.738	3.813	3.749	3.675	3.749
2	Pecangaan	1.470	1.499	1.524	1.575	1.524
3	Welahan	239	243	263	265	263
4	Mayong	1.630	1.662	1.716	339	1.716

### Membangun Pendidikan Efektif

No.	Kecamatan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
5	Nalumsari	1.346	1.373	1.423	1.974	1.423
6	Batealit	3.291	2.521	3.531	1.861	3.531
7	Tahunan	2.991	3.051	3.057	3.808	3.057
8	Jepara	646	659	668	3.281	668
9	Mlonggo	3.097	3.159	3.322	887	3.322
10	Bangsri	4.193	4.277	4.193	3.573	4.193
11	Keling	2.495	2.545	2.548	2.482	2.548
12	Karimunjava	0	0	0	4.401	0
13	Kalinyamatan	92	94	98	1.605	98
14	Kembang	1.309	968	1.452	2.573	1.452
15	Donorojo	2.369	2.417	2.369	2.568	2.369
16	Pakis Aji	2.232	2.277	2.363	0	2.363
Jumlah		31.138	30.558	32.276	34.867	32.276

Pada tahun ajaran 2016/2017, jumlah anak yang bersekolah di SD dan MI mencapai sebesar 115.393 siswa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun ajaran yang sama usia sekolah SD/MI mencapai sebesar 115.441 jiwa, secara umum sangat baik hanya sebesar 0,04% saja penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Jepara pada tahun ajaran 2016-2017 tidak bersekolah sesuai usianya.

Jumlah Guru SD di Kabupaten Jepara pada tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 7.932 orang, tidak ada perubahan jika dilihat dengan kondisi tahun ajaran 2015/2016. Perkembangan jumlah guru SD ini cukup menarik karena di tahun ajaran 2012/2013-2014/2015 memiliki kecenderungan menurun, bahkan di tahun ajaran 2014/2015 pengurangannya cukup banyak hingga 5.659 orang, dibandingkan dengan jumlah guru SD di tahun ajaran 2013/2014 sebanyak 6.274 orang. Melihat kondisi tersebut apakah di tahun ajaran 2014/2015 terjadi pensiun guru yang cukup besar

## Pendidikan di Jepara

atau banyak guru yang pindah luar kota atau menjadi non aktif. Gambaran secara rinci jumlah Murid SD pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.22.

*Jumlah Guru SD Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2016 Dirinci Menurut Kecamatan (orang)*

No.	Kecamatan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
1	Kedung	366	351	311	388	388
2	Pecangaan	375	392	341	508	508
3	Welahan	477	463	440	585	585
4	Mayong	492	497	454	604	604
5	Nalumsari	430	388	371	490	490
6	Batealit	382	372	322	401	401
7	Tahunan	441	483	390	899	899
8	Jepara	483	458	433	539	539
9	Mlonggo	467	458	425	601	601
10	Bangsri	428	429	379	544	544
11	Keling	410	371	346	426	426
12	Karimunjawa	130	132	102	144	144
13	Kalinyamatan	436	431	404	531	531
14	Kembang	441	414	369	531	531
15	Donorojo	336	331	290	388	388
16	Pakis Aji	316	304	282	353	353
	Jumlah	6.410	6.274	5.659	7.932	7.932

Sementara itu jumlah guru MI di Kabupaten Jepara selama kurun ajaran 2012/2013 - 2016/2017 perubahannya tidak terlalu banyak. Tahun ajaran 2016/2017 jumlah guru MI mencapai 2.683 orang, meningkat dibandingkan kondisi tahun 2012/2013 yang

### *Membangun Pendidikan Efektif*

saat itu sebesar 2.477 orang. Namun dalam rentang waktu tersebut, terlihat dari mulai tahun ajaran 2013/2014-2015/2016 jumlahnya menurun. Persebaran jumlah guru MI dalam lima tahun terakhir dimasing-masing kecamatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

*Tabel 3.23.*

*Jumlah Guru MI Kabupaten Jepara Tahun 2012 - 2016 Dirinci Menurut Kecamatan (orang)*

No	Kecamatan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
1	Kedung	265	267	239	219	239
2	Pecangaan	75	75	72	75	72
3	Welahan	26	26	24	15	24
4	Mayong	143	141	133	26	133
5	Nalumsari	123	122	118	120	118
6	Batealit	238	235	218	132	218
7	Tahunan	217	216	197	218	197
8	Jepara	39	39	38	190	38
9	Mlonggo	210	209	183	45	183
10	Bangsri	318	318	298	193	298
11	Keling	277	274	245	140	245
12	Karimunjawa	0	0	0	253	0
13	Kalinyamatan	11	11	10	122	10
14	Kembang	135	136	135	218	135
15	Donorojo	226	227	209	199	209
16	Pakis Aji	174	171	150	0	564
	Jumlah	2.477	2.467	2.269	2.165	2.683

Jumlah murid SD/MI di Kabupaten Jepara jika dibandingkan dengan ketersediaan sekolah, jumlah kelas dan jumlah guru maka akan diketahui rasionya. Rasio murid SD terhadap sekolah pada

## Pendidikan di Jepara

tahun 2017 sebesar 149, rasio siswa SD per kelas sebesar 23 dan rasio siswa SD per guru sebesar 11, ketiganya menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016. Namun untuk sekolah MI, baik rasio siswa terhadap sekolah, ruang kelas maupun guru dalam dua tahun terakhir kinerjanya sama, tidak ada perubahan.

*Tabel 3.24.*

*Rasio Jumlah Murid SD/MI per Sekolah, SD/MI per Kelas dan SD/MI per Guru di Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2016*

No	Indikator	Rasio				
		2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
1	Rasio Murid SD Per sekolah	150	156	152	154	149
2	Rasio Siswa SD Per Kelas	23	24	24	24	23
3	Rasio Siswa SD Per Guru	14	15	16	12	11
4	Rasio Siswa MI Per sekolah	174	177	158	177	177
5	Rasio Siswa MI Per Kelas	25	25	22	25	25
6	Rasio Siswa MI Per Guru	13	13	13	12	12

Berdasarkan data di atas, apabila digunakan Standar dalam Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM), dimana setiap rombongan belajar (rombel) maksimal 32 siswa dan diasumsikan setiap sekolah memiliki 6 rombel atau satu rombel pada masing-masing kelas, maka rasio murid siswa SD per sekolah relatif sudah memenuhi SPM, karena masing-masing rombel berisi rata-rata 24-25 orang untuk SD dan rata-rata 29-30 orang untuk MI.

Sementara itu rasio siswa SD/MI standarnya adalah tidak melebihi 32 orang juga tercapai karena rata-rata rasio siswa SD

## Membangun Pendidikan Efektif

perkelas sebanyak 23 siswa dan MI sebanyak 25 siswa. Untuk rasio siswa per guru standarnya adalah 32 untuk 1 guru, maka dengan melihat kondisi rasio siswa SD per guru sebesar 11 dan rasio siswa MI per guru sebesar 12 kedua-duanya juga sudah tercapai.

### b) Ketersediaan Sarana Pendidikan SD/MI

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.25.

*Perkembangan Ruang Kelas dalam Kondisi Baik di Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2016*

No	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah ruang kelas SD dalam kondisi Kelas baik (Unit)	3.752	3.095	5.084	5.240	5.199
2.	Persentase Ruang kelas SD dalam Kondisi Baik (%)	70	75	75	80	85

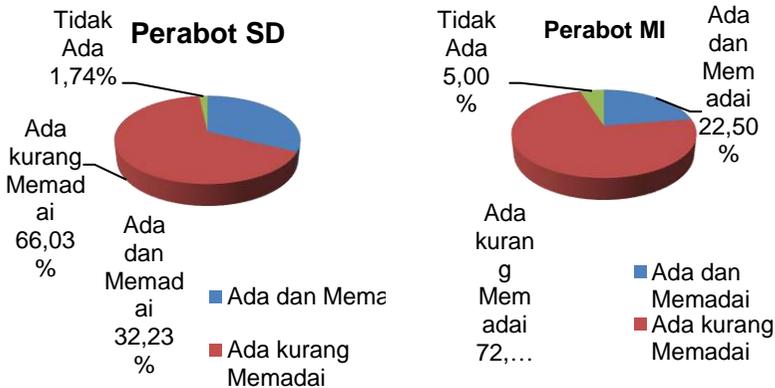
Sarana merupakan peralatan yang digunakan untuk menunjang pembelajaran mulai dari perabot atau (meubelair), peralatan pendidikan, media pendidikan, buku ajar dan buku penunjang sampai pada bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kondisi sarana pendidikan pada masing-masing sekolah diuraikan sebagai berikut :

#### (1) Perabot

Sekolah Dasar yang baik dan dapat memberikan pelayanan yang baik apabila memiliki perabotan yang memadai. Perabotan tersebut antara lain meja kursi guru sesuai dengan jumlah guru, almari arsip, almari untuk menyimpan peralatan, rak buku guru,

## Pendidikan di Jepara

meja kursi kepala sekolah, almari di ruang kepala sekolah, meja kursi tamu, almari display dan perabotan di ruang UKS. Gambaran kondisi kepemilikan perabot pada masing-masing sekolah berdasarkan hasil pendataan adalah sebagai terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Hasil Pendataan 2016, Diolah

Gambar 3.19 Kondisi Kepemilikan Perabot pada Masing-masing SD dan MI

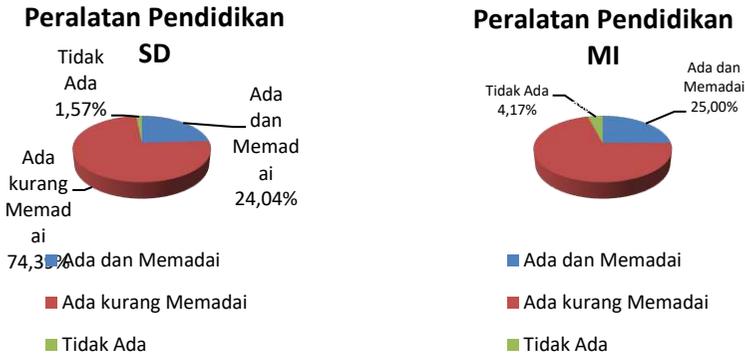
Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar SD memiliki perabotan tetapi kurang memadai yaitu sebanyak 66,03% atau sebanyak 379 SD dari 574 SD. Sedangkan SD yang memiliki perabotan memadai sebanyak 32,23% atau 185 SD, dan SD yang tidak memiliki perabotan sebanyak 1,74% atau sebanyak 10 SD. Sedangkan untuk MI, jumlah MI yang memiliki perabotan kurang memadai sebesar 72,50% atau sebanyak 87 MI.

### (2) Peralatan pendidikan

Sekolah Dasar yang baik dan dapat memberikan pelayanan yang baik apabila memiliki peralatan pendidikan yang memadai untuk menunjang proses belajar mengajar. Peralatan pendidi-

## Membangun Pendidikan Efektif

kan tersebut antara lain alat peraga pendidikan, Peralatan Laboratorium (IPA, Komputer dan Bahasa) dan peralatan pembelajaran lain yang dinyatakan dalam daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia. Gambaran kondisi kepemilikan peralatan pendidikan pada masing-masing sekolah berdasarkan hasil pendataan adalah sebagai terlihat pada gambar di bawah ini.



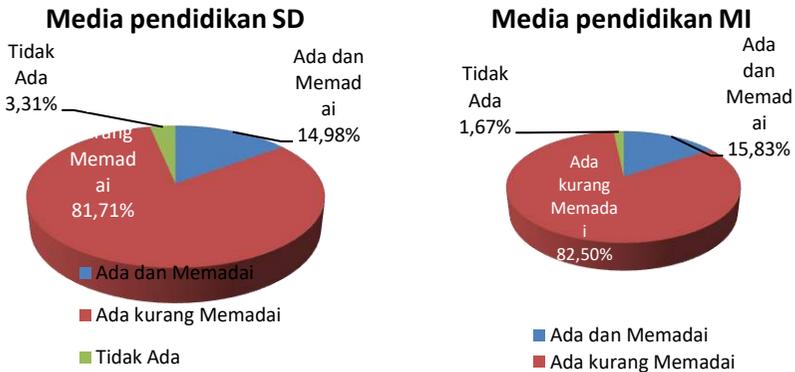
*Gambar 3.20 Kondisi Kepemilikan Peralatan Pendidikan pada Masing-masing SD dan MI*

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar SD memiliki peralatan pendidikan namun kurang memadai yaitu sebanyak 74,39% atau sebanyak 427 SD. Sedangkan SD yang memiliki peralatan pendidikan memadai sebanyak 24,04% atau 138 SD, dan SD yang tidak memiliki peralatan pendidikan sebanyak 1,57% atau sebanyak 9 SD. Sedangkan MI yang memiliki Peralatan Pendidikan kurang memadai sebanyak 70,83% atau sebanyak 84 MI.

### (3) Media pendidikan

## Pendidikan di Jepara

Media pendidikan adalah peralatan yang digunakan oleh guru sebagai sarana untuk menyampaikan materi pelajaran dalam rangka proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Peralatan pendidikan tersebut antara lain papan tulis dan peralatan multi media yaitu berupa laptop dan LCD dan akses internet. Media pendidikan yang minimal harus tersedia adalah papan tulis. Gambaran ketersediaan media pendidikan pada masing-masing SD dan MI terlihat pada gambar di bawah ini.



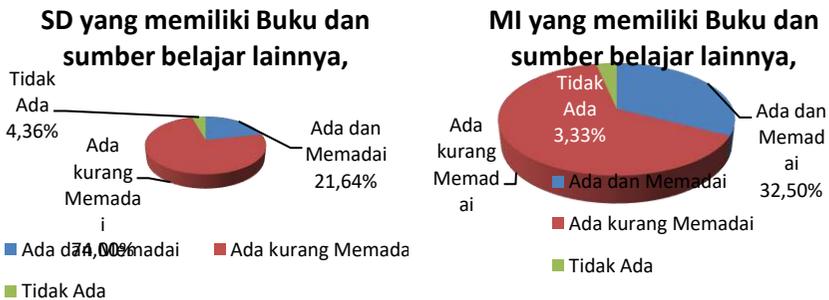
*Gambar 3.21 Kondisi Ketersediaan Media Pendidikan pada Masing-Masing SD dan MI*

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar SD memiliki media pendidikan namun kurang memadai yaitu sebanyak 81,71% atau sebanyak 469 SD. Sedangkan SD yang memiliki media pendidikan memadai sebanyak 14,98% atau 86 SD, dan SD yang tidak memiliki media pendidikan sebanyak 3,31% atau sebanyak 19 SD. Sedangkan MI yang memiliki media pendidikan kurang memadai sebesar 82,50% atau sebanyak 99 MI.

### (4) Buku dan Sumber Belajar Lainnya

## Membangun Pendidikan Efektif

Buku dan sumber belajar lainnya merupakan sarana sangat penting dalam proses pembelajaran. Ketersediaan buku secara memadai yaitu buku teks pelajaran tersedia 1 eksemplar/mata pelajaran/peserta didik ditambah dua eksemplar/mata pelajaran/sekolah; Buku Panduan Pendidik, 1 eksemplar/mata pelajaran/guru, ditambah 1 eksemplar/mata pelajaran/sekolah; buku pengayaan sebanyak minimal 840 judul buku per sekolah; buku referensi dan sumber belajar lainnya masing-masing 10 eksemplar per sekolah. Ketersediaan sarana buku dan sumber belajar lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



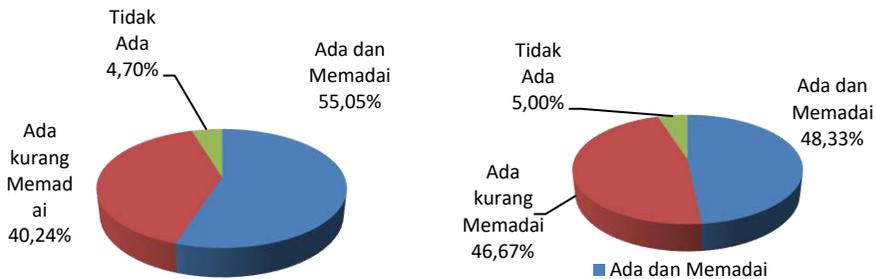
*Gambar 3.22 Grafik Persentase SD dan MI yang Memiliki Buku dan Sumber Belajar Lainnya*

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar SD memiliki buku dan sumber belajar lainnya namun kurang memadai yaitu sebanyak 74,00% atau sebanyak 425 SD. Sedangkan SD yang memiliki buku dan sumber belajar lainnya yang memadai sebanyak 21,64% atau 124 SD, dan SD yang tidak memiliki buku dan sumber belajar lainnya sebanyak 4,36% atau sebanyak 25 SD. Sedangkan MI yang memiliki Buku dan sumber lainnya kurang memadai sebesar 64,17% atau sebesar 77 MI.

(5) Bahan Habis Pakai, serta Perlengkapan Lain yang Diperlukan Untuk Menunjang Proses Pembelajaran yang Teratur dan Berkelanjutan

## Pendidikan di Jepara

Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif singkat. Bahan habis pakai di Sekolah Dasar berupa Kertas, tinta, bahan laboratorium seperti asam sulfat, HCL, Acetokarmin, eosin, etanol dan lain-lain yang dibutuhkan saat percobaan. Secara ideal bahan habis pakai oleh pihak sekolah disediakan per tahun. Gambaran ketersediaan bahan habis pakai dan peralatan lainnya untuk menunjang proses pembelajaran teratur dan berkelanjutan terlihat pada gambar berikut :



SD dengan Bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan Untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan

MI dengan Bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan Untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan

*Gambar 3.23 Grafik Persentase SD dan MI yang Memiliki Bahan Habis Pakai dan Peralatan Lain untuk Menunjang Pembelajaran Teratur dan Berkelanjutan*

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar SD memiliki Bahan Habis Pakai dan Peralatan Lain untuk Menunjang Pembelajaran Teratur dan Berkelanjutan namun kurang memadai yaitu sebanyak 40,24% atau sebanyak 231 SD. Sedangkan SD yang memiliki bahan habis pakai dan peralatan lain untuk menunjang pembelajaran teratur dan berkelanjutan yang memadai sebanyak 55,05% atau 316 SD dan SD yang tidak

memiliki bahan habis pakai dan peralatan lain untuk menunjang pembelajaran teratur dan berkelanjutan sebanyak 4,70% atau sebanyak 27 SD. Sedangkan MI yang memiliki bahan habis pakai dan peralatan lain untuk menunjang pembelajaran teratur dan berkelanjutan kurang memadai sebanyak 46,67% atau sebanyak 56 MI.

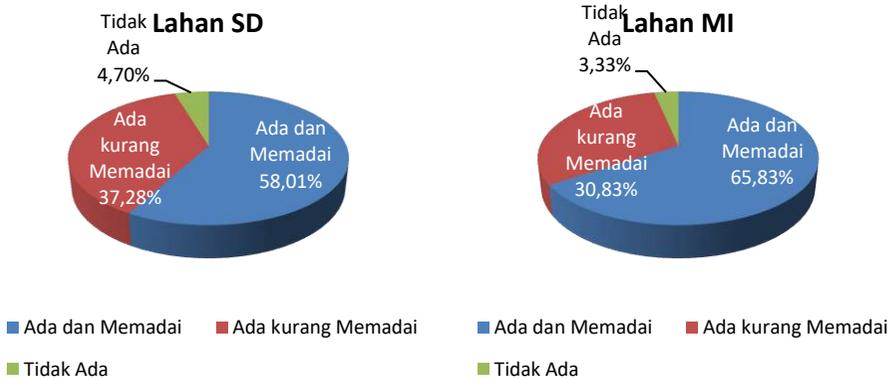
c) Prasarana

Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Prasarana tersebut adalah lahan, ruang kelas dengan perabotan meubelair, ruang perpustakaan, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, WC Guru, WC perempuan dan WC laki-laki.

(1) Lahan

Lahan sekolah adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana sekolah meliputi bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat. Standar lahan pada Sekolah Dasar sesuai Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana setiap sekolah seharusnya memiliki luas lahan minimal sebesar 1.340 m<sup>2</sup> untuk SD dengan rombongan belajar 6. Kondisi ketercukupan luas lahan SD dan MI di Kabupaten Jepara terlihat pada gambar di bawah ini.

## Pendidikan di Jepara

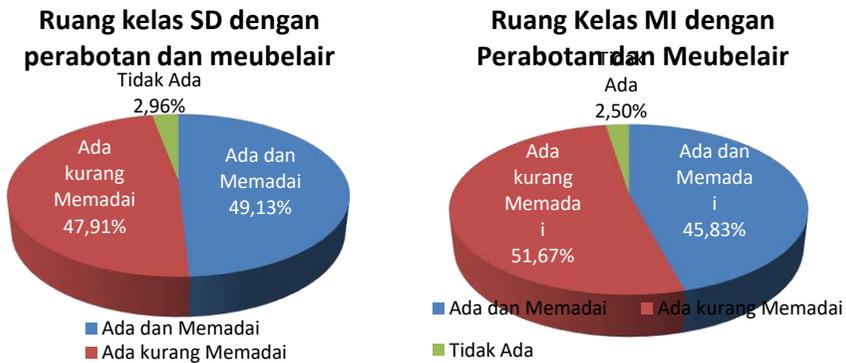


*Gambar 3.24 Grafik Persentase SD dan MI yang Memiliki Lahan Minimal 1.340 m<sup>2</sup>*

Dari data di atas diperoleh informasi bahwa sebagian besar SD telah memiliki lahan sesuai dengan standar yaitu sebanyak 58% atau sebanyak 333 SD dan SD yang memiliki lahan kurang memadai sebanyak 37% atau sebanyak 212 SD dan yang tidak memiliki lahan 5 % atau sebanyak 29 SD. Sedangkan MI, lahan kurang memadai sebesar 30,83% atau sebesar 37 MI.

### (2) Ruang Kelas dengan Perabotan dan Meubelair

Hasil pendataan menunjukkan bahwa 49,13% atau sebanyak 282 SD memiliki ruang kelas yang memadai. Sebesar 47,91% atau sebanyak 275 SD memiliki ruang kelas kurang memadai dan sebanyak 2,96% ruang kelas tidak memadai (tidak ada) sebanyak 17 SD. Sedangkan MI dengan ruang kelas dengan perabotan dan meubelair kurang memadai sebanyak 51,67% atau sebesar 62 MI. Gambaran tersebut terlihat pada gambar berikut:

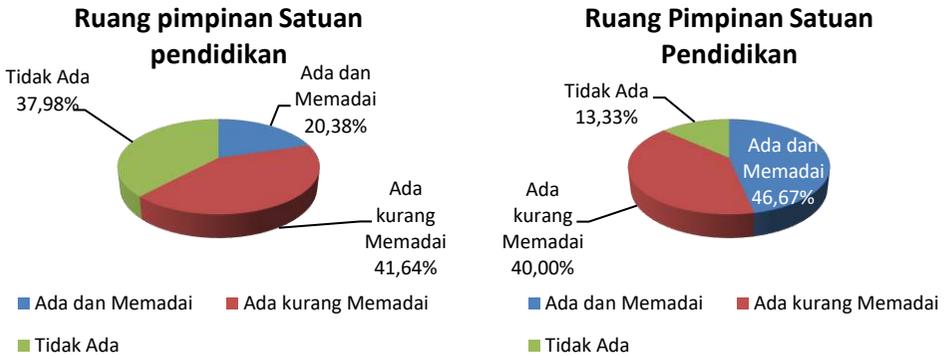


*Gambar 3.25 Grafik Kondisi Ruang Kelas SD dan MI dengan Perabotan Sesuai Standar*

(3) Ruang Pimpinan Satuan pendidikan

SD yang memiliki ruang pimpinan satuan pendidikan yang memadai sebanyak 20,38% atau sebanyak 117 SD. Sedangkan SD yang memiliki ruang pimpinan namun kurang memadai sebanyak 41,64% atau sebanyak 239 SD, dan SD yang tidak memiliki ruang pimpinan sebanyak 37,98% atau sebanyak 218 SD. Sedangkan MI yang memiliki ruang pimpinan kurang memadai sebanyak 40% atau sebesar 48 MI. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak SD dan MI yang belum memiliki ruang pimpinan. Pembangunan ruang pimpinan dapat dilakukan dengan membangun baru atau menggunakan ruang yang telah ada. Kendala utama dalam pembangunan ruang pimpinan adalah pendanaan dan keterbatasan lahan. Gambaran ketersediaan ruang pimpinan pada SD dan MI di Kabupaten Jepara terlihat pada gambar berikut :

## Pendidikan di Jepara

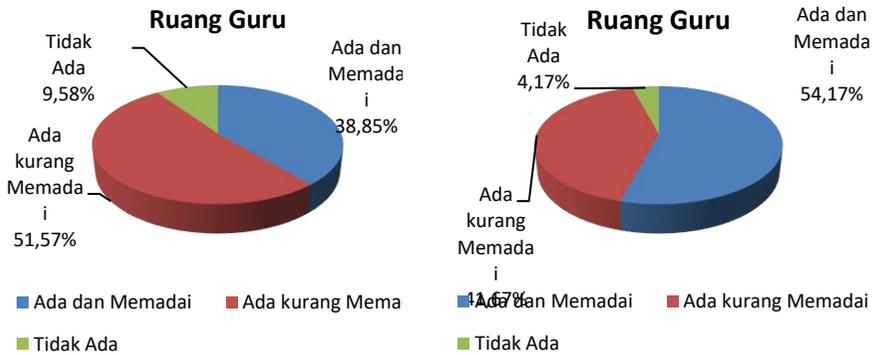


*Gambar 3.26 Grafik Distribusi Kondisi Ketersediaan Ruang Pimpinan SD dan MI*

### (4) Ruang Guru

SD yang memiliki ruang guru yang memadai sebanyak 38,85% atau sebanyak 223 SD. Sedangkan SD yang memiliki ruang guru namun kurang memadai sebanyak 51,57% atau sebanyak 296 SD, dan SD yang tidak memiliki ruang guru sebanyak 9,58% atau sebanyak 55 SD. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak SD yang belum memiliki ruang guru yang memadai. Pembangunan ruang guru dapat dilakukan dengan membangun ruang baru atau menggunakan ruang yang telah ada. Kendala utama dalam pembangunan ruang guru adalah pendanaan dan keterbatasan lahan.

## Membangun Pendidikan Efektif

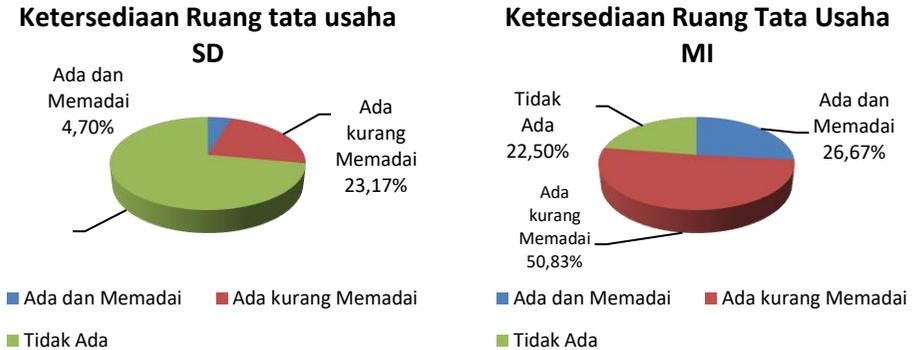


*Gambar 3.27 Grafik Distribusi Kondisi Ketersediaan Ruang Guru SD dan MI*

### (5) Ruang Tata Usaha

Hasil pendataan menunjukkan bahwa SD yang memiliki ruang tata usaha yang memadai sebanyak 4,70% atau sebanyak 27 SD. Sedangkan SD yang memiliki ruang tata usaha namun kurang memadai sebanyak 23,1% atau sebanyak 133 SD dan SD yang tidak memiliki ruang tata usaha sebanyak 72,13% atau sebanyak 414 SD. MI dengan ruang tata usaha yang kurang memadai sebesar 50,83% atau sebesar 61 MI. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak SD yang belum memiliki ruang tata usaha yang memadai. Gambaran ketersediaan ruang tata usaha pada SD dan MI di Kabupaten Jepara terlihat pada gambar berikut:

## Pendidikan di Jepara

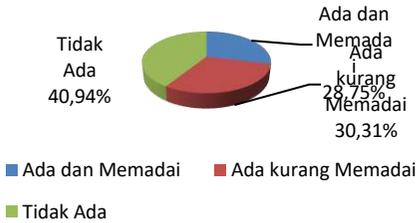


*Gambar 3.28 Grafik Kondisi Ketersediaan Ruang Tata Usaha*

### (6) Ruang Perpustakaan dengan Buku dan Perabot

Hasil Pendataan menunjukkan bahwa SD yang memiliki ruang perpustakaan yang memadai sebanyak 28,75% atau sebanyak 165 SD. Sedangkan SD yang memiliki ruang perpustakaan namun kurang memadai sebanyak 30,31% atau sebanyak 174 SD dan SD yang tidak memiliki ruang perpustakaan sebanyak 40,94% atau sebanyak 235 SD. Sedangkan MI ketersediaan ruang perpustakaan dengan buku dan perabot sebagian besar ada namun kurang memadai yaitu sebesar 58,33% atau sebesar 70 MI. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak SD dan MI yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memadai. Gambaran ketersediaan ruang perpustakaan pada SD dan MI di Kabupaten Jepara terlihat pada gambar berikut :

**SD dgn Ruang Perpustakaan Dengan Buku dan Perbot**



**MI dgn Ruang Perpustakaan Dengan Buku dan Perbot**

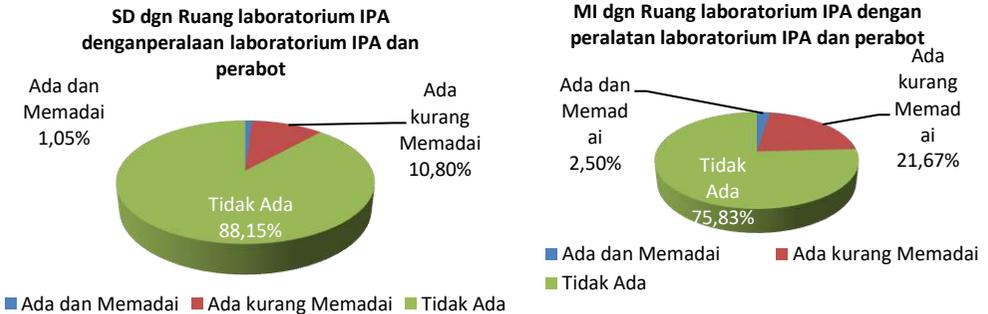


*Gambar 3.29 Grafik Kondisi Ketersediaan Ruang Perpustakaan*

**(7) Ruang Laboratorium IPA dengan Peralatan Laboratorium IPA dan Perabot**

SD yang memiliki ruang laboratorium IPA dengan peralatan yang memadai sebanyak 1,05% atau sebanyak 6 SD. Sedangkan SD yang memiliki ruang laboratorium IPA dengan peralatan laboratorium IPA dan perabot namun kurang memadai sebanyak 10,80% atau sebanyak 62 SD dan SD yang tidak memiliki ruang laboratorium IPA dengan peralatan laboratorium IPA dan perabot sebanyak 80,15% atau sebanyak 460 SD. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak SD yang belum memiliki ruang laboratorium IPA dengan peralatan laboratorium IPA dan perabot yang memadai. Sedangkan MI kondisinya sama dengan SD yaitu MI yang tidak memiliki ruang laboratrium relatif besar yaitu 75,83% atau sebesar 91 MI. Gambaran ketersediaan ruang laboratorium IPA dengan peralatan laboratorium IPA dan perabot pada SD dan MI di Kabupaten Jepara terlihat pada gambar berikut :

## Pendidikan di Jepara



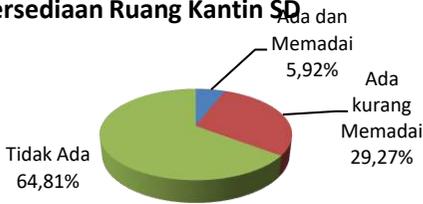
*Gambar 3.30 Grafik Kondisi SD dan MI dengan Ketersediaan Ruang laboratorium IPA dengan Peralatan Laboratorium IPA dan Perabot*

### (8) Ruang Kantin

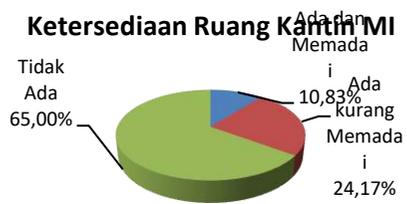
Kantin sehat merupakan unsur penunjang yang penting dalam penyelenggaraan sekolah. Ketersediaan kantin sehat yang diawasi oleh sekolah akan dapat menjamin bahwa peserta didik membeli makanan yang sehat dan tidak berbahaya bagi kesehatan peserta didik. SD yang memiliki ruang kantin yang memadai sebanyak 5,92% atau sebanyak 34 SD. Sedangkan SD yang memiliki ruang kantin namun kurang memadai sebanyak 29,27% atau sebanyak 168 SD dan SD yang tidak memiliki ruang kantin sebanyak 64,81% atau sebanyak 372 SD. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak SD yang belum memiliki ruang kantin yang memadai. Sedangkan MI yang memiliki ruang kantin kurang memadai sebesar 65,00% atau sebesar 78 MI. Gambaran ketersediaan ruang kantin pada SD di Kabupaten Jepara terlihat pada gambar berikut :

## Membangun Pendidikan Efektif

### Ketersediaan Ruang Kantin SD



### Ketersediaan Ruang Kantin MI

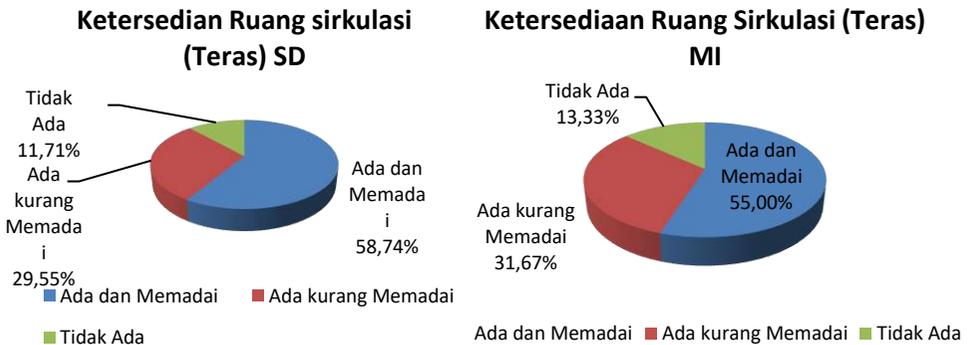


*Gambar 3.31 Grafik Kondisi Ketersediaan Ruang Kantin SD dan MI*

### (9) Ruang Sirkulasi (Teras)

Hasil pendataan menunjukkan bahwa SD yang memiliki ruang sirkulasi yang memadai sebanyak 58,74% atau sebanyak 337 SD. Sedangkan SD yang memiliki ruang sirkulasi namun kurang memadai sebanyak 29,55% atau sebanyak 170 SD dan SD yang tidak memiliki ruang sirkulasi sebanyak 11,71% atau sebanyak 67 SD. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak SD yang belum memiliki ruang sirkulasi yang memadai. Sedangkan MI yang memiliki ruang sirkulasi memadai sebesar 55,00% atau sebesar 66 MI. Gambaran ketersediaan ruang sirkulasi pada SD di Kabupaten Jepara terlihat pada gambar berikut :

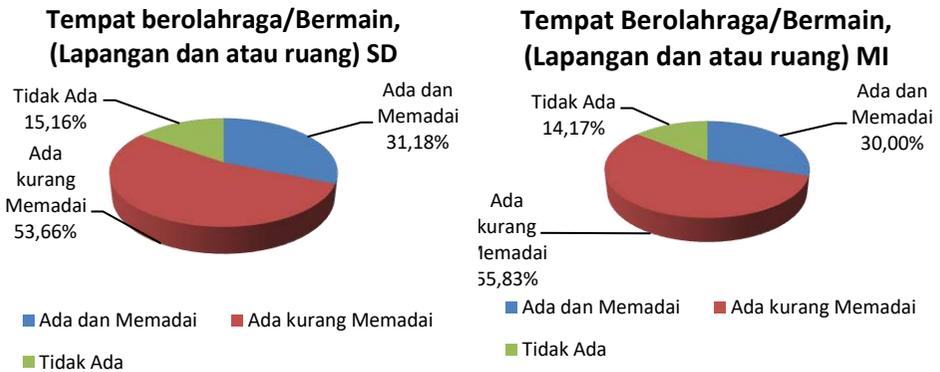
## Pendidikan di Jepara



*Gambar 3.32 Grafik Kondisi Ketersediaan Ruang Sirkulasi SD/MI*

### (10) Tempat Berolahraga/Bermain (Lapangan dan atau ruang)

SD yang memiliki tempat berolahraga/bermain yang memadai sebanyak 31,18% atau sebanyak 179 SD. Sedangkan SD yang memiliki tempat berolahraga/bermain namun kurang memadai sebanyak 53,66% atau sebanyak 308 SD dan SD yang tidak memiliki tempat berolahraga/bermain sebanyak 15,16% atau sebanyak 87 SD. Sedangkan sebagian besar MI juga belum memiliki tempat olahraga/bermain yang memadai. Banyaknya MI yang memiliki tempat olahraga dan bermain kurang memadai sebanyak 55,83% atau sebanyak 67 MI. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak SD dan MI yang belum memiliki tempat berolahraga/bermain yang memadai.

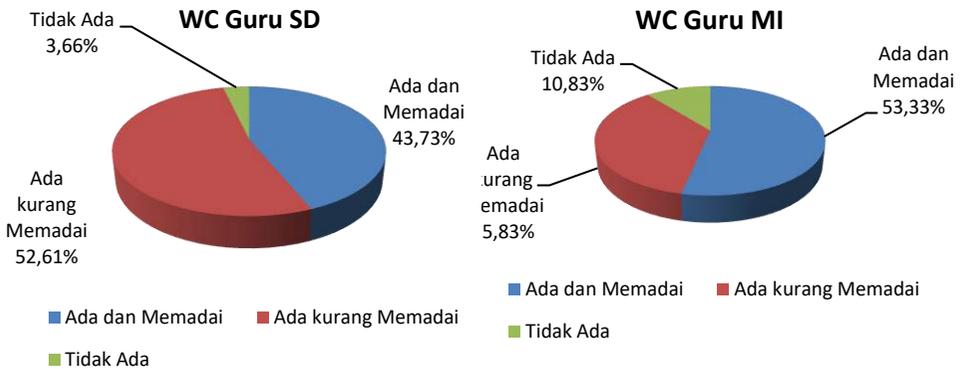


*Gambar 3.33 Grafik Kondisi Ketersediaan Tempat Berolahraga/bermain SD dan MI*

#### (1) WC Guru

Hasil pendataan menunjukkan bahwa SD yang memiliki wc guru yang memadai sebanyak 43,73% atau sebanyak 251SD, sedangkan SD yang memiliki wc guru namun kurang memadai sebanyak 52,61% atau sebanyak 302 SD dan SD yang tidak memiliki wc guru sebanyak 3,66% atau sebanyak 21 SD. Sedangkan untuk MI sebagian besar sekolah sudah memiliki wc guru yang memadai. MI dengan wc guru memadai mencapai sebesar 53,33% atau sebesar 64 MI. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak SD dan MI yang belum memiliki wc guru yang memadai. Gambaran ketersediaan wc guru pada SD dan MI di Kabupaten Jepara terlihat pada gambar berikut :

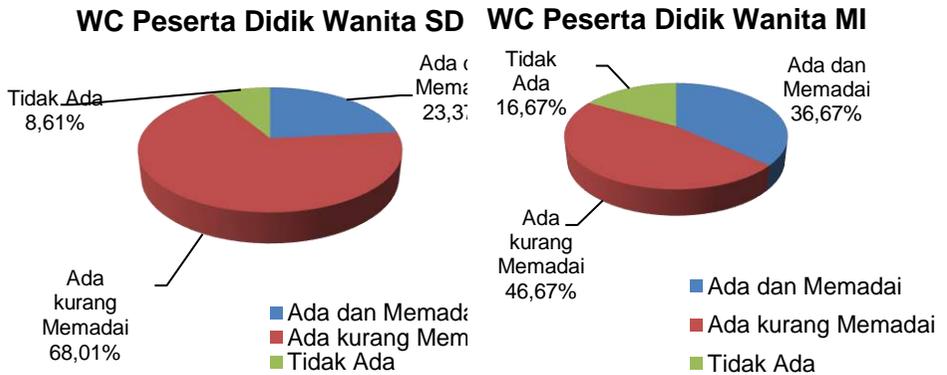
## Pendidikan di Jepara



*Gambar 3.34 Grafik Kondisi Ketersediaan WC Guru SD dan MI*

### (12) WC Peserta Didik Wanita

Hasil pendataan menunjukkan bahwa SD yang memiliki wc peserta didik wanita yang memadai sebanyak 23,37% atau sebanyak 134 SD. Sedangkan SD yang memiliki wc peserta didik wanita namun kurang memadai sebanyak 68,01% atau sebanyak 390 SD dan SD yang tidak memiliki WC peserta didik wanita sebanyak 8,61% atau sebanyak 49 SD. Sebagian besar MI memiliki wc peserta didik wanita yang kurang memadai yaitu sebesar 46,67% atau sebanyak 56 MI. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak SD dan MI yang belum memiliki wc peserta didik wanita yang memadai.

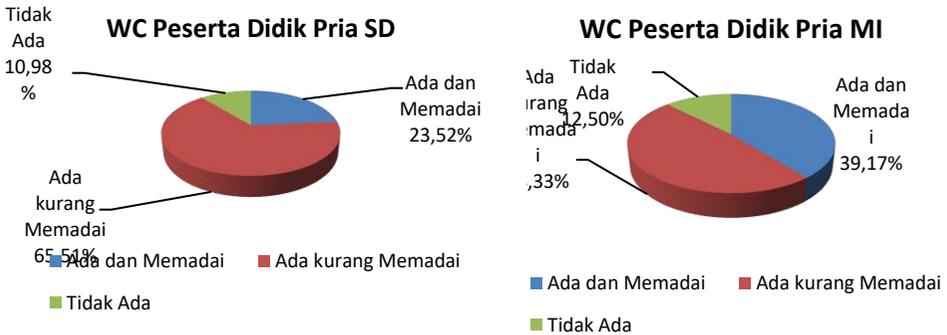


*Gambar 3.35 Grafik Kondisi Ketersediaan WC Peserta Didik Wanita pada SD dan MI*

### (13) WC Peserta Didik Pria

Hasil pendataan menunjukkan bahwa SD yang memiliki wc peserta didik pria yang memadai sebanyak 23,52% atau sebanyak 135 SD. Sedangkan SD yang memiliki wc peserta didik pria namun kurang memadai sebanyak 65,51% atau sebanyak 376 SD dan SD yang tidak memiliki wc peserta didik pria sebanyak 10,98% atau sebanyak 63 SD. Sebagian besar MI memiliki wc peserta didik pria yang kurang memadai, yaitu sebesar 48,33% atau sebanyak 58 MI. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak SD yang belum memiliki wc peserta didik pria yang memadai. Gambaran ketersediaan WC Peserta Didik Pria pada SD di Kabupaten Jepara terlihat pada gambar berikut :

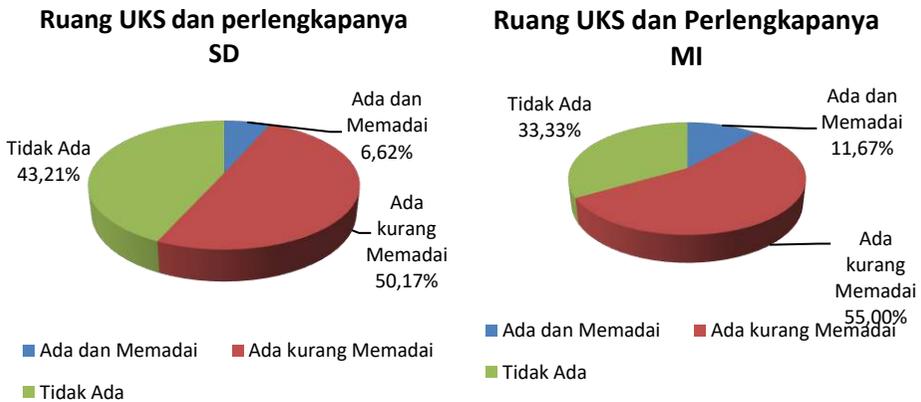
## Pendidikan di Jepara



*Gambar 3.36 Grafik Kondisi Ketersediaan WC Peserta Didik Pria SD dan MI*

### (14) Ruang UKS dan Perlengkapannya

SD yang memiliki ruang UKS dan perlengkapannya yang memadai sebanyak 6,62% atau sebanyak 38 SD, sedangkan SD yang memiliki ruang UKS dan perlengkapannya yang kurang memadai sebanyak 50,17% atau sebanyak 288 SD dan SD yang tidak memiliki ruang UKS dan perlengkapannya sebanyak 43,21% atau sebanyak 248 SD. Sebagian besar MI memiliki ruang UKS dan perlengkapannya yang kurang memadai yaitu sebesar 55,00% atau sebesar 66 MI. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak SD dan MI yang belum memiliki ruang UKS dan perlengkapannya yang memadai.

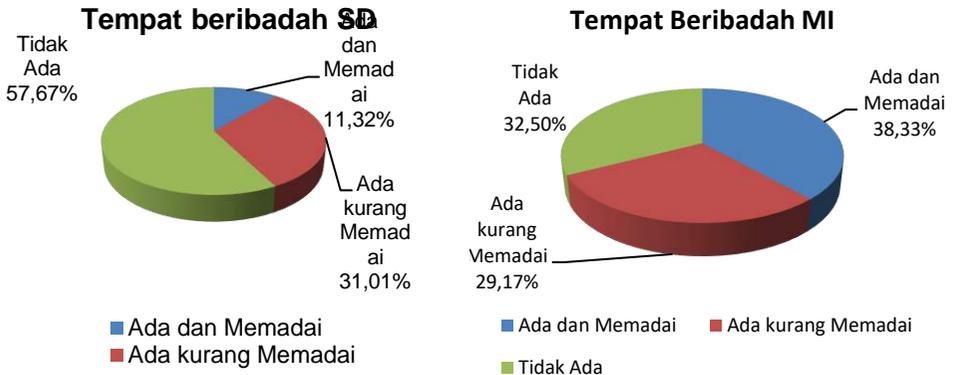


Gambar 3.37 Grafik Kondisi Ketersediaan Ruang UKS dan Perlengkapannya SD dan MI

#### (15) Tempat Beribadah

SD yang memiliki tempat beribadah yang memadai sebanyak 11,32% atau sebanyak 65 SD, sedangkan SD yang memiliki tempat beribadah namun kurang memadai sebanyak 31,01% atau sebanyak 178 SD dan SD yang tidak memiliki tempat beribadah sebanyak 57,67% atau sebanyak 331 SD. Berbeda dengan SD, MI sebagian besar telah memiliki tempat ibadah, karena memang lebih mengedepankan pendidikan agama. MI dengan tempat ibadah kurang memadai sebesar 29,17% atau sebesar 35 MI dan MI yang belum memiliki tempat ibadah sebesar 32,50% atau sebesar 39 MI. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak SD dan MI yang belum memiliki tempat beribadah yang memadai.

## Pendidikan di Jepara

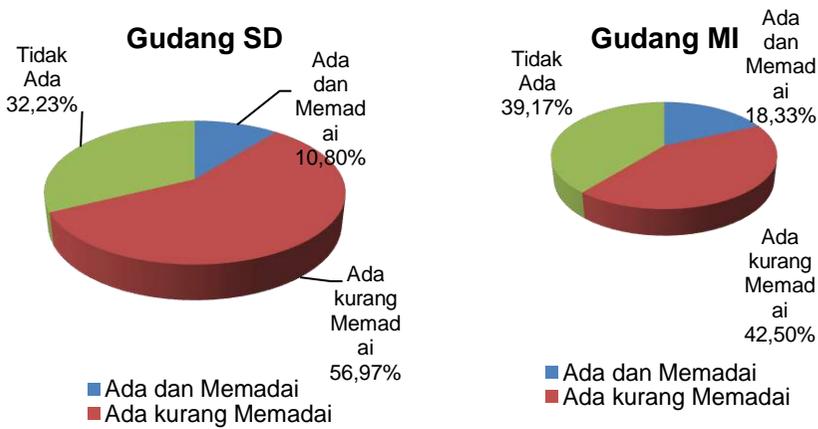


*Gambar 3.38 Grafik Kondisi Ketersediaan Tempat Beribadah SD dan MI*

### (16) Gudang

Hasil pendataan menunjukkan bahwa SD yang memiliki gudang yang memadai sebanyak 10,80% atau sebanyak 62 SD, sedangkan SD yang memiliki gudang namun kurang memadai sebanyak 56,97% atau sebanyak 327 SD dan SD yang tidak memiliki gudang sebanyak 32,23% atau sebanyak 185 SD. Sebagian besar MI memiliki gudang namun belum memadai, namun demikian MI yang belum memiliki gudang juga cukup besar. MI yang memiliki gudang namun belum memadai sebesar 42,50% dan MI yang belum memiliki gudang sebesar 39,17%. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak SD dan MI yang belum memiliki gudang yang memadai. Gambaran ketersediaan gudang pada SD dan MI di Kabupaten Jepara terlihat pada gambar berikut:

## Membangun Pendidikan Efektif



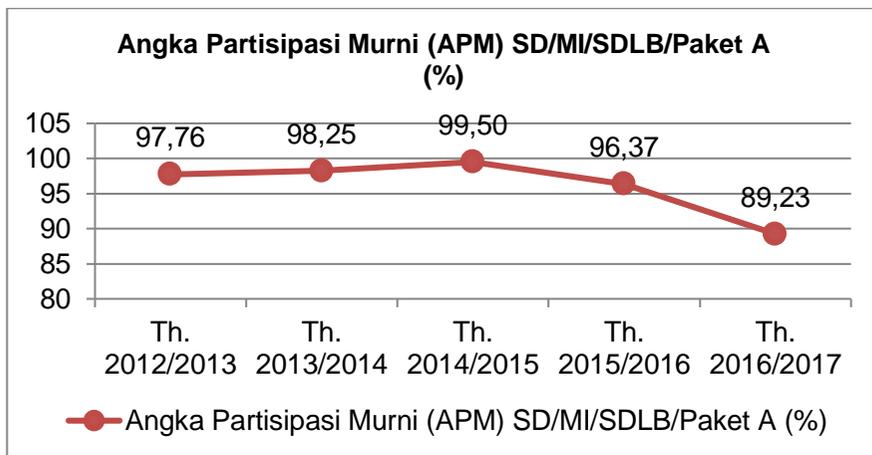
Gambar 3.39 Grafik Kondisi Ketersediaan Gudang

## 2. Keterjangkauan

### a) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Dilihat perkembangannya, capaian APM SD/MI sederajat di Kabupaten Jepara menunjukkan tren menurun. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2014 – 2016) telah terjadi penurunan capaian APM dari 97,76% menjadi 89,63%. Hal ini berarti bahwa terdapat 89,63% penduduk yang berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI. Jika melihat dari target nasional yang ditetapkan dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019, dengan target di tahun 2019 sebesar 83,77%, maka APM Kabupaten Jepara melampaui bahkan menjadi salah satu kabupaten yang berkontribusi positif terhadap pencapaian nasional. Menurunnya APM Kabupaten Jepara pada tahun 2017 antara lain disebabkan pada tahun yang berkenaan cukup banyak anak yang bersekolah di luar Kabupaten Jepara dan penyebab berikutnya dimungkinkan banyaknya anak yang terlambat mendaftar sekolah.

## Pendidikan di Jepara

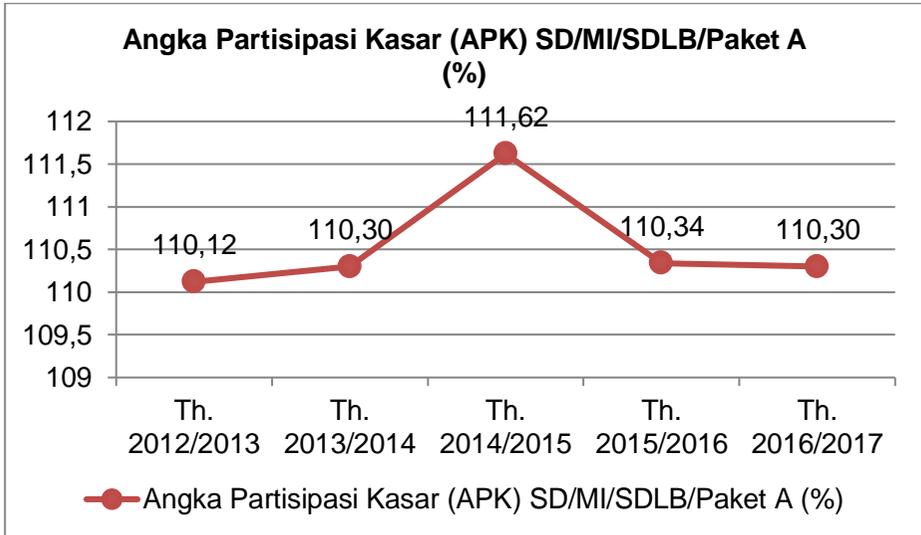


*Gambar 3.40 Perkembangan APM SD/MI, Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016*

### b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu dengan memperhitungkan Pendidikan Non Formal. APK yang semakin tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Tingkat capaian APK SD Kabupaten Jepara pada tahun 2016 sebesar 110,30%, menunjukkan bahwa terdapat 10,30% penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD.

Walaupun dengan melihat capaian di dua tahun akhir menurun, capaian APK SD/MI Kabupaten Jepara jika dibandingkan dengan target nasional pada tahun 2019 sebesar 100,55%, menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

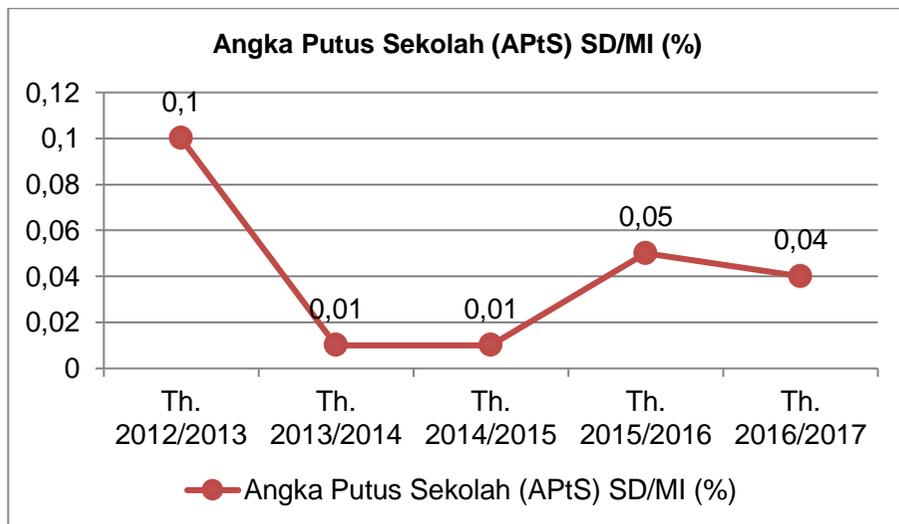


*Gambar 3.41 Perkembangan APK SD/MI, Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016*

c) Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI

Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI di Kabupaten Jepara mengalami perbaikan kinerja yang ditunjukkan dengan penurunan APtS dari 0,1% pada tahun 2012 menjadi 0,04% di tahun 2016. Angka APtS SD/MI pada tahun 2015 sempat mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,05%. Jika dilihat dari target nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan APtS SD/MI di tahun 2019 adalah sebesar 0,57%, maka kinerja penurunan APtS relatif sudah melampaui target dan menjadi salah satu kabupaten sebagai penyumbang positif terhadap penurunan APtS secara nasional.

## Pendidikan di Jepara



*Gambar 3.42 Perkembangan APtS SD/MI, Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016*

### 3. Kualitas

#### a) Angka Kelulusan SD/MI

Angka kelulusan SD pada tahun 2016 pada capaian maksimal 100. Gambaran Angka Kelulusan secara rinci dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3.26.*

*Angka Kelulusan SD/MI Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016*

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,08	99,32	99,32	100	100
AL SD/MI Laki-laki	99,04	99,28	99,24	100	100
AL SD/MI Perempuan	99,12	99,36	99,39	100	100

b) Rata-Rata Nilai Ujian Nasional

Rata-rata nilai ujian nasional Kabupaten Jepara masih memerlukan perhatian lebih jika melihat kondisi lima tahun terakhir. Tercatat rata-rata nilai ujian nasional siswa SD/MI pada tahun 2016 sebesar 6,41 menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2012 yang sudah mencapai 7,00. Target rata-rata nilai ujian nasional siswa SD/MI masih perlu banyak perbaikan, bandingkan jika melihat tahun 2019 sebesar 7,5 masih perlu upaya keras untuk pencapaiannya.

*Tabel 3.27.*  
*Nilai Rata UN SD/MI Kabupaten Jepara*  
*Tahun 2012-2016*

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	7,00	6,87	6,87	6,41	6,41

**4. Kesetaraan**

Kesetaraan adalah kondisi yang menggambarkan bahwa pelayanan pendidikan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, agama, ras dan golongan. Indikator kesetaraan adalah Rasio APK perempuan dan laki-laki serta rasio APM perempuan dan laki-laki. Selama kurun waktu 2012 sampai dengan 2016, rasio APK SD/MI cenderung stabil atau baik. Kabupaten Jepara telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan pendidikan bagi penduduk laki-laki dan perempuan. Hal itu dapat dibuktikan antara lain dengan semakin membaiknya rasio partisipasi pendidikan pada rasio APK SD/MI sebesar 96,63% yang menunjukkan hanya sebesar 3,7% laki-laki lebih banyak di luar usia sekolah SD/MI bersekolah. Sementara itu pada rasio APM SD/MI juga menunjukkan kondisi relatif baik dengan hanya

## Pendidikan di Jepara

0,11% saja laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan pada usia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI.

*Tabel 3.28.*

*Rasio APK dan APM SD/MI Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016*

No	Indikator	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
1.	Rasio APK SD/MI	96,55	96,62	98,07	96,67	96,63
2.	Rasio APM SD/MI	99,56	99,57	99,19	99,32	99,89

### 5. Keterjaminan

Keterjaminan adalah kondisi yang menggambarkan bahwa pelayanan pendidikan memberikan kepastian bahwa peserta didik menjalani proses belajar mengajar atau pembelajaran yang baik. Indikator keterjaminan adalah persentase kualifikasi guru, guru bersertifikasi dan akreditasi sekolah. Standar kualifikasi guru menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan menurut PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah lulus D-IV atau S-1. Dalam lima tahun terakhir, persentase guru SD berkualifikasi sesuai dengan lulusan D-IV/S-1 lebih pada tahun ajaran 2016/2017 sebesar 91,98%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan satuan pendidikan MI yang sebesar 58,78%. Sementara itu capaian kualifikasi tertinggi pada satuan pendidikan SD terjadi pada tahun 2013/2014 dengan kualifikasi guru lulusan D-IV/S-1 lebih sebesar 94,41%, sedangkan untuk MI pada tahun 2014/2015 mencapai sebesar 69,50%.

Menjadi perhatian penting untuk status guru pada MI dilihat dari segi kualifikasi pendidikan karena masih jauh lebih rendah dibandingkan SD. Pentingnya guru memiliki kualifikasi ini agar

### *Membangun Pendidikan Efektif*

setiap guru memiliki keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar mata pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya. Perkembangan ke depan dalam rangka meningkatkan kuantitas guru berkualifikasi sesuai dengan jenjang pendidikan adalah dengan meningkatkan pemanfaatan Universitas Terbuka yang sudah banyak membuka di daerah. Universitas terbuka dapat dimanfaatkan bagi guru-guru untuk melanjutkan status kualifikasinya menjadi lebih tinggi dengan lebih terjangkau karena ada di daerah.

*Tabel 3.29.*

*Persentase Guru SD dan MI Memenuhi Kualifikasi  
Di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016 (%)*

No	Indikator	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
1.	Persentase Guru SD lulus D IV / S1	64,48	94,41	80,08	91,98	91,98
2.	Persentase Guru MI lulus D IV / S1	62,37	63,80	69,50	58,78	58,78

Dalam rangka meningkatkan kompetensi guru sebagai tenaga pengajar, pemerintah telah melaksanakan kebijakan sertifikasi guru. Kegiatan sertifikasi guru ini merupakan sebuah proses uji kompetensi bagi guru dalam rangka meningkatkan kapasitas ataupun kompetensi sesuai dengan status profesinya sebagai tenaga pengajar. Persentase guru yang sudah mendapatkan sertifikasi di Kabupaten Jepara pada tahun 2017 sebesar 55,45%, sedangkan untuk satuan pendidikan MI baru sebesar 6,71%. Proses sertifikasi ini memang tidak mudah, membutuhkan proses yang rumit dan sistematis dalam pelaksanaannya. Melalui proses sertifikasi ini diharapkan dapat berujung pada peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan guru dan kesejahteraan guru.

## Pendidikan di Jepara

*Tabel 3.30.*

*Persentase Guru SD dan MI Bersertifikasi  
di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016 (%)*

No	Indikator	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
1.	Persentase guru SD bersertifikasi	19,46	55,34	66,80	55,45	55,45
2.	Persentase guru MI bersertifikasi	NA	NA	8,04	6,71	6,71

Pada tahun 2016, status guru SD berdasarkan kepegawaian untuk PNS menunjukkan peningkatan signifikan, jika dibandingkan periode tahun 2012-2014 yang memiliki kecenderungan menurun. Sementara itu untuk status guru PNS pada satuan pendidikan MI walaupun jumlahnya sedikit karena secara umum berstatus swasta, namun pada MI Negeri trennya meningkat. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*Tabel 3.31.*

*Perkembangan Jumlah Guru SD dan MI di Kabupaten Jepara  
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2012-2016*

No	Status Kepegawaian Guru SD dan MI	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
1	Sekolah Dasar (SD)					
	PNS	3.845	3.344	3.006	5.279	5.279
	Non PNS	2.565	2.930	2.653	2.653	2.653
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)					
	PNS	165	165	138	189	189
	Non PNS	2.312	2.302	2.131	2.494	2.494

### *Membangun Pendidikan Efektif*

Dilihat ketersediaan guru berdasarkan status kepegawaian, pada satuan pendidikan SD status guru sebagian besar adalah PNS yaitu sebesar 66,55% dan 33,45% adalah non PNS. Jika dikurangi dengan kepala sekolah, maka status guru PNS ditingkat SD jika dibandingkan dengan jumlah SD di Kabupaten Jepara rata-rata setiap SD sebanyak 7-8 guru PNS. Jika dibandingkan dengan jumlah guru kelas yang sebanyak 3.180 maka rata-rata setiap SD sebanyak 5 guru kelas. Namun kondisi yang terjadi saat ini penyebaran guru tidak merata, sebagian besar guru banyak berkonsentrasi diperkotaan dan masih banyak sekolah di perdesaan dengan status guru PNS hanya 1 orang.

Persebaran jumlah guru berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*Tabel 3.32.*

*Persebaran Jumlah Guru SD dan MI di Kabupaten Jepara Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2016*

No	Kecamatan	Sekolah Dasar			Madrasah Ibtidaiyah		
		Jumlah Sekolah	Status Guru PNS	Status Guru Non PNS	Jumlah Sekolah	Status Guru PNS	Status Guru Non PNS
1	Kedung	34	253	135	17	10	229
2	Pecangaan	39	376	132	6	3	69
3	Welahan	47	405	180	2	3	21
4	Mayong	46	383	221	10	10	123
5	Nalumsari	41	357	133	11	8	110
6	Batealit	37	263	138	18	34	184
7	Tahunan	43	717	182	15	8	189
8	Jepara	42	308	231	3	2	36
9	Mlonggo	35	356	245	16	9	174
10	Bangsri	40	347	197	21	7	291

## Pendidikan di Jepara

No	Kecamatan	Sekolah Dasar			Madrasah Ibtidaiyah		
		Jumlah Sekolah	Status Guru PNS	Status Guru Non PNS	Jumlah Sekolah	Status Guru PNS	Status Guru Non PNS
11	Keling	37	283	143	22	10	235
12	Karimunjawa	14	116	28	0	0	0
13	Kalinyamatan	39	329	202	1	0	10
14	Kembang	43	338	193	11	15	120
15	Donorojo	31	247	141	17	11	198
16	Pakis Aji	27	201	152	12	59	505
	Jumlah	595	5279	2653	182	189	2494

Berdasarkan status akreditasi sekolah, jumlah SD yang sudah terakreditasi sebanyak 595 sekolah dengan rincian 305 SD status akreditasi A, sebanyak 264 SD status akreditasi B dan sebanyak 4 SD dengan status akreditasi C. Masih terdapat 22 sekolah yang belum mengikuti akreditasi. Sementara itu pada satuan pendidikan MI, jumlah sekolah yang sudah mengikuti akreditasi sebanyak 185 MI, yang terdiri dari 93 MI status akreditasi A, sebanyak 78 MI status akreditasi B dan sebanyak 2 MI status akreditasi C. Pada satuan pendidikan MI masih terdapat 7 sekolah yang belum mengikuti akreditasi. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*Tabel 3.33.*

*Status Akreditasi Sekolah SD dan MI di Kabupaten Jepara Tahun 2017*

No	Satuan Pendidikan	Jumlah	Status Akreditasi			
			A	B	C	Belum
1	Sekolah Dasar	595	305	264	4	22
2	Madrasah Ibtidaiyah	182	93	78	2	7

Status akreditasi akan didapatkan oleh sekolah jika keadaan sekolah yang sebenarnya telah memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan. Begitu juga sebaliknya jika keadaan sekolah yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan maka tidak akan mendapatkan status akreditasi. Status akreditasi memiliki batasan waktu berlaku dan diklasifikasikan menjadi kategori A, B dan C. Penilaian akreditasi berdasarkan kategori penilaian dapat dilihat berikut :

A : (Amat Baik) dengan nilai antara 86-100;

B : (Baik) dengan nilai antara 71-85;

C : (Cukup) dengan nilai antara 56-70.

Catatan : Jika nilai tersebut kurang dari 56 maka sekolah tersebut tidak layak untuk mendapatkan pengakuan “terakreditasi”. Status penilaian akreditasi juga memiliki batas waktu yang ditetapkan sehingga pada periode tertentu perlu diperbaharui.

### **c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)**

#### **1. Ketersediaan**

##### **a) Jumlah Sekolah SMP/MTs**

Pendidikan dasar pada satuan pendidikan SMP di Kabupaten Jepara pada tahun 2012 terdiri dari SMP sebanyak 80 sekolah, kondisi ini terus meningkat hingga pada tahun 2016 jumlah SMP di Kabupaten Jepara menjadi sebanyak 86 sekolah. Masing-masing kecamatan di Kabupaten Jepara telah memiliki SMP dengan jumlah yang beragam antara 2-10 SMP yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Jepara. Berikut jumlah persebaran SMP di Kabupaten Jepara menurut kecamatan:

## Pendidikan di Jepara

Tabel 3.34.

*Persebaran Jumlah SMP di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016  
Dirinci Menurut Kecamatan*

No.	Kecamatan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
1	Kedung	8	8	8	8	8
2	Pecangaan	6	6	6	6	6
3	Welahan	3	3	3	4	4
4	Mayong	5	5	5	6	6
5	Nalumsari	5	5	5	5	5
6	Batealit	7	7	7	8	8
7	Tahunan	4	4	4	4	4
8	Jepara	9	9	10	10	10
9	Mlonggo	4	5	4	5	5
10	Bangsri	7	7	7	8	8
11	Keling	6	6	6	6	6
12	Karimunjava	2	2	2	2	2
13	Kalinyamatan	4	4	4	4	4
14	Kembang	4	4	4	4	4
15	Donorojo	3	3	3	3	3
16	Pakis Aji	3	3	3	3	3
Jumlah		80	81	81	86	86

Sementara itu pendidikan dasar pada satuan pendidikan MTs di Kabupaten Jepara pada tahun 2012 terdiri dari MTs sebanyak 100 sekolah, kondisi ini mengalami jumlah yang fluktuatif dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Kondisi terakhir jumlah MTs di Kabupaten Jepara sebanyak 104 sekolah. Masing-masing kecamatan di Kabupaten Jepara telah memiliki MTs dengan jumlah yang beragam antara 1-11 MTs yang tersebar di 16 keca-

### *Membangun Pendidikan Efektif*

matan di Kabupaten Jepara. Kecamatan dengan jumlah MTs sedikit ada di Kecamatan Karimunjawa sebanyak 1 sekolah, dan kecamatan dengan jumlah MTs terbanyak ada di Kecamatan Kedung dengan jumlah MTs sebanyak 13 sekolah. Berikut jumlah persebaran MTs di Kabupaten Jepara menurut kecamatan :

*Tabel 3.35.*

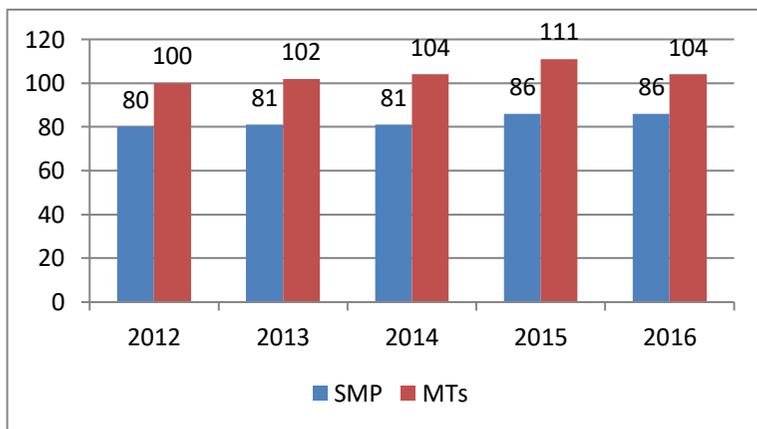
*Persebaran Jumlah MTs di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016  
Dirinci Menurut Kecamatan*

No	Kecamatan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
1	Kedung	13	13	13	14	13
2	Pecangaan	4	4	4	4	4
3	Welahan	4	4	5	5	5
4	Mayong	7	6	6	6	6
5	Nalumsari	5	5	5	8	5
6	Batealit	7	7	7	5	7
7	Tahunan	7	7	8	6	8
8	Jepara	1	1	1	9	1
9	Mlonggo	6	6	6	2	6
10	Bangsri	11	11	11	6	11
11	Keling	10	10	10	6	10
12	Karimunjawa	1	1	1	14	1
13	Kalinyamatan	5	5	5	6	5
14	Kembang	5	6	6	9	6
15	Donorojo	9	10	10	10	10
16	Pakis Aji	5	6	6	1	6
Jumlah		100	102	104	111	104

Apabila dibandingkan, jumlah SMP dan MTs di Kabupaten Jepara mengalami pertumbuhan meskipun tidak secara signifikan. Jumlah MTs lebih banyak dibandingkan jumlah SMP, di

## Pendidikan di Jepara

mana pada tahun 2016 jumlah MTs sebanyak 104 sekolah dan jumlah SMP sebanyak 86 sekolah. Berikut perbandingan jumlah SMP dan MTs di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016.



*Gambar 3.43 Perbandingan Jumlah SMP dan MTS di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016*

### b) Jumlah Siswa SMP/ MTs

Jumlah siswa pada satuan pendidikan SMP dari tahun 2012-2016 mengalami perkembangan fluktuatif, data menunjukkan bahwa jumlah siswa SMP pada tahun 2012 sebanyak 27.984 siswa, pada tahun 2016 sebanyak 30.200 siswa. Pada tahun 2016 jumlah siswa terbanyak ada di Kecamatan Jepara dengan jumlah siswa 5.348 siswa dan paling sedikit di Kecamatan Karimunjawa dengan jumlah 241 siswa. Gambaran secara rinci jumlah siswa SMP tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.36.*

*Persebaran Jumlah Siswa SMP di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016  
Di rinci Menurut Kecamatan*

### Membangun Pendidikan Efektif

No	Kecamatan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
1	Kedung	1.382	1.624	1.517	1.766	1.538
2	Pecangaan	2.259	2.659	2.715	3.552	2.850
3	Welahan	2.008	1.827	1.995	2.517	2.014
4	Mayong	2.275	2.519	2.384	2.816	2.553
5	Nalumsari	1.538	1.669	1.499	1.955	1.394
6	Batealit	1.531	1.787	1.662	2.396	1.707
7	Tahunan	1.431	1.742	1.569	4.490	1.379
8	Jepara	4.667	5.205	5.253	5.506	5.348
9	Mlonggo	1.197	1.384	1.236	2.183	1.276
10	Bangsri	2.845	3.254	3.306	3.393	3.178
11	Keling	1.357	1.496	638	1.643	1.291
12	Karimunjawa	260	47	257	246	241
13	Kalinyamatan	1.704	1.949	1.845	2.011	1.737
14	Kembang	1.696	1.515	1.696	2.157	1.764
15	Donorojo	1.091	1.269	1.047	1.249	994
16	Pakis Aji	743	955	822	1.032	936
	Jumlah	27.984	30.901	29.441	38.912	30.200

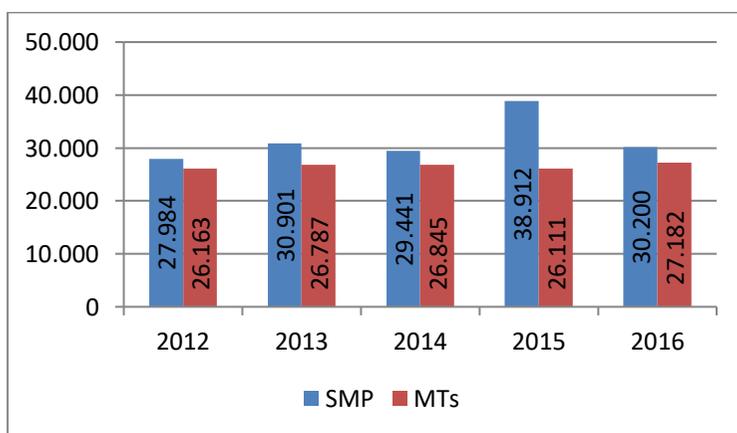
Jumlah siswa pada satuan pendidikan MTs dari tahun 2012-2016 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, data menunjukkan bahwa jumlah siswa MTs pada tahun 2012 sebanyak 26.163 siswa, pada tahun 2016 sebanyak 27.182 siswa. Gambaran secara rinci jumlah siswa MTs tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.37.*

*Persebaran Jumlah Siswa MTs di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016  
Dirinci Menurut Kecamatan*

## Pendidikan di Jepara

No	Kecamatan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
1	Kedung	3.328	3.394	3.150	3.022	3.150
2	Pecangaan	1.184	1.207	1.230	1.209	1.230
3	Welahan	1.015	1.105	1.175	1.670	1.175
4	Mayong	1.932	1.970	1.885	1.065	1.885
5	Nalumsari	2.078	2.120	2.367	1.885	2.367
6	Batealit	2.374	2.421	2.289	2.145	2.289
7	Tahunan	1.723	1.758	1.872	2.421	1.872
8	Jepara	394	402	350	1.824	350
9	Mlonggo	2.199	2.243	2.148	343	2.148
10	Bangsri	2.668	2.751	2.738	2.011	2.738
11	Keling	1.454	1.484	1.656	1.061	1.656
12	Karimunjawa	178	182	154	3.130	154
13	Kalinyamatan	1.782	1.818	1.737	978	1.737
14	Kembang	887	905	1.047	1.690	1.047
15	Donorojo	1.743	1.778	1.781	1.538	1.781
16	Pakis Aji	1.224	1.249	1.266	119	1.603
Jumlah		26.163	26.787	26.845	26.111	27.182



*Gambar 3.44 Perbandingan Jumlah Siswa SMP dan MTs di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016*

Apabila dibandingkan, jumlah siswa SMP dan MTS di Kabupaten Jepara mengalami pertumbuhan meskipun tidak secara signifikan. Pada tahun 2016 jumlah siswa SMP lebih banyak dibandingkan jumlah siswa MTs, di mana jumlah siswa SMP sebanyak 30.200 siswa dan untuk siswa MTs sebanyak 27.182 siswa. Berikut perbandingan jumlah siswa SMP dan MTs di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016.

c) Jumlah Guru SMP/ MTs

Jumlah guru pada satuan pendidikan SMP dari tahun 2012-2016 mengalami perkembangan fluktuatif, data menunjukkan bahwa jumlah guru SMP pada tahun 2012 sebanyak 1.968 guru, pada tahun 2016 sebanyak 1.896 guru. Pada tahun 2016 jumlah guru terbanyak berada di Kecamatan Jepara dengan jumlah 285 guru dan paling sedikit di Kecamatan Karimunjawa dengan jumlah 23 guru. Gambaran secara rinci jumlah guru SMP tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.38.*

*Persebaran Jumlah Guru SMP di Kabupaten Jepara Tahun 2013-2017 Di rinci Menurut Kecamatan*

No	Kecamatan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
1	Kedung	159	152	141	113	141
2	Pecangaan	175	163	171	134	171
3	Welahan	105	122	103	100	103
4	Mayong	147	149	142	142	142
5	Nalumsari	111	132	109	93	109
6	Batealit	131	123	131	116	131
7	Tahunan	92	125	89	82	89
8	Jepara	279	259	285	270	285

## Pendidikan di Jepara

No	Kecamatan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
9	Mlonggo	93	138	87	90	87
10	Bangsri	185	226	194	150	194
11	Keling	118	113	87	82	87
12	Karimunjava	28	44	23	21	23
13	Kalinyamatan	111	145	112	96	112
14	Kembang	91	112	91	93	91
15	Donorojo	84	93	80	56	80
16	Pakis Aji	59	93	51	45	51
Jumlah		1.968	2.189	1.896	1.683	1.896

Jumlah guru pada satuan pendidikan MTs dari tahun 2012-2016 mengalami perkembangan jumlah yang fluktuatif cenderung menurun. Jumlah guru MTs pada tahun 2012 sebanyak 2.320 guru, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebanyak 2.142 guru. Gambaran secara rinci jumlah guru MTs tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.39.*

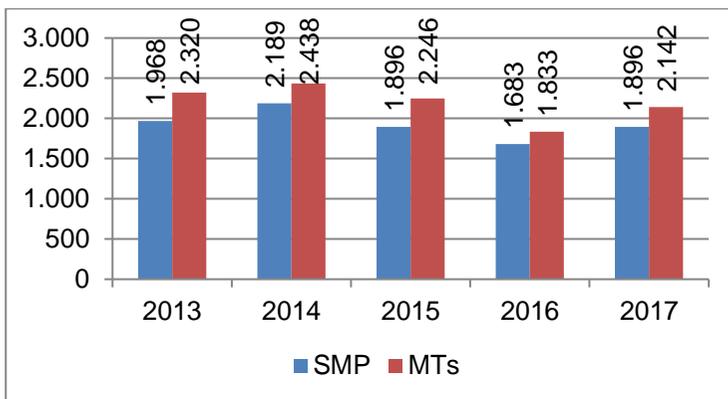
*Persebaran Jumlah Guru MTS di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016  
Dirinci Menurut Kecamatan*

No	Kecamatan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
1	Kedung	335	352	313	232	300
2	Pecangaan	108	113	97	78	93
3	Welahan	91	96	96	113	91
4	Mayong	130	135	151	104	145
5	Nalumsari	137	143	132	127	127
6	Batealit	176	186	170	126	163
7	Tahunan	160	169	158	143	150
8	Jepara	26	27	27	130	26

### Membangun Pendidikan Efektif

No	Kecamatan	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017
9	Mlonggo	166	175	131	24	125
10	Bangsri	265	278	241	120	230
11	Keling	170	178	170	88	160
12	Karimunjawa	21	23	21	195	20
13	Kalinyamatan	135	141	140	68	135
14	Kembang	100	104	114	121	108
15	Donorojo	190	201	170	146	160
16	Pakis Aji	110	117	115	18	109
Jumlah		2.320	2.438	2.246	1.833	2.142

Apabila dibandingkan, jumlah guru SMP dan MTS di Kabupaten Jepara mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat untuk guru SMP pada tahun 2012 sebanyak 1.968 guru menjadi 1.896 guru pada tahun 2017. Untuk guru MTs pada tahun 2012 sebanyak 2.320 orang menjadi 2.142 orang pada tahun 2016. Salah satu faktor berkurangnya jumlah guru dikarenakan sudah memasuki purna tugas/ pensiun. Berikut perbandingan jumlah guru SMP dan MTS di Kabupaten Jepara tahun 2012-2016.



## Pendidikan di Jepara

*Gambar 3.45 Perbandingan Jumlah Guru SMP dan MTS di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016*

### d) Sarana Prasarana

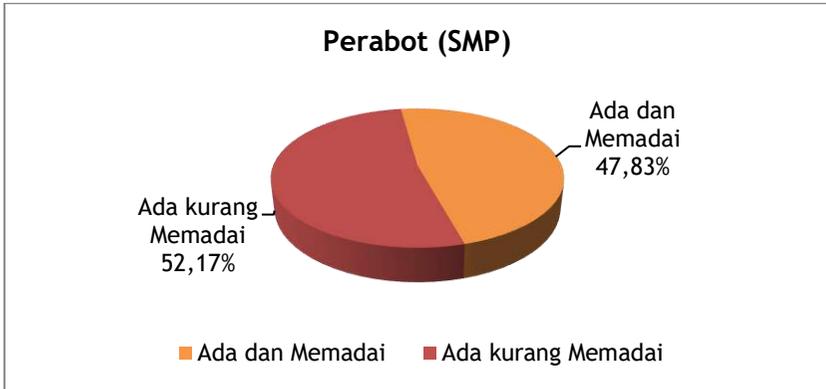
Pemenuhan sarana pendidikan dasar tingkat SMP diwujudkan melalui ketersediaan perabot sekolah, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, serta bahan habis pakai dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dilihat berdasarkan trennya, ruang kelas dalam kondisi baik pada satuan pendidikan SMP/MTs trennya semakin membaik dilihat dalam lima tahun terakhir, yaitu tahun 2012 sebesar 75% dan tahun 2016 sebesar 81,8%. Namun jika dilihat dalam dua tahun terakhir menunjukkan penurunan yang dilihat dari capaian tahun 2015 sudah mencapai 85%. Secara rinci perkembangan ruang kelas dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.40.*

*Perkembangan Ruang Kelas dalam Kondisi Baik di Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2016*

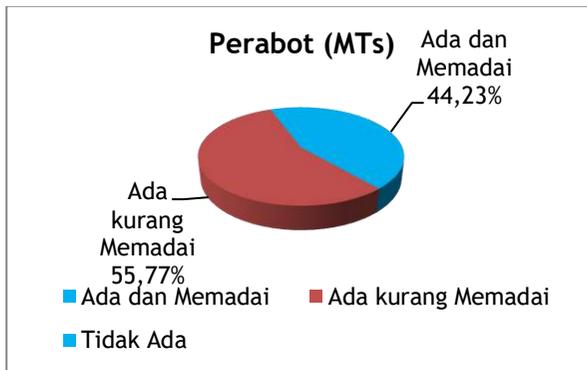
No	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	75	80	85	85	81,8

Berdasarkan hasil penelitian kondisi sarana dan prasarana berdasarkan SNP di tahun 2016 pada sekolah menengah pertama, ketersediaan perabot sebagai penunjang pendidikan telah tersedia. Data menunjukkan sebagian besar yaitu sebesar 52,17% mengatakan tersedia namun kurang memadai dan sebesar 47,83% ada dan memadai.



Gambar 3.46 Ketersediaan Perabot Sekolah Pada Satuan Pendidikan SMP

Pada satuan pendidikan keagamaan setingkat SMP, yaitu MTS menunjukkan ketersediaan perabot sekolah sebesar 55,77% mengatakan ada namun kurang memadai, sebesar 44,23% ada dan memadai.



Gambar 3.47 Ketersediaan Perabot Sekolah Pada Satuan Pendidikan MTs

Dari sisi ketersediaan peralatan di satuan pendidikan SMP menunjukkan sebagian besar telah memiliki. Namun berdasarkan hasil kajian, SMP dengan tingkat ketersediaan peralatan ada

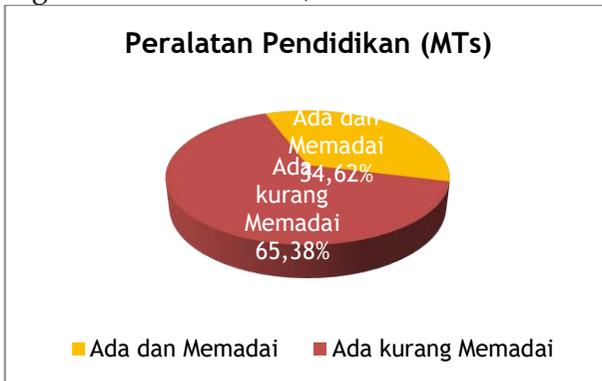
## Pendidikan di Jepara

dan memadai lebih sedikit yaitu sebesar 45,64% dibandingkan dengan kondisi peralatan yang memadai sebanyak 54,36%.



*Gambar 3.48 Ketersediaan Peralatan Sekolah Pada Satuan Pendidikan SMP*

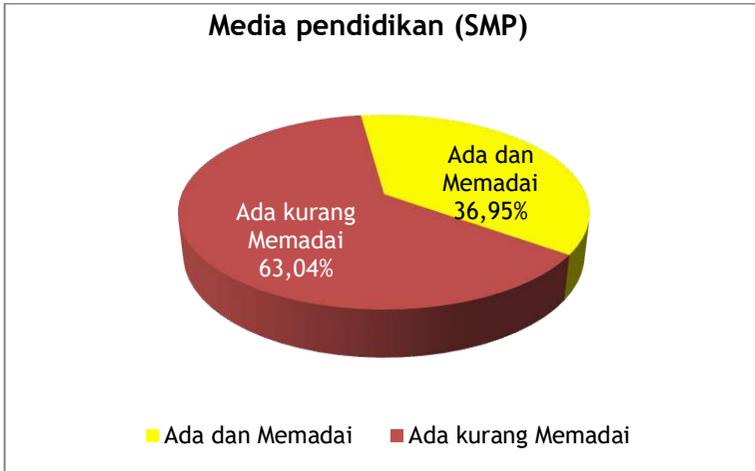
Pada satuan pendidikan keagamaan yaitu MTs, sekolah dengan kondisi peralatan yang memadai menunjukkan capaian sebesar 34,62% jauh lebih kecil dengan kondisi peralatan yang ada dan kurang memadai sebesar 65,38%.



*Gambar 3.49 Ketersediaan Perabot Sekolah Pada Satuan Pendidikan MTs*

### *Membangun Pendidikan Efektif*

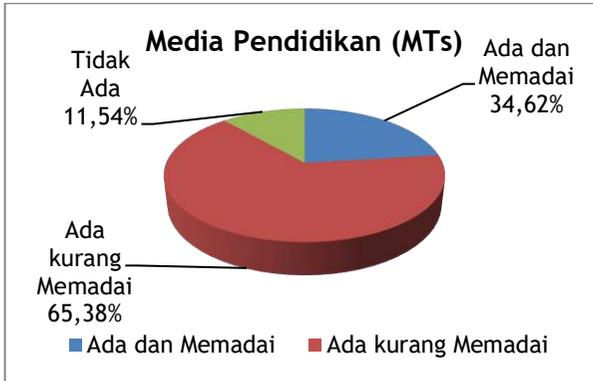
Ketersediaan media pendidikan pada satuan pendidikan SMP menunjukkan sebagian besar sudah memiliki namun kondisinya kurang memadai, tercatat sebesar 63,04%. SMP dengan media pendidikan yang sudah ada dan memadai mencapai 36,95%.



*Gambar 3.50 Ketersediaan Sarana Media Pendidikan Pada Satuan Pendidikan SMP*

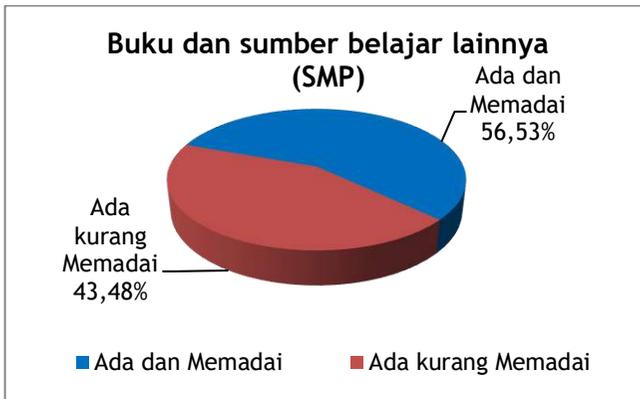
Pada satuan pendidikan MTs menunjukkan sebagian besar sudah memiliki namun kondisinya kurang memadai, tercatat sebesar 63,38% dan MTs dengan media pendidikan yang sudah ada dan memadai mencapai 23,08%. Sedangkan terdapat 11,54% dengan MTs yang belum memiliki media pendidikan.

## Pendidikan di Jepara



Gambar 3.51 Ketersediaan Sarana Media Pendidikan Pada Satuan Pendidikan MTs

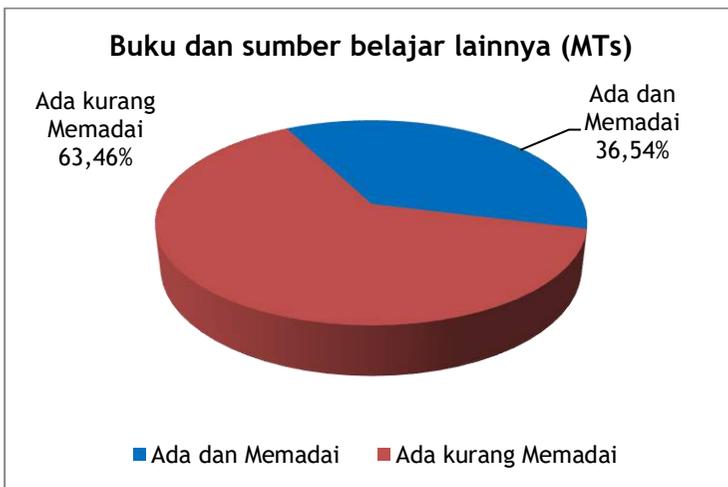
Buku merupakan bagian terpenting dalam penyediaan sarana pendidikan. Ketersediaan buku menjadi salah satu pendukung utama dalam proses belajar dan mengajar. Berdasarkan hasil kajian pada satuan pendidikan SMP, di Kabupaten Jepara menunjukkan ketersediaan buku dan sumber lainnya sebagai bahan ajar di sekolah menunjukkan sebanyak 43,48% sudah ada namun belum memadai, sebanyak 56,53% menyatakan ada dan memadai.



## Membangun Pendidikan Efektif

Gambar 3.52 Ketersediaan Buku dan Sumber Belajar Lainnya Pada Satuan Pendidikan SMP

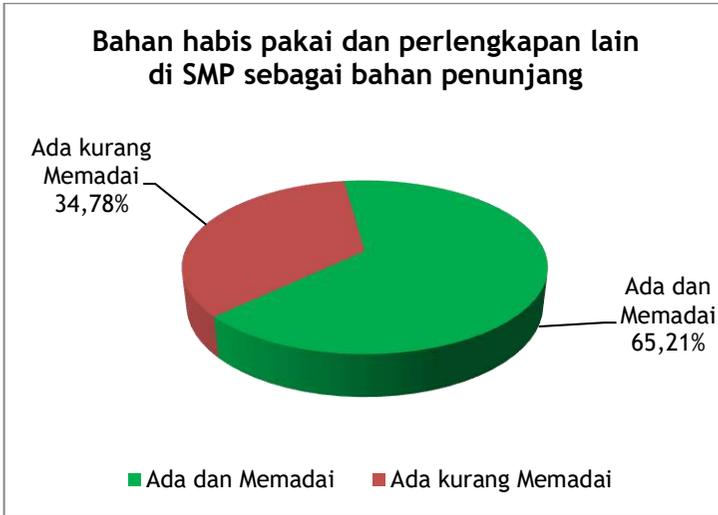
Pada satuan pendidikan MTs di Kabupaten Jepara menunjukkan ketersediaan buku dan sumber lainnya sebagai bahan ajar di sekolah menunjukkan sebanyak 63,46% sudah ada namun kurang memadai, sebanyak 36,54% menyatakan ada dan memadai.



Gambar 3.53 Ketersediaan Buku dan Sumber Belajar Lainnya Pada Satuan Pendidikan MTs

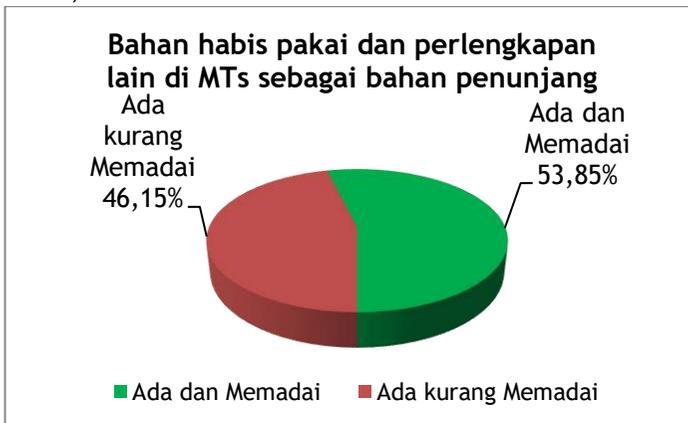
Selain kebutuhan sarana di atas, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan juga diperlukan. Berdasarkan hasil pendataan, di SMP menunjukkan sebanyak 65,21% sudah ada dan memadai, sedangkan sebanyak 34,78% sudah ada dan belum memadai.

## Pendidikan di Jepara



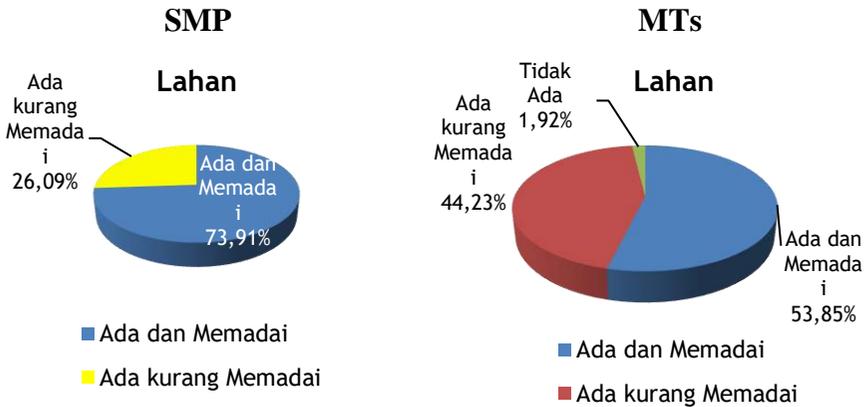
*Gambar 3.54 Ketersediaan Bahan Habis Pakai dan Perlengkapan Lainnya Pada Satuan Pendidikan SMP*

Pada satuan pendidikan MTs, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan yang sudah ada dan memadai mencapai 53,85%, yang telah ada dan kurang memadai sebesar 46,15%.



Gambar 3.55 Ketersediaan Bahan Habis pakai Pada Satuan Pendidikan MTs

Ketersediaan lahan merupakan bagian terpenting dalam memenuhi ruang penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Pada sekolah SMP di Kabupaten Jepara, ketersediaan lahan menunjukkan sebagian besar yaitu 73,91% sudah tersedia kepemilikannya dan memadai dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Sebesar 26,09% lahan SMP di Kabupaten Jepara menunjukkan masih kurang memadai secara luasan. Sementara itu luas lahan yang dimiliki sekolah tingkatan MTs menunjukkan sebesar 44,23% kurang memadai terhadap kebutuhan standar pengelolaan pendidikan. Ketersediaan lahan sekolah SMP dan MTs ditunjukkan melalui grafik berikut :

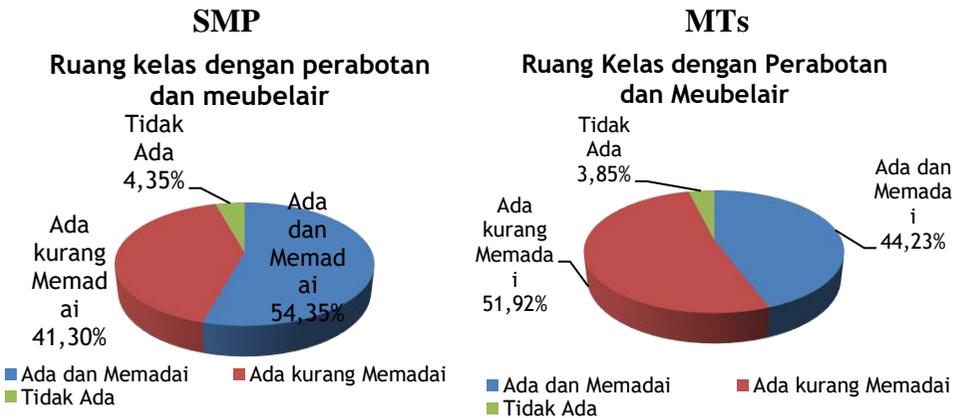


Gambar 3.56 Ketersediaan Lahan Pada Satuan Pendidikan SMP dan MTs

Ruang kelas merupakan pendukung utama dalam penyelenggaraan belajar dan mengajar. Untuk mendukung penyelenggaraan belajar dan mengajar maka salah satu sarana utamanya di dalam kelas adalah perabotan dan meubelair. Berdasarkan hasil

## Pendidikan di Jepara

penelitian pada ketersediaan kelas dengan perabotan dan meubelair menunjukkan pada satuan pendidikan umum SMP menunjukkan sebagian besar yaitu 54,35% sudah tersedia memadai, dan terdapat 41,30% tersedia namun belum memadai. Untuk satuan pendidikan MTs, kondisi ruang kelas dengan perabot dan meubelair yang menunjukkan kondisi tersedia namun kurang memadai mencapai 51,92%.



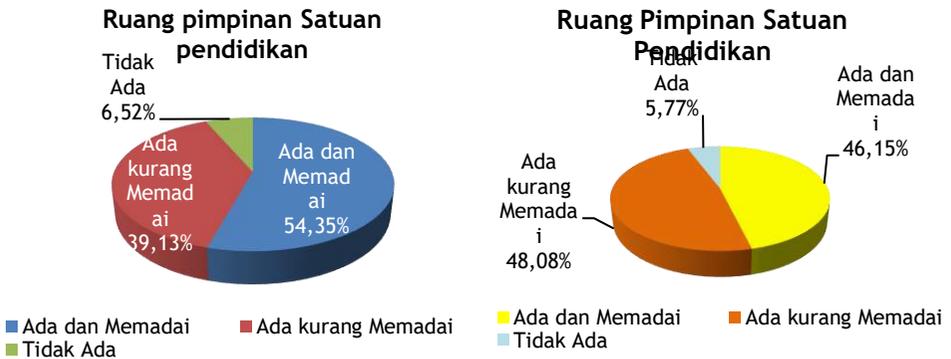
Gambar 3.57 Ketersediaan Ruang Kelas dengan Perabotan dan Meubelair Pada Satuan Pendidikan SMP dan MTs

Penyediaan ruang pimpinan pada satuan pendidikan SMP sebagian besar sudah ada dan memadai. SMP dengan ketersediaan ruang pimpinan satuan pendidikan yang kurang memadai mencapai 39,19%. Sedangkan pada satuan pendidikan MTs, ruang satuan pimpinan pendidikan dengan kondisi kurang memadai mencapai 48,08%, seperti yang tergambar pada grafik berikut :

**SMP**

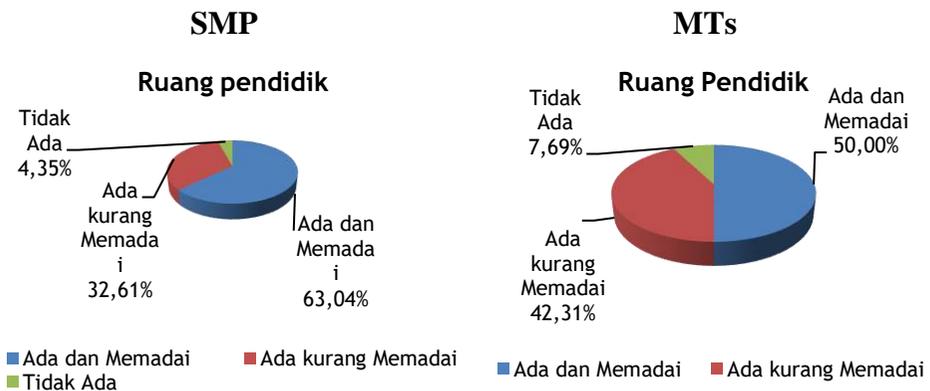
**MTs**

## Membangun Pendidikan Efektif



Gambar 3.58 Ketersediaan Ruang Pimpinan Satuan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan SMP dan MTs

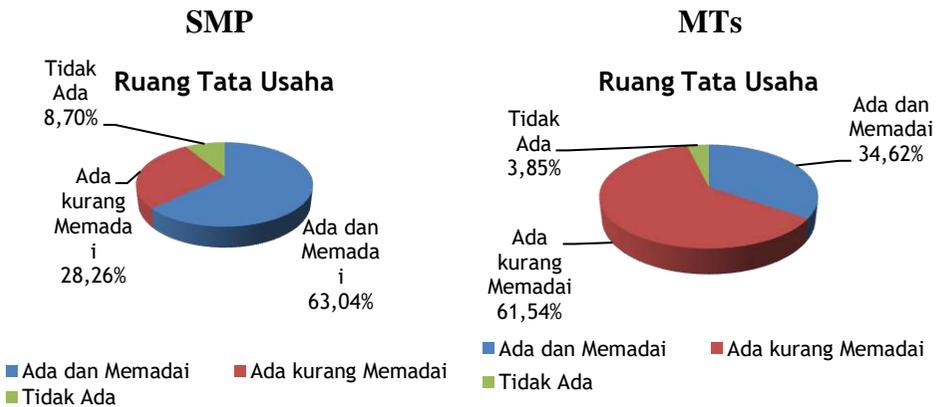
Penyediaan ruang pendidik pada satuan pendidikan SMP sebagian besar sudah ada dan memadai. SMP dengan ketersediaan ruang pendidik yang kurang memadai mencapai 32,61%. Sedangkan pada satuan pendidikan MTs, ruang satuan pendidikan dengan kondisi kurang memadai mencapai 42,31%, seperti yang tergambar pada grafik berikut :



Gambar 3.59 Ketersediaan Ruang Pendidik Pada Satuan Pendidikan SMP dan MTs

## Pendidikan di Jepara

Ketersediaan ruang tata usaha pada satuan pendidikan SMP sebagian besar sudah ada dan memadai. SMP dengan ketersediaan ruang tata usaha yang kurang memadai mencapai 28,26%. Sedangkan pada satuan pendidikan MTs, ruang tata usaha dengan kondisi kurang memadai mencapai 61,54%, seperti yang tergambar pada grafik berikut:



*Gambar 3.60 Ketersediaan Ruang Tata Usaha Pada Satuan Pendidikan SMP dan MTs*

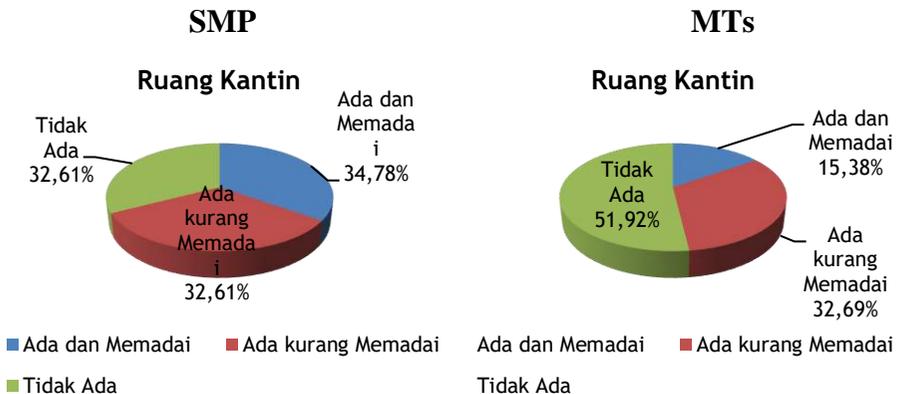
Penyediaan ruang perpustakaan dengan buku dan perabot pada satuan pendidikan SMP dengan kondisi kurang memadai mencapai 45,65%. Sedangkan pada satuan pendidikan MTs, ruang perpustakaan dengan buku dan perabot dengan kondisi kurang memadai mencapai 67,31%.

Ketersediaan ruang laboratorium IPA dengan peralatan laboratorium IPA dan perabot pendidikan SMP sebagian besar ada namun kurang memadai yang mencapai 39,13% dan yang belum ada sebanyak 23,91%. Sedangkan pada satuan pendidikan MTs, ruang laboratorium IPA dengan peralatan laboratorium IPA dan

## Membangun Pendidikan Efektif

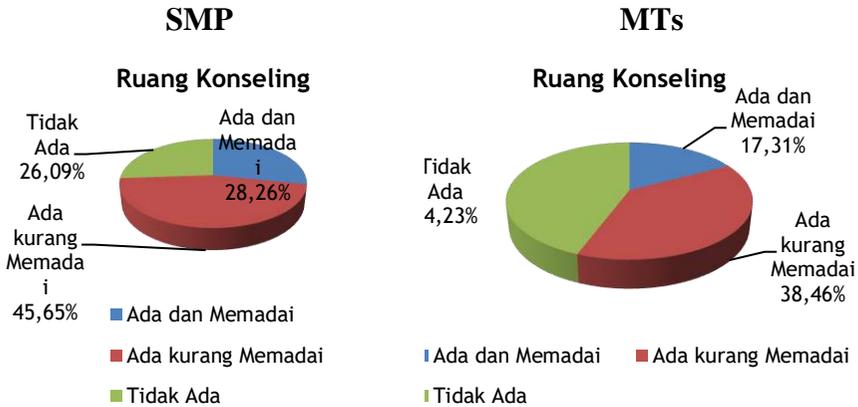
perabot dengan kondisi sebagian besar belum memiliki yang mencapai 53,85% dan kurang memadai mencapai 32,69.

Penyediaan ruang kantin pada satuan pendidikan SMP sebagian besar sudah ada dan memadai. SMP dengan ketersediaan ruang kantin yang kurang memadai mencapai 32,61% dan tidak tersedia sebanyak 32,61%. Sedangkan pada satuan pendidikan MTs, ruang kantin dengan kondisi tidak ada mencapai 51,92% dan ada namun kurang memadai mencapai 32,69%, seperti yang tergambar pada grafik berikut :



Gambar 3.63 Ketersediaan Ruang Kantin Pada Satuan Pendidikan SMP dan MTs

Penyediaan ruang konseling pada satuan pendidikan SMP menunjukkan sebesar 26,09% belum ada dan dengan kondisi kurang memadai mencapai 45,65%. Sedangkan pada satuan pendidikan MTs, ruang konseling dengan kondisi belum ada mencapai 44,23% dan kurang memadai mencapai 38,46%, seperti yang tergambar pada grafik berikut :



Gambar 3.64 Ketersediaan Ruang Konseling Pada Satuan Pendidikan SMP dan MTs

Ketersediaan ruang organisasi kesiswaan pada satuan pendidikan SMP menunjukkan sebesar 30,43% belum ada dan dengan kondisi kurang memadai mencapai 39,13%. Sedangkan pada satuan pendidikan MTs, ruang organisasi kesiswaan dengan kondisi tidak ada mencapai 42,31% dan ada namun kurang memadai mencapai 36,54.

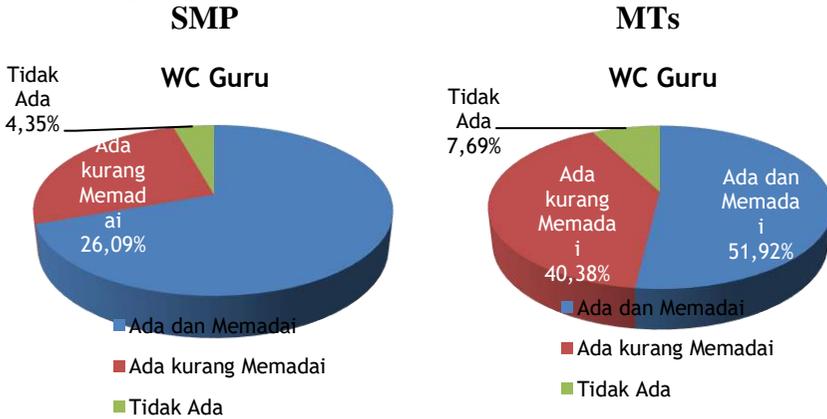
Ketersediaan fasilitas ruang sirkulasi (teras) pada satuan pendidikan SMP menunjukkan sebesar 13,04% tidak ada dan dengan kondisi kurang memadai mencapai 19,57%. Sedangkan pada satuan pendidikan MTs, ruang fasilitas ruang sirkulasi (teras) dengan kondisi tidak ada mencapai 26,92% dan kondisi ada namun kurang memadai mencapai 25,00.

Ketersediaan tempat berolahraga/bermain (lapangan dan ruangan) pada satuan pendidikan SMP menunjukkan sebesar 8,70% tidak ada dan dengan kondisi kurang memadai mencapai 39,13%. Sedangkan pada satuan pendidikan MTs, tempat berolahraga/bermain (lapangan dan ruangan) dengan kondisi tidak

## Membangun Pendidikan Efektif

ada mencapai 15,38% dan kondisi ada namun kurang memadai mencapai 57,69.

Ketersediaan WC guru pada satuan pendidikan SMP menunjukkan sebesar 4,35% tidak ada dan dengan kondisi ada namun kurang memadai mencapai 26,09%. Sedangkan pada satuan pendidikan MTs, WC guru dengan kondisi tidak ada mencapai 7,69% dan kondisi ada namun kurang memadai mencapai 40,38%, seperti yang tergambar pada grafik berikut :



*Gambar 3.68 Ketersediaan WC Guru Pada Satuan Pendidikan SMP dan MTs*

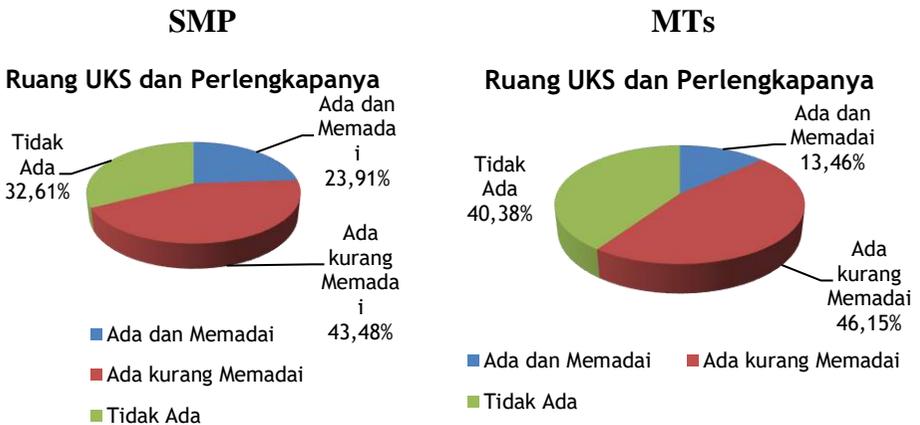
Ketersediaan WC perempuan pada satuan pendidikan SMP dengan kondisi ada namun kurang memadai mencapai 45,65%. Sedangkan pada satuan pendidikan MTs, WC perempuan dengan kondisi tidak ada mencapai 7,69%% dan kondisi ada namun kurang memadai mencapai 44,23.

Ketersediaan WC laki-laki pada satuan pendidikan SMP menunjukkan sebesar 2,17% tidak ada dan dengan kondisi ada namun kurang memadai mencapai 43,48%. Sedangkan pada satuan pendidikan MTs, WC laki-laki dengan kondisi tidak ada

## Pendidikan di Jepara

mencapai 7,69% dan kondisi ada namun kurang memadai mencapai 48,08.

Ketersediaan ruang UKS pada satuan pendidikan SMP menunjukkan sebesar 32,61% tidak ada dan dengan kondisi ada namun kurang memadai mencapai 43,48%. Sedangkan pada satuan pendidikan MTs, ruang UKS dengan kondisi tidak ada mencapai 40,38% dan kondisi ada namun kurang memadai mencapai 46,15%, seperti yang tergambar pada grafik berikut :



Gambar 3.71 Ketersediaan Ruang UKS dan Perlengkapannya Pada Satuan Pendidikan SMP dan MTs

Ketersediaan tempat ibadah pada satuan pendidikan SMP menunjukkan sebesar 13,04% tidak ada dan dengan kondisi ada namun kurang memadai mencapai 28,26%, sedangkan pada satuan pendidikan MTs, tempat ibadah dengan kondisi tidak ada mencapai 25% dan kondisi ada namun kurang memadai mencapai 34,62%, seperti yang tergambar pada grafik berikut :



## Pendidikan di Jepara

meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar 95,44% dan menurun menjadi sebesar 84,52% ditahun 2016. Meskipun angka tersebut sudah diatas target nasional akan tetapi tren selama 5 tahun terakhir yang terus mengalami penurunan, harus mendapat perhatian yang cukup serius dari Pemerintah Kabupaten Jepara.

*Tabel 3.41.*

*Perkembangan APK SMP/MTS/ Sederajat Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016*

No	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Paket B (%)	79,45	89,16	95,44	86,24	84,52
		Target Nasional (Renstra Kemendikbud)				
		2015	2016	2017	2018	2019
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Paket B (%)	80,73	81,89	82,40	83,61	83,77

### b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Dilihat perkembangannya, capaian APM SMP/MTs sederajat di Kabupaten Jepara menunjukkan tren meningkat dari waktu ke waktu dengan capaian yang cukup baik. Pada tahun 2012 APM SMP/MTs sederajat sebesar 69,83% dan meningkat menjadi 79,26% pada tahun 2016. Meskipun demikian, dengan APM SMP/MTs yang sebesar 88,73% masih perlu diupayakan peningkatan pemerataan pendidikan, karena kondisi itu menunjukkan

## Membangun Pendidikan Efektif

bahwa sekitar 10,74% anak usia sekolah (13-15 tahun) belum mengenyam pendidikan SMP/MTs sederajat.

Tabel 3.42.

*Perkembangan APM SMP/MTS/ Sederajat Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016*

	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/SMPLB/Paket B (%)	72,88	79,30	82,04	79,26	65,17
		Target Nasional (Renstra Kemendikbud)				
		2015	2016	2017	2018	2019
2	Angka Partisipasi Murni (APM)SMP/MTs/SMPLB/Paket B (%)	71,88	72,69	73,07	73,70	73,72

### c. Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs

Angka putus sekolah pada satuan pendidikan SMP/MTs dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren membaik, yaitu dengan menurun dari tahun 2012 sebesar 1% menjadi 0,10%. Jika dibandingkan dengan target nasional, maka kondisi pencapaian Kabupaten Jepara telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 1,08%. Perlu perhatian dalam hal angka putus sekolah SMP/MTs adalah pada kelompok siswa perempuan dengan kondisi lebih tinggi yaitu mencapai 0,12% dibandingkan laki-laki sebesar 0,08%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.43.

*Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP/MTS/ Sederajat Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016*

## Pendidikan di Jepara

No	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs (%)	1	0,26	0,26	0,11	0,10
	<i>APtS SMP/MTs Laki-laki</i>	0,03	0,16	0,18	0,09	0,08
	<i>APtS SMP/MTs Perempuan</i>	0,07	0,36	0,34	0,12	0,12
		Target Nasional (Renstra Kemendikbud)				
		2015	2016	2017	2018	2019
2	Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs (%)	1,14	1,11	1,08	1,03	1,01

### 3. Kualitas

#### a) Angka Kelulusan SMP/MTs

Angka kelulusan SMP/MTs di Kabupaten Jepara sudah cukup baik, pada tahun 2016 sudah mencapai 100%. Hal ini berarti bahwa siswa SMP/MTs di Kabupaten Jepara lulus semua pada jenjang pendidikan tersebut. Gambaran Angka Kelulusan secara rinci terlihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.44.*

*Angka Kelulusan SMP/MTs Kabupaten Jepara  
Tahun 2012-2016*

No	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	91,68	92,40	92,40	98,70	100
	AL SMP/MTs Laki-laki	91,50	92,30	92,35	98,50	100
	AL SMP/MTs Perempuan	91,86	92,50	92,45	98,89	100

#### b) Rata-Rata Nilai Ujian Nasional

## Membangun Pendidikan Efektif

Hasil rata-rata nilai ujian nasional tingkat pendidikan satuan SMP/MTS di Kabupaten Jepara fluktuatif cenderung menurun, dimana pada tahun 2012 tercatat sebesar 6,58 menjadi 6,13 pada tahun 2016. Hasil rata-rata ujian nasional tersebut masih jauh dibawah target nasional.

*Tabel 3.45.  
Nilai Rata UN SMP/MTs Kabupaten Jepara  
Tahun 2012-2016*

No	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs	6,58	6,12	6,13	6,13	6,13
		Target Nasional (Renstra Kemendikbud)				
		2015	2016	2017	2018	2019
2	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs	6,2	6,5	6,7	7,0	7,5

### 4. Kesetaraan

#### a) Rasio APM SMP/ MTS

Rasio APK/ APM SMP/MTs di Kabupaten Jepara sudah cukup baik, pada tahun 2016 rasio APK sudah mencapai 99,26% dan rasio APM sudah mencapai 99,91%. Gambaran rasio APK/ APM secara rinci terlihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.46.  
Perkembangan Rasio APM SMP/ MTS Kabupaten Jepara Tahun  
2012-2016*

No	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio APM SMP/MTs	98,91	99,37	99,89	98,35	99,91

## Pendidikan di Jepara

No	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
		Target Nasional (Renstra Kemendikbud)				
		2015	2016	2017	2018	2019
2	Target Nasional (Renstra Kemendikbud)	100	100	100	100	100

### b) Rasio APK/ APM SMP/ MTS

Rasio APK/ APM SMP/MTs di Kabupaten Jepara sudah cukup baik, pada tahun 2017 rasio APK sudah mencapai 99,26% dan rasio APM sudah mencapai 99,91%. Gambaran rasio APK/ APM secara rinci terlihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.47.*

*Rasio APK dan APM SMP/ MTS Kabupaten Jepara Tahun 2012-2016*

No	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio APK SMP/MTs	98,72	99	98,74	99,42	99,26
2	Rasio APM SMP/MTs	98,91	99,37	99,89	98,35	99,91

### 5. Keterjaminan

Jumlah guru pada satuan pendidikan SMP/ MTS dengan status kepegawaian PNS masih sangat kurang. Berdasarkan data yang diambil dari Profil Pendidikan Kabupaten Jepara Tahun 2016, guru SMP dengan status PNS pada tahun 2016 sebanyak 943 guru, sedangkan yang berstatus Non PNS sebanyak 953 guru, jumlahnya jika dibandingkan dengan kondisi empat tahun sebelumnya semakin menurun. Kondisi yang sama juga terjadi pada

### *Membangun Pendidikan Efektif*

satuan pendidikan MTs, dengan jumlah guru PNS yang jauh lebih sedikit, yaitu sebanyak 119 guru PNS dan yang non PNS sebanyak 2.127 guru, dengan tren hampir tidak ada perubahan dalam tiga tahun terakhir.

*Tabel 3.48.*

*Jumlah Guru SMP/ MTS Kabupaten Jepara  
Menurut Status (PNS dan Non PNS)  
Tahun 2012-2016*

No	Guru Berdasarkan Status Kepegawaian	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
1	SMP					
	PNS	1.025	1.465	943	943	943
	Non PNS	943	724	953	953	953
2	MTs					
	PNS	94	102	119	119	119
	Non PNS	2.226	2.336	2.127	2.127	2.127

Sementara itu pada tahun 2016, persebaran guru berdasarkan status PNS dan non PNS baik pada satuan pendidikan SMP maupun MTs dapat dilihat pada tabel berikut :

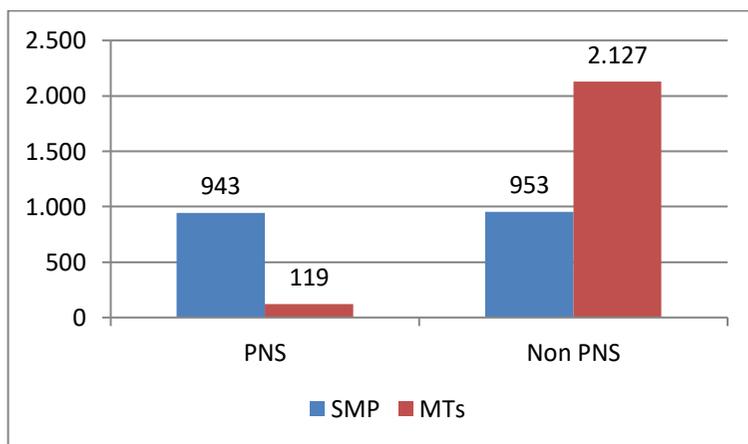
*Tabel 3.49.*

*Persebaran Jumlah Guru SMP/ MTS Berdasarkan Status Kepegawaian  
Tahun 2016 Dirinci Menurut Kecamatan*

No.	Kecamatan	SMP		MTS	
		PNS	Non PNS	PNS	Non PNS
1	Kedung	44	97	5	308
2	Pecangaan	78	93	2	95
3	Welahan	83	20	3	93
4	Mayong	71	71	1	150

## Pendidikan di Jepara

No.	Kecamatan	SMP		MTS	
		PNS	Non PNS	PNS	Non PNS
5	Nalumsari	55	54	17	115
6	Batealit	37	94	56	114
7	Tahunan	38	51	3	155
8	Jepara	204	81	2	25
9	Mlonggo	38	49	2	129
10	Bangsri	68	126	3	238
11	Keling	27	60	20	150
12	Karimunjawa	15	8	0	21
13	Kalinyamatan	55	57	1	139
14	Kembang	67	24	1	113
15	Donorojo	36	44	1	169
16	Pakis Aji	27	24	2	113
Jumlah		943	953	119	2.127



*Gambar 3.74 Perbandingan Jumlah Guru SMP/ MTS Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2016*

### *Membangun Pendidikan Efektif*

Berdasarkan hasil data dan kajian, ketersediaan tenaga pendidik berdasarkan status kepegawaian terdiri dari PNS dan non PNS. Berdasarkan data yang ada, jumlah guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV jumlahnya cenderung menurun. Pada tahun 2012 jumlah guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebanyak 4.040 guru, pada tahun 2016 menurun menjadi 1.660 guru. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penurunan jumlah guru berkualifikasi S1/D-IV adalah sebagian guru sudah memasuki masa purna tugas atau pensiun. Sedangkan untuk guru SMP yang bersertifikat jumlahnya juga cenderung menurun, dari tahun 2012 sebanyak 1.364 guru menjadi 1.060 guru pada tahun 2016. Komposisi guru SMP yang berkualifikasi D IV/S1 dan yang bersertifikat di Kabupaten Jepara ditunjukkan melalui tabel berikut :

*Tabel 3.50.*

*Perkembangan Jumlah Guru SMP di Kabupaten Jepara Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dan Bersertifikasi Tahun 2012-2016*

No	Indikator	Capaian				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	4.040	5.012	3.443	4.850	1.660
	• Laki-laki	2.383	2.477	1.711	2.345	809
	• Perempuan	1.657	2.535	1.732	2.505	851
2	Guru SMP bersertifikasi	1.364	1.130	1.125	1.124	1.060
	• Laki-laki	687	580	575	575	535
	• Perempuan	677	550	550	549	525

Pada tahun 2016, total jumlah sekolah SMP sebanyak 86 sekolah. Jumlah tersebut, sebanyak 77 sekolah sudah terakreditasi

## Pendidikan di Jepara

atau sebesar dan sisanya sebanyak 9 sekolah belum terakreditasi. Sementara itu jumlah sekolah MTs sebanyak 104 sekolah dengan status yang belum terakreditasi lebih banyak yaitu 11 sekolah. Kondisi sekolah terakreditasi dan belum terakreditasi pada setiap jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 3.51.*

*Status Akreditasi SMP/MTs di Kabupaten Jepara Tahun 2016*

No	Satuan Pendidikan	Jml	Status Akreditasi			
			A	B	C	BIm
1	SMP	86	39	34	4	9
2	MTs	104	24	61	8	11

### **IV. Pendidikan Non Formal**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Satuan pendidikan non formal yang tersedia di Kabupaten Jepara terdiri dari lembaga pusat kegiatan masyarakat, lembaga pendidikan berkelanjutan dan kelompok belajar pendidikan kesetaraan. Pusat kegiatan masyarakat di Kabupaten Jepara terdapat 2 jenis yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Taman Bacaan Masyarakat (TBM). PKBM merupakan suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat

### *Membangun Pendidikan Efektif*

diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Pada saat ini PKBM di Kabupaten Jepara tercatat dan aktif sebanyak 18 kelompok. Ketersediaan PKBM di Kabupaten Jepara merata di seluruh kecamatan untuk melayani masyarakat di 195 desa/keurahan.

Masyarakat yang mengakses pendidikan non formal melalui PKBM dapat mengikuti program pengembangan keterampilan sesuai dengan potensi dan bakat minatnya. Pendidikan berkelanjutan terdiri dari lembaga kursus, KB PKH dan KB KBU.

*Tabel 3.52.*

*Jumlah, Persebaran PKBM dan Pendidikan Berkelanjutan di Kabupaten Jepara Tahun 2017*

No.	Kecamatan	Lembaga PKBM	Pendidikan Berkelanjutan		
			Lembaga Kursus	KB PKH	KB KBU
1	Kedung	1	4	0	0
2	Pecangaan	1	3	0	0
3	Welahan	1	2	0	0
4	Mayong	1	2	0	0
5	Nalumsari	1	0	0	0
6	Batealit	1	3	0	0
7	Tahunan	1	4	0	0
8	Jepara	1	23	0	0
9	Mlonggo	1	2	0	0
10	Bangsri	1	6	0	0
11	Keling	2	2	0	0
12	Karimunjawa	1	0	0	0
13	Kalinyamatan	1	5	0	0
14	Kembang	2	0	0	0
15	Donorojo	1	3	0	0

## Pendidikan di Jepara

No.	Kecamatan	Lembaga PKBM	Pendidikan Berkelanjutan		
			Lembaga Kursus	KB PKH	KB KBU
16	Pakis Aji	1	2	0	0
Jumlah		18	61	0	0

Fungsi keberadaan PKBM diharapkan dapat mem-berdayakan berbagai potensi yang ada dimasyarakat, terutama dalam menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. PKBM hadir sebagai upaya memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bersifat formal. Keberadaan PKBM ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan diri dan dapat berusaha ataupun bekerja. Namun untuk saat ini PKBM di Kabupaten Jepara secara umum masih pada pelaksanaan pendidikan kesetaraan formal, baik paket A, B maupun C. Kondisi ini dapat dilihat dari lulusan PKBM ditahun 2017 yang menunjukkan sebanyak 118 siswa lulus ujian paket A, sebanyak 528 peserta lulus ujian paket B dan sebanyak 1.309 peserta lulus paket C.

*Tabel 3.53.*

*Jumlah Peserta Ujian Kesetaraan di Kabupaten Jepara Tahun 2017*

No	Kelompok Belajar	Peserta Ujian		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Paket A	55	63	118
2	Paket B	343	185	528
3	Paket C	876	433	1309

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Jepara tidak sepenuhnya diselenggarakan di semua kecamatan. Pada kelompok Paket A diselenggarakan di 7 kecamatan, kelompok

### *Membangun Pendidikan Efektif*

Paket B di 13 kecamatan dan kelompok paket C di 17 kecamatan. Dengan demikian, dari 37 penyelenggaraan kejar paket, menunjukkan minat dari pendidikan kesetaraan paket C masih jauh lebih banyak.

*Tabel 3.54.*

*Jumlah, Persebaran Kelompok Belajar Pendidikan Kesetaraan Pendidikan Kabupaten Jepara Tahun 2017*

No.	Kecamatan	Kelompok Belajar Pendidikan Kesetaraan			
		Paket A	Paket B	Paket C	Jumlah
1	Kedung	0	1	1	2
2	Pecangaan	0	0	1	1
3	Welahan	0	0	1	1
4	Mayong	1	1	1	3
5	Nalumsari	1	1	1	3
6	Batealit	1	2	1	4
7	Tahunan	0	1	1	2
8	Jepara	0	1	1	2
9	Mlonggo	1	1	1	3
10	Bangsri	1	1	1	3
11	Keling	0	0	2	2
12	Karimunjawa	0	0	0	0
13	Kalinyamatan	1	1	1	3
14	Kembang	0	2	2	4
15	Donorojo	0	0	1	1
16	Pakis Aji	1	1	1	3
Jumlah		7	13	17	37

Ketersediaan tutor PNF di Kabupaten Jepara tercatat sebanyak 3.072 orang. Peningkatan kapasitas melalui mitra Disdikpora sudah dilakukan pada 931 orang yang di antaranya

## Pendidikan di Jepara

terdapat 50 orang berstatus lanjutan. Jumlah tutor PNF saat ini yang belum mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 2.141 orang.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal di Kabupaten Jepara adalah dalam penetapan sasaran peserta didik (warga belajar). Kondisi ini dihadapi karena pemerintah daerah tidak memiliki data yang pasti masyarakat yang menjadi sasaran untuk menjadi peserta didik di PKBM. Persoalan kedua yang dihadapi adalah keberadaan tutor ataupun pengajar dalam penyelenggaraan PKBM. Sampai saat ini di Kabupaten Jepara belum terdata tutor yang pasti dalam kegiatan belajar dan mengajar di PKBM. Tutor yang dihadirkan sebagai pengajar hanya bersifat kerelaan tidak mengikat sebagai tutor pasti dalam PKBM tersebut. Selain itu masih berkaitan dengan SDM penyelenggara yang dihadapi adalah belum adanya mekanisme yang mengatur secara pasti untuk keberlanjutan PKBM terhadap sistem insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan nonformal.

Tantangan dalam penyelenggaraan PKBM di Kabupaten Jepara antara lain pertama masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti dan mengenal secara jelas tentang keberadaan dan peran PKBM tengah-tengah mereka. Kedua membangun lembaga PKBM yang berorientasi pada peningkatan keterampilan masyarakat, tidak sebatas hanya pada pendidikan kesetaraan. Ketiga membuat inovasi agar kehadiran PKBM saat ini dapat setara dengan lembaga kursus dengan menetapkan standar penjaminan mutu dalam penyelenggaraan sehingga kualitas lulusan PKBM benar-benar dapat dipercaya. Keempat membangun kemitraan dengan lembaga lainnya dan perusahaan yang membutuhkan tenaga terampil. Dengan kemitraan yang saling menguntungkan maka penyelenggaraan PKBM tidak cenderung bergantung pada APBD Kabupaten Jepara.

### *Membangun Pendidikan Efektif*

Pendidikan non formal lainnya di Kabupaten Jepara yang tersedia adalah pendidikan berbasis keagamaan, yaitu pondok pesantren. Berdasarkan data yang dihimpun RMU NU, jumlah pondok pesantren terdaftar sebanyak 319 lembaga. Jumlah tersebut paling banyak berada di Kecamatan Kedung sebanyak 56 lembaga dan Kecamatan Tahunan sebanyak 46 lembaga. Jumlah santri tercatat sebanyak 21.013 jiwa yang terdiri dari santri putri sebanyak 8.939 jiwa dan santri putra sebanyak 12.074 jiwa. Persebaran jumlah pondok pesantren dan peserta santri berdasarkan masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 3.55.*

*Jumlah Persebaran Pondok Pesantren Beserta Santri di Kabupaten Jepara*

No	Kecamatan	Jumlah Ponpes	Jumlah santri		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
1	Kedung	56	2.248	1.612	3.860
2	Pecangaan	27	735	505	1.240
3	Welahan	17	691	509	1.200
4	Mayong	16	1.332	1.339	2.671
5	Batealit	32	1.177	1.151	2.328
6	Jepara	12	871	457	1.328
7	Mlonggo	17	495	328	823
8	Bangsri	26	836	918	1.754
9	Keling	9	269	169	438
10	Karimun Jawa	2	16	19	35
11	Nalum Sari	9	314	261	575
12	Tahunan	46	1.675	542	2.217
13	Kalinyamatan	13	541	533	1.074
14	Kembang	6	143	81	224

## Pendidikan di Jepara

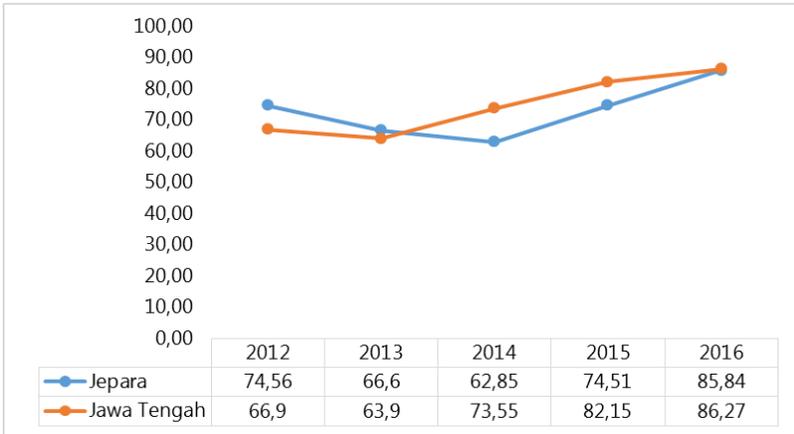
No	Kecamatan	Jumlah Ponpes	Jumlah santri		Jumlah
			Laki-laki	Perempuan	
15	Donorojo	25	579	405	984
16	Pakis Aji	6	152	110	262
Jumlah		319	12.074	8.939	21.013

### d. Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi

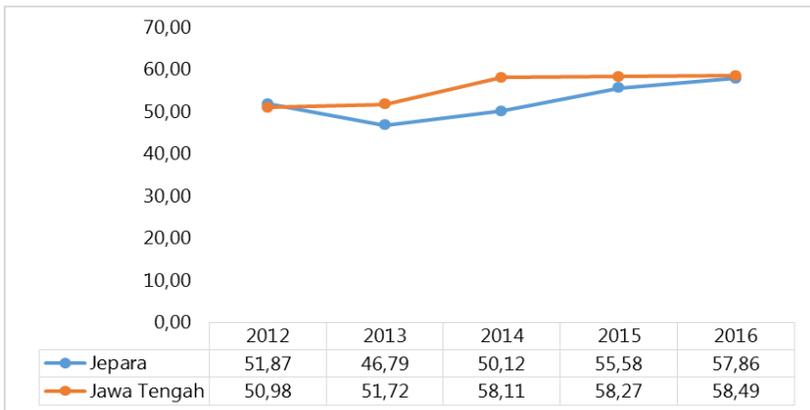
#### 1. Pendidikan Menengah

Kondisi pencapaian kinerja pendidikan menengah di Kabupaten Jepara antara lain ditunjukkan dengan tingkat partisipasi sekolah, baik Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Sekolah SMA/MA/SMK Kabupaten Jepara selama periode tahun 2012-2016 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik, terutama pada periode tahun 2014-2016. Pada tahun 2016, APK SMA/MA/SMK mencapai sebesar 85,84%, meningkat cukup tinggi jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2016 sebesar 74,51%. Melihat kondisi capaian tahun 2016, tingkat partisipasi sekolah SMA/SMK/MA, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya (16-18 tahun) menunjukkan penyerapan anak sekolah pada satuan SMA/MA/SMK semakin banyak. Jika dipersandingkan dengan rata-rata APK SMA/MA/SMK Provinsi Jawa Tengah, pencapaian APK SMA/SMK/MA Kabupaten Jepara masih belum menunjukkan perkembangan yang kurang baik, yaitu dengan kinerja berada di bawah rata-rata Jawa Tengah dan sudah berjalan dalam dalam tiga tahun terakhir (2013-2016).

## Membangun Pendidikan Efektif



*Gambar 3.75 Perkembangan APK SMA/MA Kabupaten Jepara Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2016*



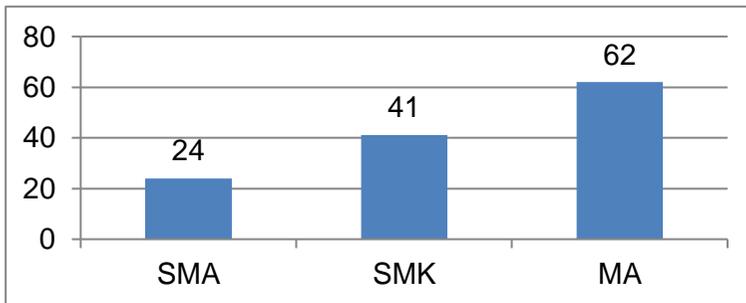
*Gambar 3.76 Perkembangan APM SMA/MA Kabupaten Jepara Dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2012-2016*

Partisipasi sekolah SMA/MA/SMK dengan memperhatikan kelompok umur/usia sekolah ditunjukkan dengan kinerja APM SMA/MA/SMK. Tingkat partisipasi sekolah pada kelompok APM SMA/MA/SMK perkembangannya memiliki kesamaan dengan APK dalam lima tahun terakhir. Kinerja APK setiap tahunnya

## Pendidikan di Jepara

meningkat dengan capaian pada tahun 2016 mencapai sebesar 57,86%. Walaupun capaiannya setiap tahun meningkat, namun kinerjanya jika dibandingkan dengan rata-rata APM SMA/MA/SMK Provinsi Jawa Tengah, dan itu terjadi sejak tahun 2013.

Ketersediaan satuan pendidikan menengah di Kabupaten Jepara pada tahun 2017 mencapai sebanyak 127 unit, baik negeri maupun swasta. Satuan pendidikan menengah paling banyak di Kabupaten Jepara ada MA mencapai 62 sekolah, berikutnya ada pada Madrasah SMK sebanyak 41 sekolah. Gambaran banyaknya jumlah satuan pendidikan menengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.77 Jumlah Ketersediaan Pendidikan Menengah di Kabupaten Jepara Tahun 2017

Persebaran satuan pendidikan menengah pada sekolah SMA di Kabupaten Jepara paling banyak berada di Kecamatan Jepara sebanyak 4 sekolah dan di Kecamatan Mayong sebanyak 3 sekolah. Kecamatan yang tidak memiliki SMA yaitu di Kecamatan Karimunjawa dan Kecamatan Pakisaji. Pada kelompok pendidikan SMK, dari 48 SMK yang ada di Kabupaten Jepara persebarannya ada di semua kecamatan. Jumlah SMK paling banyak berada di 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Jepara mencapai 5

### *Membangun Pendidikan Efektif*

sekolah, Kecamatan Bangsri sebanyak 9 sekolah, Kecamatan Mayong sebanyak 5 sekolah, dan Kecamatan Tahunan sebanyak 5 sekolah.

Pada kelompok pendidikan menengah keagamaan (islam), jumlah Madrasah Aliyah tercatat sebanyak 62 sekolah. Persebaran Madrasah Aliyah paling banyak di Kecamatan Kedung sebanyak 11 sekolah, Kecamatan Bangsri dan Donorojo masing-masing sebanyak 7 sekolah. Persebaran satuan pendidikan menengah baik SMA/MA/SMK di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*Tabel 3.56.*

*Jumlah Persebaran Fasilitas Pendidikan Menengah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Jepara Tahun 2017*

No	Kecamatan	Jumlah		
		SMA	SMK	MA
1	Kecamatan Bangsri	2	9	7
2	Kecamatan Batealit	1	2	4
3	Kecamatan Donorojo	2	2	7
4	Kecamatan Jepara	4	5	1
5	Kecamatan Kalinyamatan	1	2	4
6	Kecamatan Karimunjawa	0	1	1
7	Kecamatan Kedung	1	2	11
8	Kecamatan Keling	1	3	1
9	Kecamatan Kembang	1	1	3
10	Kecamatan Mayong	3	5	3
11	Kecamatan Mlonggo	1	3	3
12	Kecamatan Nalumsari	1	3	4
13	Kecamatan Pakisaji	0	2	3
14	Kecamatan Pecangaan	2	2	3
15	Kecamatan Tahunan	3	5	5

## Pendidikan di Jepara

No	Kecamatan	Jumlah		
		SMA	SMK	MA
16	Kecamatan Welahan	1	1	2
	Total	24	48	62

Status akreditasi sekolah pada satuan pendidikan SMA menunjukkan sudah 100% terakreditasi dengan status akreditasi A sebanyak 17 sekolah, status akreditasi B sebanyak 5 sekolah dan status akreditasi C sebanyak 2 sekolah. Pada satuan pendidikan MA dan SMK, masih terdapat sekolah yang belum terakreditasi, terutama pada SMK yang mencapai 13 sekolah.

*Tabel 3.57.*

*Status Akreditasi Sekolah pada Semua Tingkatan SMA/MA/SMK di Kabupaten Jepara Tahun 2017*

No	Satuan Pendidikan	Jml	Status Akreditasi			
			A	B	C	Blm
1	Sekolah Menengah Atas	24	17	5	2	0
2	Madrasah Aliyah	62	10	42	7	3
3	Sekolah Menengah Kejuruan	48	13	19	3	13

## 2. Perguruan Tinggi

Satuan penyelenggara pendidikan yang tersedia di Kabupaten Jepara tidak hanya sebatas sampai pada satuan pendidikan menengah, tercatat di Kabupaten Jepara terdapat perguruan tinggi maupun akademi. Jumlah perguruan tinggi/akademi di Kabupaten Jepara berdasarkan data yang masih aktif saat ini sebanyak 4 satuan pendidikan tinggi. Jumlah tersebut terdiri dari 3 pendidikan tinggi berstatus akademi dan 1 berstatus universitas. Terdapat perguruan tinggi yang termasuk kategori negeri,

*Membangun Pendidikan Efektif*

yaitu Akademi Komunitas Negeri Jepara yng beralamat di Jl. RMP. Sosrokartono No. 1, Pengkol, Jepara, Jawa Tengah.

*Tabel 3.58.*

*Jumlah Satuan Pendidikan Tinggi/Akademi di Kabupaten Jepara Tahun 2017*

No	Nama Perguruan Tinggi/Akademi	Status	Alamat
1	Akademi Kebidanan Al-Hikmah	Swasta	Jln. Raya Mayong KM.24 Jepara, Pelemkerep, Mayong, Jepara.
2	Akademi Komunitas Balekambang	Swasta	Jl. Balekambang Gemiring Lor, Nalumsari, Jepara.
3	Akademi Komunitas Negeri Jepara	Negeri	Jl. RMP. Sosrokartono No. 1, Pengkol, Jepara.
4	Universitas Islam Nahdlatul Ulama	Swasta	Jl, Taman Siswa (Pekeng) Tahunan 59427, Tahunan, Jepara.

# BAB V

## PENINGKATAN PENDIDIKAN

### 1. Kinerja Sektor Pendidikan di Jepara

Secara umum, pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Perkembangan ini tercermin pada meningkatnya rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jepara mencapai 7,32 tahun pada tahun 2016 dari tahun 2012 sebesar 6,96 tahun. Kondisi RLS Kabupaten Jepara selama kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 tidak berbeda dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga mengalami kenaikan tiap tahun. Serta menurunnya angka buta aksara penduduk usia di atas 15 tahun dari 10,21 persen menjadi 6,21 persen pada tahun 2018 (Depdiknas 2018). Secara keseluruhan kinerja pembangunan pendidikan nasional mengalami peningkatan yang cukup berarti seperti terlihat pada Tabel berikut.

*Tabel*

*Capaian Kinerja Peningkatan dan Perluasan Akses Pendidikan*

## Membangun Pendidikan Efektif

Jenjang Pendidikan Educational level <sup>1</sup>	ERM Net Enrollment Rate			GRE Gross Enrollment Rate		
	Laki-Laki/Male	Perempuan/Female	Total	Laki-Laki/Male	Perempuan/Female	Total
	(L)	(F)	(T)	(L)	(F)	(T)
SD/MI / Elementary School	94,44	98,27	96,37	111,35	108,56	118,34
SNP/MTs / Junior High School	78,79	79,71	79,26	89,53	83,07	86,24
SMA/SMK/MA / Senior High School	58,77	58,85	57,86	81,47	88,52	85,94
Diploma/Universitas / Diploma/Bachelor	8,43	7,00	8,81	18,18	9,25	9,66

Sumber: Jawa Soko Baromikemas Maret 2018  
Materi: Laporan Soko Baromikemas, Maret 2018

## 2. Analisis Kinerja dan Keterkaitan Antar Sektoral di Bidang Pendidikan

### a) Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan

Untuk mengetahui kinerja instansi, diperlukan pengukuran kinerja dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabel indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat), dan *impact* (dampak).

Indikator *input* (masukan) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, ke-

## Peningkatan Pendidikan

bijakan atau peraturan perundangan yang berlaku. Indikator *output* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik. Indikator *outcome* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Indikator *benefit* (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja dengan menggunakan piranti formulir pengukuran kinerja kegiatan (PKK), pengukuran pencapaian sasaran (PPS) sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran didapatkan nilai – nilai yang meliputi nilai capaian kelompok indikator kinerja, nilai rencana tingkat capaian, nilai capaian realisasi, nilai presentase pencapaian rencana tingkat capaian kebijaksanaan. Secara terinci nilai – nilai yang diperoleh dari pengukuran kinerja kegiatan pembangunan pendidikan, seni budaya nasional, pemuda dan olahraga sebagai berikut:

- a. Kebijaksanaan peningkatan mutu pendidikan dasar dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.
- b. Kebijaksanaan peningkatan mutu pendidikan menengah dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.
- c. Kebijaksanaan peningkatan pendidikan luar sekolah dan prestasi pembinaan olah raga.

## Membangun Pendidikan Efektif

- d. Kebijakanaksanaan memperbaiki keadaan dan meningkatkan kemampuan dalam pendidikan seni dan budaya.
  - e. Kebijakanaksanaan peningkatan kesejahteraan pegawai pendidik dan non pendidik.
  - f. Kebijakanaksanaan memperbaiki keadaan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
- b) Analisa Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan dengan Menggunakan Efisiensi dan Efektifitas

Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan Menggunakan Efisiensi. Efisiensi diukur dengan rasio antara ouput dan input. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut, tetapi dalam bentuk relatif. Karena efisiensi diukur dengan output dan input, maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan output pada input yang sama.
- b. Meningkatkan output dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi
- c. peningkatan input.
- d. Menurunkan input pada tingkatan ouput yang sama.
- e. Menurunkan input dalam proporsi yang lebih besar dari pada proporsi penurunan output.

Efisiensi adalah hubungan antara input dan output dimana penggunaan barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi untuk mencapai output tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan ouput dengan input.

Efisiensi = *Output* adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran *output* adalah pengukuran keluaran langsung proses. Ukuran *output* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Sedangkan input adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan *output*. Pengukuran *input* adalah sumber daya

yang dikonsumsi dalam rangka menghasilkan *output*. Dalam dinas pendidikan, output dapat berupa terlaksananya rehabilitasi gedung, tersalurkannya bantuan penyelenggaraan sekolah negeri, tersalurkannya bantuan operasional sekolah, tersedianya ruang belajar.

### 3. Isu Strategis Pengembangan Pendidikan Efektif di Jepara

Isu-isu strategis yang mengemuka tentang pendidikan untuk saat ini dan perkembangannya pada masa mendatang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Selanjutnya memperhatikan analisis situasi strategis maka perlu ada langkah konkrit untuk mendorong perwujudan isu tersebut. perlu dirumuskan strategi pencapaiannya agar supaya isu-isu tersebut dapat dijalankan dan dioperasionalkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Secara khusus dari isu strategis tersebut diatas dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori, yakni *pertama* ketersediaan dan keterjangkauan pendidikan, *kedua* penguatan mutu dan kualitas pendidikan termasuk didalamnya tenaga pendidikan dan kependidikan, *ketiga* kelestarian lingkungan hidup, *keempat* akuntabilitas dan transparansi pendidikan dan *kelima* partisipasi seluruh stakeholder.

Oleh karena itu strategi pembangunan bidang pendidikan untuk tahun 2014-2019 sesuai dengan isu-isu dan hasil analisis yang ada, maka strategi pembangunan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Menyusun regulasi pendidikan.
2. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan, dan terlebih khususnya pada kelompok-kelompok usia sekolah.

3. Mendorong pendidikan yang bermutu dan berkualitas sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.
4. Penguatan tata kelola akuntabilitas dan transparansi pendidikan dengan pendekatan yang komprehensif.
5. Menumbuhkembangkan kesadaran peduli lingkungan pada peserta didik warga sekolah dan stakeholder.
6. Penguatan pemberdayaan masyarakat terhadap pendidikan.

#### **4. Arah Pengembangan Pendidikan**

Arah kebijakan pembangunan diperlukan sebagai dasar pedoman pelaksanaan operasional lapangan dan menjadikannya lebih terencana, terarah, serta terukur dengan baik. Untuk perluasan akses pendidikan, maka arah kebijakan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan biaya operasional pendidikan.
- b. Peningkatan sarana dan prasarana yang memenuhi standar nasional pendidikan.
- c. Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pendidikan.
- d. Subsidi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (SBOSD) dan beasiswa berprestasi.
- e. Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan.

Tujuan strategis Pendidikan yaitu terlaksananya kurikulum nasional yang diselaraskan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi menggunakan strategi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan dan kapasitas tenaga pendidikan agar dapat memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan.
- b. Sertifikasi dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

## Peningkatan Pendidikan

- c. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, bahan ajar, metode pembelajaran dan sistem penilaian yang berstandar nasional dan internasional.
- d. Pengembangan sekolah-sekolah potensial sebagai sekolah unggulan. baik yang berbasis keunggulan lokal maupun nasional.
- e. Pembinaan dan pengembangan minat, kemampuan dan bakat siswa serta fasilitasi anak-anak berprestasi.
- f. Penyediaan sarana dan bahan belajar (perpustakaan, laboratorium, matematika, alat peraga pendidikan, buku teks pelajaran, buku non-teks pelajaran dan bacaan lain yang relevan).
- g. Pemanfaatan TIK dalam pendidikan untuk peningkatan kompetensi peserta didik. guru dan pamong belajar.
- h. Perencanaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan standar dan sistem pengadaan, penempatan dan pemerataan tenaga pendidik sesuai dengan standarisasi nasional pendidikan.

Kemudian arah kebijakan untuk akuntabilitas dan transparansi pendidikan, melalui penguatan tata kelola, akuntabilitas dan transparansi pendidikan melalui pendekatan komprehensif adalah sebagai berikut:

- a. Penataan dan pengembangan sistem pendataan dan informasi manajemen sekolah.
- b. Pengembangan dan peningkatan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- c. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.
- d. Peningkatan kapasitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup manajemen pendidikan dan aset.
- e. Penguatan sistem pengendalian dan pengawasan.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab dari pemerintah

dan masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan tentang partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Optimasi peran dan fungsi Komite Sekolah.
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

## **5. Analisis Kebutuhan Pendidikan**

Makna analisis kebutuhan seperti yang sudah dijelaskan menunjukkan adanya proses mengenali, memilah dan menyisihkan. Dalam memulai langkah-langkah tersebut sebenarnya pelaku tidak mungkin melepaskan diri dari pekerjaan mengukur dan menilai sesuatu. Untuk menentukan hasil mengenali, memilah dan menyisihkan ada proses membandingkan gejala yang sedang dikenali dan dipilih dengan suatu patokan.

Menurut Anderson (1975), secara umum keluasan atau besarnya kebutuhan dapat diukur dengan dua macam cara, yaitu cara subjektif dan objektif. Pengukuran secara subjektif terjadi apabila pelaku membandingkan sesuatu kebutuhan dengan kondisi yang dapat diterima olehnya. Di lain hal, pengukuran secara objektif terjadi apabila kebutuhan yang diukur itu dibandingkan dengan besarnya kebutuhan sesuatu bidang yang terkait dan sesuai dengan bidang yang akan dievaluasi.

Tentang bagaimana cara dan penahapan dalam melakukan penilaian kebutuhan dijelaskan oleh Anderson seperti di bawah ini.

- a) Penilaian kebutuhan secara objektif
  - ✓ Mengidentifikasi lingkup tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi.
  - ✓ Menentukan indikator dan cara pengukuran tujuan-tujuan.

## Peningkatan Pendidikan

- ✓ Menyusun kriteria (standar) untuk tiap-tiap indikator, dengan acuan pedoman atau acuan apa saja yang ada dalam sistem dan bidang yang dievaluasi.
- ✓ Menyusun alat pengukuran untuk tiap-tiap indikator.
- ✓ Membandingkan kondisi yang diperoleh dengan kriteria. Jika data yang diperoleh lebih rendah dari tingkat standar,
- ✓ Mengidentifikasi tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi.
- ✓ Menentukan pilihan kriteria atau menyusun kriteria yang sesuai dengan setiap tujuan masing-masing bidang dan indikator. Dalam langkah ini evaluator perlu mengumpulkan banyak bukti formal yang akan digunakan untuk dasar pertimbangan kebutuhan.
- ✓ Menyusun skala bertingkat yang digunakan untuk mempertimbangkan tingkat penampilan indikator. Skala tersebut seyogianya berbentuk interval.
- ✓ Jika sudah selesai membuat skala, kumpulkan semua calon evaluator untuk bersama-sama menentukan urutan kebutuhan dan skala prioritas kebutuhan. Jika terdapat dua kebutuhan yang sejajar, diperlukan lagi kesepakatan untuk menentukan mana kebutuhan yang lebih mendesak untuk diprioritaskan dalam penyelesaiannya.

Selain dua cara tersebut evaluator dapat menggunakan gabungan dari keduanya, yaitu sebagian menggunakan cara objektif, sebagian yang lain menggunakan cara subjektif. Di samping itu, seorang evaluator dapat juga menambahkan bahan lain yang diambil dari pihak luar dan di luar dirinya. Yang dimaksud dengan pihak luar di antaranya adalah kawan-kawan dekat atau anggota keluarga lain dari respinden yang diperkirakan pihak tersebut memang diperlukan dan data yang diperlukan dan data yang diberikan dapat dipercaya.

## *Membangun Pendidikan Efektif*

Apa pun pendekatan yang diambil, apakah secara objektif, subjektif atau keduanya, yang penting langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas antar kebutuhan sesuai dengan tujuan yang selanjutnya digunakan untuk menentukan rekomendasi kepada pengambil keputusan demi tindak lanjut program. Perlu diingat bahwa para evaluator tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang program, tetapi sekedar memberikan rekomendasi kepada pengambil keputusan. Selanjutnya, pilihan pengambil keputusan itulah yang menentukan tindak lanjut.

Adapun kebutuhan pendidikan sebagai landasan arah kebijakan pendidikan di kabupaten Jepara antara lain:

1. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata:
  - Penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua;
  - Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS;
  - Perbaikan gizi siswa SD/MI melalui PMT-AS;
  - Peningkatan daya tampung SMP/MTs/ sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan;
  - Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang, peningkatan angka melanjutkan.
2. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah:
  - Peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan non-formal;
  - Rehabilitasi gedung-gedung SMA/SMK/ MA/ sederajat;
  - Peningkatan kualitas pendidikan menengah;
  - Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan
3. Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi:
  - Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi;

## Peningkatan Pendidikan

- Penguatan otonomi dan manajemen pendidikan tinggi;
  - Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana;
  - Peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3.
4. Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan:
    - Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru;
    - Peningkatan kompetensi guru.
  5. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal dan informal:
    - Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non-formal.
  6. Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional:
    - percepatan penyusunan peraturan perundangan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional
  7. Pemantapan Pendidikan Karakter Bangsa:
    - Sosialisasi, edukasi dan internalisasi nilai budaya ke dalam proses pembelajaran.
    - Peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek, dan seni .
  8. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan:
    - Peningkatan jumlah dan kapasitas guru dan kapasitas penyelenggara;
    - Pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan sesuai SNP.
  9. Peningkatan Budaya Gemar Membaca dan Layanan Perpustakaan:
    - Peningkatan keberaksaraan penduduk;

- Pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca.
10. Mengelola modal sosial (*Social Capital*) dalam pengembangan pendidikan.
- Saling Percaya (*Trust*), meliputi kejujuran, keadilan, sikap egaliter, toleran, keramahan.
  - Jaringan social (*social network*), meliputi partisipasi, resiprositas (pertukaran timbal balik), solidaritas dan kerjasama.
  - Pranata (*institutions*), meliputi nilai-nilai, norma dan sanksi serta aturan.

## **6. Penyelarasan Program dan Kegiatan**

Beberapa Kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) Kabupaten Jepara, antara lain:

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Menengah Universal, dengan ciri sebagai berikut:
- Difasilitasi oleh pemerintah untuk menampung semua penduduk usia sekolah.
  - Pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
  - Sanksi relatif longgar bagi yang tidak mengikuti.

Pentingnya Pendidikan Menengah Universal :

- a) Menjaga kesinambungan dan konsekuensi logis keberhasilan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- b) Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja, sehingga bila tidak sekolah akan memiliki dampak sosial yang kurang baik.
- c) Menjawab tantangan persaingan global yang menempatkan makin pentingnya SDM berpendidikan.
- d) Wajib belajar memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan.

## Peningkatan Pendidikan

e) Pendidikan menengah memiliki kontribusi positif terhadap kehidupan bersosial dan berpolitik.

b. Implementasi kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dikembangkan untuk meningkatkan capaian pendidikan dengan 2 (dua) strategi utama yaitu peningkatan efektifitas pembelajaran pada satuan pendidikan dan penambahan waktu pembelajaran di sekolah. Efektifitas pembelajaran dicapai melalui 3 tahapan yaitu efektifitas Interaksi, efektifitas pemahaman, dan efektifitas penyerapan.

- 1) Efektifitas Interaksi akan tercipta dengan adanya harmonisasi Iklim akademik dan budaya sekolah. Iklim dan budaya sekolah sangat kental dipengaruhi oleh manajemen dan kepemimpinan dari kepala sekolah dan jajarannya. Efektifitas Interaksi dapat terjaga apabila kesinambungan manajemen dan kepemimpinan pada satuan pendidikan. Tantangan saat ini adalah sering dijumpai pergantian manajemen dan kepemimpinan sekolah secara cepat sebagai efek adanya otonomi pendidikan yang sangat dipengaruhi oleh politik daerah.
- 2) Efektifitas pemahaman menjadi bagian penting dalam pencapaian efektifitas pembelajaran. Efektifitas tersebut dapat tercapai apabila pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal siswa melalui observasi (Menyimak, Melihat, Membaca, Mendengar), asosiasi, bertanya, menyimpulkan, mengkomunikasikan. Oleh karena itu Penilaian berdasarkan proses dan hasil pekerjaan serta kemampuan menilai sendiri.
- 3) Efektifitas Penyerapan dapat tercipta mana kala adanya kesinambungan pembelajaran secara horisontal dan vertikal. Kesinambungan pembelajaran secara horizontal bermakna adanya kesimbungan mata pelajaran dari kelas I sampai dengan kelas VI pada tingkat SD, kelas VII sampai dengan IX

pada tingkat SMP dan kelas X sampai dengan kelas XII. Selanjutnya kesinambungan pembelajaran vertikal bermakna adanya kesinambungan antara mata pelajaran pada tingkat SD, SMP, sampai dengan SMA/SMK.

Sinergitas dari ketiga efektifitas pembelajaran tersebut akan menghasilkan sebuah transformasi nilai yang bersifat universal, nasional dengan tetap menghayati kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang berkarakter mulia.

Selanjutnya, penerapan kurikulum 2013 diimplementasikan adanya penambahan jam pelajaran. Hal tersebut sebagai akibat dari adanya perubahan proses pembelajaran yang semula dari siswa diberi tahu menjadi siswa mencari tahu. Selain itu, akan merubah pula proses penilaian yang semula dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output. Penambahan jam pelajaran bukan suatu hal kemustahilan. Karena kecenderungan akhir-akhir ini banyak negara menambah jam pelajaran seperti KIPP dan MELT di AS, Korea Selatan. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat. Walaupun pembelajaran di Finlandia relatif singkat, tetapi sudah didukung dengan pembelajaran tutorial.

Perubahan kurikulum diperlukan karena adanya perubahan zaman, sehingga kebutuhan dalam bidang pendidikan pun ikut berubah, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang harus dimiliki generasi muda bangsa. Apalagi Indonesia memiliki bonus demografi dalam jumlah usia penduduk yang produktif dalam kurun waktu 2010-2040.

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan. Disamping kurikulum, terdapat sejumlah faktor diantaranya: lama siswa bersekolah; lama siswa tinggal di sekolah; pembelajaran siswa aktif

## Peningkatan Pendidikan

berbasis kompetensi; buku pegangan atau buku babon; dan peranan guru sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan.

Orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap (*attitude*), keterampilan (*skill*) dan pengetahuan (*knowledge*). Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan Pasal 35: kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Hal ini sejalan pula dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu.

Tiga faktor lainnya juga menjadi alasan Pengembangan Kurikulum 2013 adalah:

- a) Tantangan masa depan diantaranya meliputi arus globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, dan ekonomi berbasis pengetahuan.
- b) Kompetensi masa depan yang antaranya meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang efektif, dan kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda.
- c) Fenomena sosial yang mengemuka seperti perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam berbagai jenis ujian, dan gejolak sosial (*social unrest*). Yang keempat adalah persepsi publik yang menilai pendidikan selama ini terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, beban siswa yang terlalu berat, dan kurang bermuatan karakter.
- c. Mengupayakan melalui pengusulan penganggaran berbasis kinerja dengan sasaran :

### *Membangun Pendidikan Efektif*

- a) Peningkatan APK PAUD.
- b) Peningkatan layanan TK/RA swasta.
- c) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sekolah, olah raga dan pemuda.
- d) Pemberian beasiswa untuk Gakin, beasiswa retrieval, beasiswa bakat dan prestasi.
- e) Penyelenggaraan PLS.
- d. Efisiensi pengelolaan anggaran melalui penggabungan sekolah dengan jumlah murid sedikit dan tidak berlokasi di daerah terpencil dan penggabungan sekolah-sekolah yang berlokasi dalam satu halaman sekolah.
- e. Efisiensi pengelolaan sumber daya manusia guru dengan penataan guru di sekolah-sekolah yang kekurangan guru dan sekolah-sekolah yang kelebihan guru.
- f. Menerapkan gerakan peningkatan mutu pendidikan yang terintegrasi melalui : Peningkatan kualitas input, peningkatan kualitas proses, dan peningkatan kualitas output pendidikan.
- g. Mengupayakan kerja sama dengan pihak lain dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan.
- h. Memberikan dukungan bantuan operasional yang terus meningkat kepada SMK dalam rangka mewujudkan pendidikan kejuruan sebagai sekolah pilihan masyarakat dan lulusan siap pakai.
- i. Mewujudkan pendidikan berwawasan gender.
- j. Memberdayakan sumber daya yang dimiliki dalam mewujudkan prestasi di bidang : akademik, keterampilan, olah raga, dan seni melalui berbagai event dan strata.
- k. Mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan menjadi tenaga yang profesional dalam bidang tugasnya.

## Peningkatan Pendidikan

Dalam UUD RI No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan berbagai upaya untuk mengembangkan standar kompetensi pendidik, antara lain dengan disahkannya undang-undang guru dan dosen yang ditindaklanjuti dengan pengembangan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang guru dan dosen. Lahirnya undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengharuskan semua pendidik menguasai empat kompetensi. Semuanya itu bermaksud untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Ada beberapa strategi pemerintah dalam mengembangkan kompetensi pendidik, yaitu:

- a) Penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan pendidikan profesi.
- b) Pemenuhan hak dan kewajiban pendidik sebagai tenaga profesional sesuai dengan prinsip profesionalitas.
- c) Penyelenggaraan kebijakan strategi dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, kompetensi, maupun sertifikasi yang dilakukan secara merata, objektif, transparan, dan akuntabel untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.
- d) Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi pendidik untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian profesional.
- e) Peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap pendidik dalam melaksanakan tugas profesional.
- f) Pengakuan yang sama antara pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- g) Penguatan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru sebagai pendidik profesional, dan
- h) Peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru. (Mulyasa, 2008: 6)

Dari kedelapan strategi pengembangan kompetensi diatas, merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi pendidik. Semua itu dilakukan hasil pertimbangan dan evaluasi. Adanya analisis mengenai kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Maka pengembangan kompetensi pendidik, bukan hanya tanggungjawab pemerintah, sekolah, guru, tetapi masyarakat juga harus ikut andil.

- l. Mengelola modal sosial (*Social Capital*) dalam pengembangan pendidikan.

Pemahaman istilah “Modal Sosial” atau Social Capital sementara ini memang belum meluas, karena mungkin belum dianggap menjadi suatu teori yang spesifik dan penting bagi kajian-kajian sosial. Atau mungkin juga karena istilah “Modal Sosial” memang dianggap sudah termasuk dalam konsep pemahaman teori-teori sosiologi yang sudah biasa dikenal.

Beberapa acuan nilai dan unsur yang merupakan ruh modal sosial antara lain: sikap yang partisipatif, sikap yang saling memperhatikan, saling memberi dan menerima, saling percaya mempercayai dan diperkuat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang mendukungnya. Unsur lain yang memegang peranan penting adalah kemauan masyarakat untuk secara terus menerus proaktif baik dalam mempertahankan nilai, membentuk jaringan kerjasama maupun dengan penciptaan kreasi dan ide-ide baru. Inilah jati diri modal sosial yang sebenarnya.

## Peningkatan Pendidikan

Tantangan bagi dunia pendidikan umumnya dan pendidikan luar sekolah khususnya adalah bagaimana hasil pendidikan tidak sekedar menekankan pada penguatan modal manusia (pengetahuan dan keterampilan) tapi juga mengarahkan pada optimalisasi potensi masyarakat yang tertuang dalam modal sosial. Sehingga secara bersama-sama manusia memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan memanfaatkan institusi sosial yang ada untuk mencapai tujuan bersama.

Praktik-praktik kependidikan dewasa ini mengalami banyak perubahan dan pengembangan, tidak terkecuali pendidikan luar sekolah. Salah satu isu yang relevan dengan pengembangan pendidikan luar sekolah adalah konsep modal sosial (*social capital*). Modal sosial menjadi isu relevan mengingat jurusan pendidikan luar sekolah memiliki peluang besar untuk menerapkan dan mengembangkan konsep ini sesuai dengan budaya yang berkembang di Indonesia.

Modal sosial menjadi sangat penting dan relevan dengan pendidikan luar sekolah karena sangat memungkinkan bagi praktisi pendidikan luar sekolah untuk berperan didalamnya. Secara konseptual *social capital* membuka peluang bagi warga negara untuk menyelesaikan masalah bersama dengan lebih mudah. Masyarakat seringkali menjadi lebih baik jika bekerjasama dengan orang lain. Modal sosial memberikan kelancaran bagi masyarakat untuk berkembang dengan baik, dimana setiap orang saling mempercayai dan dapat dipercaya dalam setiap interaksi keseharian baik itu interaksi bisnis, interaksi kemasyarakatan atau interaksi lainnya. Modal sosial meningkatkan kesadaran bahwa nasib seseorang saling berhubungan, seseorang tidak dapat menguji pandangannya sendiri tanpa melalui dialog dengan orang lain, baik dalam forum formal maupun informal. Tanpa kesempatan berinteraksi dengan orang lain, maka



# BAB VII

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Dari berbagai kajian diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a) Pembangunan pendidikan belum sepenuhnya mampu menumbuhkan jiwa, sikap, serta kemampuan berpikir analitis, berkomunikasi yang efektif, bekerjasama dalam tim, dan kemampuan kewirausahaan.

Beberapa masalah dan tantangan pembangunan dibidang pendidikan antara lain:

- 1) Kurangnya Pemerataan Kesempatan Pendidikan.
  - 2) Kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan masih rendah.
  - 3) Profesionalisme Guru dan Distribusi Belum Merata.
  - 4) Fasilitas layanan pendidikan yang masih belum merata, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.
  - 5) Manajemen dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan belum efektif dan efisien.
- b) Kebutuhan pendidikan sebagai landasan arah kebijakan pendidikan di kabupaten Jepara antara lain:
    1. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata:

## *Membangun Pendidikan Efektif*

- Penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua;
  - Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS;
  - Perbaikan gizi siswa SD/MI melalui PMT-AS;
  - Peningkatan daya tampung SMP/MTs/ sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan;
  - Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang, peningkatan angka melanjutkan.
2. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah:
- Peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan non-formal;
  - Rehabilitasi gedung-gedung SMA/SMK/MA/ sederajat;
  - Peningkatan kualitas pendidikan menengah;
  - Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan
3. Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi:
- Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi;
  - Penguatan otonomi dan manajemen pendidikan tinggi;
  - Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana;
  - Peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S3.
4. Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan:
- Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru;

## Penutup

- Peningkatan kompetensi guru.
5. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal dan informal:
    - Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non-formal.
  6. Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional:
    - percepatan penyusunan peraturan perundangan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional
  7. Pemantapan Pendidikan Karakter Bangsa:
    - Sosialisasi, edukasi dan internalisasi nilai budaya ke dalam proses pembelajaran.
    - Peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek, dan seni.
  11. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan:
    - Peningkatan jumlah dan kapasitas guru dan kapasitas penyelenggara;
    - Pengembangan kurikulum dan metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan sesuai SNP.
  12. Peningkatan Budaya Gemar Membaca dan Layanan Perpustakaan:
    - Peningkatan keberaksaraan penduduk;
    - Pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca.
  13. Mengelola modal sosial (*Social Capital*) dalam pengembangan pendidikan.
    - Saling Percaya (*Trust*), meliputi kejujuran, keadilan, sikap egaliter, toleran, keramahan.

- Jaringan social (*social network*), meliputi partisipasi, resiprositas (pertukaran timbal balik), solidaritas dan kerjasama.
- Pranata (*institutions*), meliputi nilai-nilai, norma dan sanksi serta aturan.

## 2. Saran

**Pertama, Kebijakan di Era Desentralisasi.** Pada masa orde baru, pengadaan fasilitas fisik pendidikan seperti USB, RKB, sarana belajar, buku teks pelajaran, dan sarana lainnya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat. Dalam era desentralisasi, UU No. 32/2005 dan PP. No. 38/2007 mengamanatkan bahwa program pengadaan prasarana dan sarana fisik pendidikan dilaksanakan oleh propinsi dan kabupaten/kota karena daerah lebih peka terhadap permasalahan sekolah masing-masing. Program-program pembangunan pendidikan nasional yang pada periode 2005-2009 berbasis pada pilar (*perluasan, pemerataan dan keadilan; mutu, relevansi dan daya saing; serta tatakelola dan akuntabilitas*) seyogyanya tidak lagi dilaksanakan oleh pusat. Pada periode 2010-2014, program tersebut diturunkan menjadi program pemerintah daerah dengan penajaman pada pilar: keadilan; mutu dan keunggulan, serta tatakelola dan akuntabilitas publik, sesuai urusan masing-masing daerah berdasarkan PP No. 38/2008. Pekerjaan Pemerintah pusat yang mendesak adalah: penataan (*streamlining*) kebijakan pendidikan nasional pusat-daerah, penataan manajemen pendidikan di kabupaten, mekanisme anggaran pendidikan pusat-daerah, pengembangan mutu dan daya saing pada tingkat global, penajaman rumusan standar pendidikan Kabupaten melalui *benchmarking* internasional, peningkatan kapasitas daerah, serta revitalisasi pendidikan karakter bangsa.

**Kedua, Penataan Program Pendidikan Kabupaten.**

Pemerintah Kabupaten perlu menata ulang kebijakan dan program-program pendidikan dalam tiga kategori besar, yaitu: pendidikan dasar; pendidikan kejuruan dan profesional, serta pendidikan akademik, iptek dan riset.

- a. Pendidikan dasar harus dibangun dalam kerangka penguatan fondasi yang kokoh untuk peningkatan mutu pada jenjang pendidikan berikutnya. Perlu dilakukan desain ulang kurikulum, pendekatan pembelajaran, dan evaluasi dalam tiga kelompok besar program pendidikan dasar, yaitu: (1) Pendidikan budaya dan karakter bangsa, (2) Pendidikan kemampuan dan pengetahuan dasar untuk belajar (*basic literacy*); dan kecakapan hidup yang berorientasi lingkungan (*life skills*).
- b. Kebijakan perluasan pendidikan kejuruan dan teknik yang bisa pendidikan formal kejuruan (*formal education bias*) seperti SMK dan Politeknik, perlu dirancang ulang menuju 'perluasan pendidikan kejuruan' (dalam UU No. 20 Tahun 2003) dalam arti yang lebih luas agar selaras dengan kebijakan dan program perekonomian negara. Depdiknas perlu mengatur kerjasama yang sistemik antara penyelenggara pendidikan (*providers*) dengan pemakai lulusan (*users*), agar perluasan pendidikan kejuruan dan teknik dapat diselaraskan dengan upaya perluasan investasi lapangan kerjanya.
- c. Membangun pendidikan tinggi dengan mutu bersaing secara global, harus segera dimulai dengan program-program yang konkret dan terukur. Perguruan tinggi perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk *benchmarking and networking* dengan beberapa universitas ternama dunia untuk menggapai standar mutu internasional. Untuk itu, kebijakan privatisasi dan otonomi pendidikan tinggi (BHMN, BHP) yang telah dimulai perlu dilanjutkan secara bertahap pada

sejumlah PT yang dianggap mampu, tetapi dilakukan dengan mengurangi beberapa akses negatifnya.

***Ketiga, Revitalisasi Kurikulum dan Ujian Nasional.*** Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga kabupaten Jepara perlu merubah *mind set* mengenai konsep kurikulum dan pembelajaran dilingkup Kabupaten. Kurikulum tertulis dan pendekatan pembelajaran konvensional (*rote learning*) terbukti gagal dalam merubah perilaku dan budaya mutu bagi siswa, guru dan pengelola pendidikan. Wawasan tentang mutu pendidikan perlu dirubah dan diarahkan pada peningkatan kapasitas sekolah (*school capacity*) dalam mengelola kegiatan belajar siswa seoptimal mungkin. Dalam peningkatan mutu pendidikan, pemerintah harus lebih berperan dalam memberikan "bantuan" bagi sekolah agar dapat mendorong siswa untuk belajar optimal sesuai sumberdaya yang dimilikinya. Peningkatan mutu tidak lagi dilakukan dengan mensyaratkan siswa menghafal sejumlah pengetahuan dengan tes terstandar yang "dipaksakan" secara nasional.

- a. Perlu merancang kembali 'kurikulum tingkat nasional' dengan melakukan: (1) review dan uji materil standar kompetensi dan standar materi pendidikan secara nasional, baik cakupannya, kedalaman maupun keluasan materinya, melalui *benchmarking* secara internasional dan melibatkan tenaga ahli ternama di dunia; (2) review terhadap beban belajar minimal secara nasional yang tidak memaksakan siswa, sebagai acuan penyusunan kurikulum tingkat sekolah; (3) review kebijakan buku pelajaran nasional untuk mendorong kualitas buku, persaingan sehat penulisan buku, pengembangan industri perbukuan yang sehat, dan mekanisme penyebarannya agar buku mencapai semua sekolah dan siswa; (4) penganturan Kalender Pendidikan Nasional berkaitan dengan jumlah hari belajar, jumlah jam belajar per minggu di

## Penutup

kelas dan 'Hari Krida', hari libur nasional, serta even-even penting oendidikan nasional lainnya.

- b. Perlu meninjau ulang kebijakan pembelian hak paten dan *online textbooks*, karena dampak sebagai berikut: biaya *download* yang lama dan mahal, siswa tidak merasa perlu memiliki dan/atau membeli buku yang bermutu, buku yang dimuat secara *on-line* kurang berkualitas karena mekanisme dalam jual-beli hak paten, matinya industri buku pelajaran di daerah karena buku pelajaran tidak laku dijual melalui saluran komersil, serta tidak ada insentif bagi para penulis buku yang berkualitas.
- c. Melakukan review nasional kebijakan Ujian Nasional (UN) berkaitan dengan kualitas penyelenggaraannya sebagai "uji pengetahuan", fungsinya dalam menentukan kelulusan, serta akibatnya terhadap keresahan publik. Sesuai UU 20/2003, sekolah yang berwenang menentukan kelulusan berdasarkan penilaian terhadap semua sisi perkembangan anak sejak awal sampai akhir sekolah. Peranan pemerintah adalah akreditasi terhadap obyektivitas kelulusan yang dilakukan oleh sekolah.
- d. Evaluasi secara nasional diperlukan untuk pemetaan mutu pendidikan, analisis dan umpan baliknya terhadap penjaminan mutu pendidikan; *benchmarking* antar-wilayah; serta untuk pemberian insentif bagi sekolah yang berprestasi. Evaluasi nasional tidak mengukur pengetahuan siswa, tetapi mengukur kemampuan belajar siswa, misalnya *Basic Scolastic Aptitude Test* yang dapat dilaksanakan setiap dua atau tiga tahunan dengan teknik sampling.

### **Keempat, Penerapan Pengembangan Kurikulum 2013.**

Penyusunan kurikulum 2013 yang menitikberatkan pada penyederhanaan, tematik-integratif mengacu pada kurikulum 2006 yang di dalamnya ada beberapa permasalahan di antaranya;

## *Membangun Pendidikan Efektif*

1. Konten kurikulum yang masih terlalu padat, ini ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasaan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak;
2. Belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional;
3. Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan; beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum;
4. Belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global;
5. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru;
6. Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala; dan
7. Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir.

Konsep kurikulum 2013 menekankan pada aspek kognitif, afektif, psikomotorik melalui penilaian berbasis test dan portofolio saling melengkapi. Kurikulum baru tersebut akan diterapkan untuk seluruh lapisan pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas maupun Kejuruan. Siswa untuk mata pelajaran tahun depan sudah tidak lagi banyak menghafal, tapi lebih banyak kurikulum berbasis sains.

**Kelima, *Sertifikasi Profesi Pendidik*.** Peningkatan kualitas profesi guru dengan mekanisme portofolio dalam sertifikasi guru

## Penutup

atau pelatihan singkat adalah sangat beresiko. Perlu segera ditata dan dikembangkan “Sistem Keprofesian Guru” untuk mempercepat peningkatan mutu profesi guru, yang meliputi: Tingkatan Profesi Guru, Sistem Pelatihan Profesi Guru, dan Mekanisme Ujian Profesi Guru dan Promosi. Pekerjaan Depdiknas yang paling mendesak adalah sebagai berikut:

- a. Merancang dan menetapkan Tingkatan Profesi Guru dalam tiga tingkatan, yaitu: (1) Guru Yuniior; (2) Guru Tingkat Satu, (2) Guru Tingkat Dua, (3) Konselor, (4) Wakil atau Kepala Sekolah.
- b. Merancang Sistem Pelatihan Profesi Guru misalnya yang meliputi: Program Kualifikasi; Program Penguatan Profesi guru Berprestasi; dan Program Pelatihan Jabatan. Sistem ini perlu diatur oleh PP tersendiri berkaitan dengan penyelenggara, substansi, dan penilaiannya.

Sistem pelatihan profesi dirancang dalam tiga jenis program, yaitu: *pertama*; ‘Program Kualifikasi’ menawarkan pelatihan untuk promosi satu tingkat dari guru biasa ke tingkat I, ke tingkat II, dan ke Konselor, selama 30 hari atau 180 jam pelatihan; *Kedua*, ‘Program Pelatihan Jabatan’ menawarkan pelatihan untuk promosi menjadi wakil atau kepala sekolah bagi Guru Tingkat II atau konselor melalui peningkatan pengetahuan guru dalam pedagogi dan pengetahuan umum termasuk wawasan perkembangan teknologi; dan *ketiga*; bagi guru-guru yang berprestasi, disediakan program pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas mereka; training tersebut dirancang selama 2 tahun baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk mengembangkan dan menerapkan sistem keprofesian ini, Indonesia dapat belajar dari Korea.

- c. Sistem ujian profesi guru yang terstandar secara nasional perlu segera diciptakan dalam rangka promosi jabatan guru dari suatu tingkat ke tingkat profesi di atasnya. Sistem ujian

### *Membangun Pendidikan Efektif*

ini dapat dilaksanakan secara bertingkat, dari tingkat kabupaten, propinsi, sampai tingkat nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Beare, Caldwell, Millikan. 1992. *Creating an excellent school*. London: Routledge.
- Bewa, Ibrahim. 2009. *Sekolah Efektif Menuju Peningkatan Mutu Pendidikan*.
- Center for Information Office of Educational and Cultural Research and Development Ministry of Education and Culture. 1990 *Educational Indicators: Indonesia*. Jakarta.
- Director General of Primary and Secondary Education. 1990. *Brief Information on Primary and Secondary Education*. Jakarta.
- Ditjen Dikti, Depdikbud. 1992. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: Depdikbud
- Hamalik, Oemar. 2006. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Henry, Levin M. 1983. *Cost Effectiveness A Primer*. London: Sage Publications
- Bafadal, Ibrahim. 2003. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Komar. 2008. *Manajemen Sekolah Efektif dan Unggul*. [Online], Tersedia: <http://www.slideshare.net>.

## *Membangun Pendidikan Efektif*

- Komariah, A. 2005. *Visionery Leadership menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Krathwohl, David R. dan Bloom, Benyamin S. 1974. *Taxonomy of Educational Objectives (Handbook II: Affective Domain)*. New York: David Mc Kay Co0 Inc.
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional:Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo persada.
- Macbeath & Mortimer. 2001. *Improving school effectiveness*. Buckingham: Open University Press.
- N.K, Roestiyah. 1989. *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Niam, Asrorun. 2006. *Membangun Profesionalitas Guru*. Jakarta : eL-SAS.
- . 2006. *Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pigozzi, Mary J dan Cieutat, Victor J. 1988. *Education And Human Resources Sector Assessment*. Florida State University.
- Puskur. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakrta: Balitbang Depdiknas.
- Rosyada, Dede. 2004. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Samana, A. 1994. *Profesionalisme Keguruan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Santoso, Slamet Iman. 1980. *Laporan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdikbud.

## Daftar Pustaka

- Sjafei, Mohammad. 1979. *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS.
- Soebagio Atmodiworo. 2000. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: PT. Ardadijaya.
- Soetrisno dan Brisma Renaldi. 2003. *Manajemen Perkantoran Modern*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Suharsaputra, Uhar. 2010. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Sujanto, Bedjo. 2004. *Mensiasati Manajemen Berbasis Sekolah Di Era Krisis Yang Berkepanjangan*. ICW.
- Syafarudin. 2002. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*, Grasindo.
- Tirtaraharja, Umar. 1990. *Laporan Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdikbud.
- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanusi, Uwes. 1999. *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*. Jakarta: Logos wacana Ilmu.
- Uzer Usman, Moch. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wahyu Ariyani, Doretea. 1999. *Manajemen Kualitas*. yogyakarta: Andioffset.

## BIODATA PENULIS

Nama : **Dr. H. NUR KHOIRI, M.Ag**  
NIP : 197404182005011002  
NIDN : 2018047404  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Jepara, 18 April 1974  
Agama : Islam  
Golongan/Pangkat : III/D Penata Tingkat. I  
Jabatan Fungsional Akademik: Lektor  
Pekerjaan : Dosen  
Bidang Keahlian : Manajemen Pendidikan  
Alamat Kantor : Universitas Islam Negeri  
Walisongo Jl. Walisongo 3-5, Semarang  
Fax : 024-7614454  
Telp/HP/WA : 081325776135  
Alamat Rumah : Jl. Soekarno- Hatta KM 5,5  
Rt.02/01 Langon Tahunan  
Jepara  
E-Mail : nur\_khoiri@yahoo.co.id  
: nurkhoirijepara74@gmail.com  
: nurkhoiri@walisongo.ac.id  
: khoiri@unisnu.ac.id  
Web : nurkhoirionline.com

## RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Lulus	Jenjang	Nama	Tempat
1987	MI/SD	SD NEGERI 1 LEBUAWU PECANGAAN	JEPARA

### Biodata Penulis

1990	SLTP	SMP NEGERI 1 PECANGAAN	JEPARA
1994	SLTA	MA WALISONGO PECANGAAN	JEPARA
1998	S1	FAK. TARBIYAH (Pendidikan Agama Islam)	JOMBANG
2000	S2	PASCASARAJANA (Studi Pen- didikan Islam)	SURABAYA
2017	S3	PASCASARJANA (Manajemen Pendidikan) UNNES SEMARANG	SEMARANG

### RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

Tahun Lulus	Jenjang	Nama	Tempat
1987	Diniyyah Awaliyah	Mabadiul Huda	JEPARA
1994	Diniyah Wustho	Athfal Islam Pecangaan	JEPARA
1998	Ponpes	Ponpes Darul Falah Tebuireng Cukir	JOMBANG
1998	Ponpes	Ponpes Tebuireng Cukir	JOMBANG
2000	Ponpes	Ponpes Paculgowang	JOMBANG
2000	Ponpes	Ponpes Mahasiswa Modern An- Nur	SURABAYA

### RIWAYAT PEKERJAAN

Tahun	Jabatan	Instansi
1994 s/d 1998	Guru	Ponpes Darul Falah Tebuireng Jombang
2000 s/d 2005	Guru	SMA Islam Jepara
2000 s/d 2005	Guru	MA Matholiul Huda Bugel Kedung

### *Membangun Pendidikan Efektif*

2000 s/d 2005	Guru	MA Walisongo Pecangaan Jepara
2000 s/d sekarang	Dosen	INISNU Jepara
2005 s/d sekarang	Dosen	UIN Walisongo Semarang
2013 s/d sekarang	Dosen	Pascasarjana UNISNU Jepara
2004 s/d 2011	Ketua	Ketua Balai Penelitian INISNU Jepara
2011 s/d 2013	Pembantu	Fakultas Tarbiyah INISNU Jepara
2013	Sekretaris	Lembaga Pengembangan Pendidikan UNISNU Jepara
2014 s/d 2019	Anggota	FITK IAIN Walisongo Semarang
2017	Ketua	Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang

### **PENGALAMAN PENELITIAN**

Tahun	Judul Penelitian	Status Peneliti
2004	Kualitas Pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Proses Demokratisasi dan <i>Civil Society</i> “Studi Deskriptif Analisis Di Kecamatan Kedung dan Pecangaan Kabupaten Jepara	Kelompok
2004	Profil Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Jepara	Kelompok
2005	Mapping Sumber Daya Pendidikan Kabupaten Jepara	Individual

## Biodata Penulis

2005	Mentalitas Komunitas Muslim Dalam Pembangunan “Diskripsi Mentalitas Komunitas Muslim Dalam Melaksanakan Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Ajaran Islam Tentang Etos Kerja Dalam Pembangunan Daerah”	Kelompok
2006	Problematika <i>Droup Out</i> Di Jepara “Kajian Tentang Alternatif Pemecahan Masalah Putus Sekolah dan Penuluran Tamatan di Kabupaten Jepara	Individual
2006	Rencana Induk Pengembangan Pertanian Rakyat Di Kecamatan Jepara Dan Karimunjawa	Kelompok
2007	Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Jepara	Kelompok
2008	Evaluasi Pelaksanaan Program <i>Decentralized Basic Education</i> (DBE) Kabupaten Jepara	Individual
2009	Studi Deskriptif Materi Dan Pola Pembelajaran Fiqih Pada Madrasah Aliyah (MA) Di Jawa Tengah	Individual
2010	Minat Masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bagi Siswa SMP dan MTs Negeri Swasta di Kabupaten Jepara	Individual
2010	Kapitalisme Kaum Santri (Potret Etos Kerja Kaum Santri Pengrajin Meubel Jepara dalam Hegemoni Pengusaha Asing)	Kelompok
2011	Aplikasi Pendekatan <i>Student Active Learning</i> (SAL) dalam Pembelajaran Fiqih “Studi Deskriptif pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) di Jawa Tengah”	Individual
2011	Implementasi Model Cooperative Learning dalam Pembelajaran Fiqih Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa Madrasah	Individual

## Membangun Pendidikan Efektif

2012	Tracer Study Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah INISNU Jepara	Individual
2013	Model Kebijakan Pembangunan Pendidikan Efektif di Kabupaten Jepara	Kelompok
2014	Kinerja Kepala Madrasah (Kontribusi Kepemimpinan, Iklim Sekolah, Kepuasan Kerja, dan Motivasi Kerja Pada Madrasah Aliyah di Kotamadya Semarang)	Individual
2015	Model Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Madrasah Aliyah NU Banat Kudus	Individual
2016	Persepsi dan Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap radikalisme Islam di Indonesia	Kelompok
2016	Penguatan Mutu Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) melalui Al- Masyhura Berbasis <i>Lifeskill</i> Pengolahan Limbah Ikan pada Komunitas Nelayan Tanjung Mas Semarang	Kegiatan Pengabdian Dosen
2017	<i>Tracer Study</i> Dan Respon <i>Stakeholders</i> Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Walisongo Semarang	Kelompok
2018	Kepemimpinan Pembelajaran Kepala Madrasah (Kontribusi Motivasi Kerja, Iklim Sekolah Dan Kepuasan Kerja Pada MA di Kota Semarang	Individual

## KARYA TULIS ILMIAH

### 1. Buku/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2008	Mentalitas Komunitas Muslim dalam Pembangunan	Jurnal An-Nur INISNU

## Biodata Penulis

2010	Peran Media Komunikasi Modern dalam Dakwah Islam	Jurnal An-Nida' INISNU
2011	Minat Masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi SMP dan MTs Negeri Maupun Swasta di Kabupaten Jepara	Jurnal Tarbawi INISNU
2011	Buku: Metodologi Pembelajaran PAI	Mahameru Yogyakarta
2012	Buku: Teknik Evaluasi Hasil Belajar PAI	Mahameru Yogyakarta
2013	Buku: Prototipe Inovasi Pendidikan	Mahameru Yogyakarta
2013	Aplikasi Strategi Ekspositori 'Studi Model dalam Pembelajaran Aqidah Akhlak'	Jurnal Tarbawi INISNU
2013	Kapitalisme Kaum Santri (Potret Etos Kerja Kaum Santri Pengrajin Meubel Jepara dalam Hegemoni Pengusaha Asing)	Jurnal Ihya Ulumudin Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang
2014	Revitalisasi dan Optimalisasi Manajemen Madrasah Sebagai Pendidikan Islam Menuju Pendidikan Alternatif	Jurnal Tarbawi INISNU
2016	Pentingnya Mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi Melalui Implementasi Total Quality Management (TQM)	Jurnal Intelegensia Pascasarjana UNISNU Jepara
2017	Concept Models Best Transformational Leadership Organizational Culture in Madrasah	Jurnal Nadwa UIN Walisongo Semarang

## Membangun Pendidikan Efektif

2017	Penguatan Mutu Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) Melalui Metode Al-Masyhuroh Berbasis <i>Life Skill</i> Pengolahan Limbah Ikan pada Komunitas Nelayan Tanjung Mas Semarang	Jurnal Dimas UIN Walisongo Semarang
2017	The Implementation and Development of Pesantren Culture-Based Leadership Model at MA-NU Banat Kudus	The Journal Of Educational Development Postgraduate Program
2018	Pengembangan Penyusunan Instrumen <i>Four-Tier Diagnostic Test</i> Untuk Mengungkap Miskonsepsi Materi Sistem Ekskresi Di SMA Negeri Mayong	Jurnal Phenomenon , 2018, Vol. 08 (No. 2), pp. 87-101
2018	Buku: Kapitalisme Kaum Santri: Respon terhadap Hegemoni Pengusaha Asing	Next Book
2018	Buku: Wawasan Islam dan budaya jawa	Southeast Asian Publishing
2018	Buku: Metodologi penelitian pendidikan : ragam, model, dan pendekatan	Southeast Asian Publishing
2018	Buku: Dasar-dasar manajemen pendidikan Islam	Southeast Asian Publishing
2018	Buku: Manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan	Next Book

## B. Pemakalah (Prosiding)

Tahun	Judul	Penyelenggara
2014	Kinerja Kepala Madrasah Aliyah (Kontribusi Kepemimpinan, Iklim Organisasi, Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja)	FITK UIN Walisongo Semarang

### Biodata Penulis

2014	Model Kepemimpinan Transformasional Menuju Madrasah Berkualitas	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 'YPPY' Rembang
2015	<i>Effectiveness of Education Development Policy Model in the District of Jepara</i>	Universitas PGRI Semarang
2016	Model Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Madrasah Aliyah NU Banat Kudus	Universitas PGRI Semarang
2017	Pola Peningkatan Mutu Pembelajaran Biologi Berbasis Manajemen Kurikulum di Madrasah Aliyah	Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang

### PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKARKARYA/SIMPOSIUM

Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara
2012	Publikasi Hasil Penelitian Melalui Jurnal Ilmiah Terakreditasi	Universitas Negeri Semarang
2012	<i>International Seminar on Enhancing Academic Literacy to Foster Conservation Values in Character Education</i>	IAIN Walisongo Semarang
2013	<i>International Conference on Islamic Dakwah</i>	IAIN Walisongo Semarang
2013	<i>Workshop Active Learning for Higher Education (ALFHE)</i>	IAIN Walisongo Semarang
2014	Workshop Penyusunan Desain Pengabdian Masyarakat bagi Dosen	Kementerian Agama
2014	Workshop Pengembangan Keterampilan Penyusunan Penelitian Kuantitatif	Kementerian Agama

### *Membangun Pendidikan Efektif*

2014	Training E-Learning	Kementerian Agama
2015	Pengembangan Kelembagaan Fakultas Ilmu Saintek	UIN Walisongo
2016	Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah	Universitas Negeri Semarang
2017	Training Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) UNTUK PENGELOLA PENJAMINAN MUTU DAN UNIT TERKAIT UIN WALISONGO SEMARANG	UIN Sunan Kalijaga

### **KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Tahun	Kegiatan
2000-2003	Koordinator Bidang Forum Studi Pengembangan Daerah
2003-2008	Koordinator Bidang Lembaga Studi Pengembangan Daerah
2007-2010	Koordinator Tim Pemantau Independen (TPI) Ujian Nasional Kabupaten Jepara
2010-2015	Dewan Riset Daerah (DRD) Koordinator Bidang Sosial, Politik dan Budaya(2009-2013), Ketua I Komite Sekolah
2010-2015	Koordinator Bidang Kajian Kontemporer Lembaga Bahstul Masa'il Nahdlatul Ulama (LBM NU) Kabupaten Jepara
2010-2015	Sekretaris Umum Lajnah Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Kabupaten Jepara
2011-2016	Sekretaris Umum Pengurus Yayasan NU Baiturrahman Langan

## Biodata Penulis

2011-2016	Ketua Bidang Informasi dan Data Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Kabupaten Jepara
2016-2020	Sekretaris Umum Pengurus Yayasan Nu Baiturrahman Langon
2018 – 2022	Wakil Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Jepara

## PENGHARGAAN/PRESTASI

Tahun	Bentuk Penghargaan	Penyelenggara
2007	Penyaji terbaik I pada Pertemuan Nasional Jaringan Penelitian PTAI	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Malang
2009	Penyaji terbaik sepuluh besar proposal penelitian dalam Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Peneliti Bidang Kehidupan Keagamaan Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Departemen Agama RI	Departemen Agama RI

## ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Organisasi	Jabatan
2005 s/d 2010	LP. Ma'arif NU Jepara	Wakil Sekretaris
2007 s/d 2008	Forum Studi Pengembangan Daerah (FSPD) Kab. Jepara	Kabid Sosial, Budaya, Politik dan Pendidikan

*Membangun Pendidikan Efektif*

2007 s/d 2008	Forum Studi Pengembangan Daerah (FSPD) Kab. Jepara	Kabid Pendidikan, Sosial, Politik, dan Budaya
2007 s/d 2010	Tim Pemantau Independen (TPI) Ujian Nasional (UN)	Koordinator Kabupaten Jepara
2008 s/d 2010	Lembaga Studi Pengembangan Daerah (LSPD) Kab. Jepara	Kabid Sosial, Budaya, Politik dan Pendidikan
2011 s/d 2015	Lajnah Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Kab. Jepara	Sekretaris Umum
2011 s/d 2015	Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Kab. Jepara	Wakil Ketua bidang Informasi dan Komunikasi
2011 s/d 2016	Yayasan NU Baiturrohman	Sekretaris Umum
2014 s/d 2019	Dewan Riset Daerah Kab. Jepara	Koordinator Bidang Pendidikan, Sosial, Politik, dan Budaya
2016 s/d 2020	Yayasan NU Baiturrohman	Sekretaris Umum
2018 s/d 2022	Dewan Riset Daerah Kab. Jepara	Wakil Ketua Bidang Sosial, Politik, dan Budaya